

**KEMANDIRIAN MASYARAKAT DESA BANMALENG
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
EKONOMINYA TANPA BANTU PEMERINTAH DESA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)



Oleh :

IRWAN HIDAYAT
NIM. 082 144 014

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
DESEMBER 2020**

**EMANDIRIAN MASYARAKAT DESA BANMALENG DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN EKONOMINYA TANPA BANTU PEMERINTAH DESA**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Oleh :

Irwan Hidayat
NIM. 082144014

Disetujui Pembimbing :



Muhibbin, S.Ag, M.Si
NIP. 19711110 200003 1 018

**KEMANDIRIAN MASYARAKAT DESA BANMALENG DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMINYA TANPA BANTU
PEMERINTAH DESA**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Hari : Senin
Tanggal : 09 November 2020

Tim Penguji :

Ketua



Fuadatul Hukoniyah, M.Si
NIP. 19750524 200003 2 002

Sekretaris



Arrumaisha Fitri, M.Psi
NIP. 19871223 201903 2 005

Anggota :

1. Dr. H. Hepni, MM
2. Muhibbin, S.Ag., M.Si



Menyetujui,
Dekan Fakultas Dakwah




Ahidul Asror, M. Ag
NIP. 19740606 200003 1 003

MOTTO

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

Artinya: “Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukur kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.”(QS. Al-Baqorah: 152).¹



¹ Departemen Agama RI, AlQur'an dan Terjemahan As-Salam, (Jakarta: AlHuda. 2015), 24

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar, Nabi Muhammad S.A.W., kupersembahkan sebuah kebahagiaan dalam perjalanan dan perjuangan hidupku teriring rasa terima kasihku yang terdalam kepada:

1. Ayahanda tercinta Fusairi yang senantiasa memberikan kasih sayang, luapan cinta dan naungan doa tiada henti untuk kesuksesan dan keselamatanku di dunia dan akhirat. Ibunda tercinta Zainab terima kasih atas doa, semangat, dukungan dan kasih sayang yang selalu diberikan.
2. Guru yang luar biasa di PP. Sabilul Huda yang telah menjadi partner mengajar Ridha ilahi dan telah mengajarku tegaknya alif sampai banyak hal
3. Saudara kandung saya Mulyadi Abadi. Ema Syafitri S. Pd dan adik Albaroah S.Pd makasih atas doa kalian dan motivasi kalian untukku.
4. Terima kasih kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jember khususnya Komisariat Sunan Ampel IAIN Jember, tempat menampung segala gagasan dan pemikiranku lengkap dengan keluh kesahku. Tempat yang membentuk jiwa visioner makasih.
5. Teman-teman Angkatan 2014, Kelas PMI dan teman-teman yang selalu mendoakan, membantu, dan memberi semangat, serta selalu merangkai momen-momen indah selama masa perkuliahan.
6. Terima kasih juga untuk semua pemberi semangat dan dukungan doa hingga terselesainya tugas ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Kemandirian Masyarakat Desa Banmaleng Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonominya Tanpa Bantu Pemerintah Desa” dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM. Rektor IAIN Jember,
2. Bapak Dr. Ahidul Asror, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam IAIN Jember,
3. Bapak H. Zainul Fanani, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Pemberdayaan Masyarakat Islam
4. Ibu Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom selaku Wakil Dekan Bidang Akademik 1 Fakultas Dakwah IAIN Jember yang telah membimbing kami.
5. Bapak Muhibbin, S.Ag, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan waktu dan kesabarannya dalam membimbing selama penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas Akademik IAIN Jember yang telah membekali ilmu pengetahuan dan teknologi kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan studi di Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam.

7. Seluruh dosen, karyawan dan staf Fakultas Dakwah, khususnya yang berada di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya serta pelayanan akademik yang baik selama ini bagi penulis.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin

Jember, 10 Desember 2020

Penulis



ABSTRAK

Irwan Hidayat, 2020 : *Kemandirian Masyarakat Desa Banmaleng dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonominya Tanpa Bantu Pemerintah Desa.*

Ditengah himpitan ekonomi dan melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok, masyarakat Desa Banmaleng mampu bertahan hidup dengan mengembangkan berbagai usaha rumahan, seperti usaha mebel, produksi batik dan lain-lain. Berbagai usaha tersebut, sayangnya tidak cukup menjadi perhatian pemerintah desa setempat. Pemerintah seolah meyerahkan persoalan yang dihadapi kepada warganya sendiri tanpa ada trobosan berarti. Akibatnya, masyarakat berusaha mandiri dengan segala keterbatasan mereka untuk tetap memenuhi kebutuhan keseharian. Berangkat dari fenomena di atas, yang menjadi masalah penelitian (research problem) ini adalah sebagai berikut: Mengapa masyarakat mampu mempertahankan perekonomian mereka di tengah kebutuhan dan harga-harga semakin meningkat, padahal pemerintah desa tidak peduli dengan persoalan warganya?

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1). Bagaimana Strategi Masyarakat Memenuhi Kebutuhan Dasar Dengan Usaha Rumahan? 2). Apa Strategi Yang Dilakukan Masyarakat Untuk Mengembangkan Usaha Rumahan Agar Memenuhi Kebutuhan? Apa Kontribusi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Usaha Yang Dilakukan Warganya Terhadap Produk Usaha Warganya ?

Tujuan penelitian ini 1). Untuk mengetahui tahapan proses Strategi Masyarakat Memenuhi Kebutuhan Dasar Dengan Usaha Rumahan. 2). Untuk mengetahui strategi yang dilakukan masyarakat untuk mengembangkan usaha rumahan agar memenuhi kebutuhan. 3). Untuk mengetahui kontribusi pemerintah desa dalam pengembangan usaha yang dilakukan warganya terhadap produk usaha warganya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif dengan jenis penelitiannya adalah studi lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumenter. Teknik subyek penelitian menggunakan teknik *purposive* Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, teknik atau metode, dan diskusi sejawat.

Hasil dari penelitian ini yaitu 1). Strategi masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dengan usaha rumahan. 2). Strategi yang di lakukan masyarakat untuk mengembangkan usaha rumahan agar memenuhi kebutuhan. 3). Kontribusi pemerintah desa dalam pengembangan usaha yang dilakukan warganya terhadap produk usaha warganya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Dan Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	12
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	56

B. Lokasi Penelitian	56
C. Subyek Penelitian	56
D. Metode Pengumpulan Data	57
E. Teknik Analisa Data	58
F. Keabsahan Data	58
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	60
A. Gambaran Objek Penelitian	60
B. Penyajian Data dan Analisis	68
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Halaman
Tabel 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Banmaleng	66
Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa banmaleng...	67
Tabel 3 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Banmaleng	67
Tabel 4 Urutan Tingkat Pendidikan Masyarakat	70
Tabel 5 Data Penerimaan Bantuan Modal Usaha Bergulir Desa Banmaleng	87
Tabel 6 Daftar Peserta Study Banding	90



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia sebagian besar masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan, yang hidupnya belum mencapai angka standar kemanusiaan atau belum sejahtera. Tidak sedikit diantaranya keluarga-keluarga yang tidak dapat menyekolahkan anak-anaknya karena menyangkut masalah ekonomi, bahkan masih banyak keluarga-keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya karena mereka tidak bekerja dan tidak memiliki keahlian.

Keluarga yang belum sejahtera tersebut hanya berharap khususnya kepada para pemerintah untuk memberikan bantuan yang berupa lapangan pekerjaan yang sangat mereka butuhkan karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Salah satunya adalah masyarakat desa yaitu masyarakat yang lingkupnya paling terkecil dalam tatanan pemerintahan.

Dalam masyarakat desa, peran kepala desa sangatlah penting demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, kepala desa haruslah orang yang betul-betul peduli terhadap nasib rakyatnya. Kepala desa yang dipilih langsung oleh rakyatnya, diberikan amanat agar dapat betul-betul bisa berperan sebagai pemerintah sekaligus kepala masyarakat yang banyak tantangannya karena seorang kepala desa berhubungan langsung dengan masyarakatnya.

Tantangan terbesar yang harus dihadapi adalah membebaskan rakyat dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan serta belenggu yang menghambat perkembangan kemampuan bangsa. Tantangan dan persoalan yang di hadapi rakyat kita atasi bersama-sama, karena pemerintah tidak mungkin bisa mengatasi tantangan dan persoalan bangsa saat ini tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat serta seluruh komponen bangsa.

Apabila peran serta masyarakat dalam usaha-usaha kesejahteraan telah berlangsung secara melembaga dan terorganisasikan serta telah lebih besar dari peran pemerintah, sedangkan peran pemerintah lebih mengutamakan pada pelaksanaan fungsi-fungsi pengaturan dan pengawasan sedemikian rupa, sehingga masyarakat menjadi pangkal pertama dan utama dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan di lingkungannya.

Masalah di atas merupakan masalah sosial yang senantiasa muncul di tengah kehidupan masyarakat. Hal ini merupakan suatu penyimpangan dari norma dan moral yang berlaku di masyarakat pada satu pihak, sementara dipihak lain ingin menjunjung tinggi norma dan moral bangsa.¹

Kesejahteraan dan kebahagiaan merupakan cita-cita manusia. Untuk mencapai cita-cita tersebut manusia melaksanakan berbagai cara dan upaya yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai komponen utama kesejahteraan. Di samping itu banyak faktor pendukung untuk mencari cita-cita tersebut hingga kesejahteraan masyarakat secara lahiriah mungkin dapat diukur dengan pemenuhan kebutuhan hidup, sedangkan tingkat kebahagiaan

¹ Radar Madura, *Edisi* 21 Oktober. 2017

tidak dapat diukur secara nyata karena relatif, namun mempunyai kaitan dengan tingkat kesejahteraan.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut antara lain terbukti dalam Undang-undang No. 13 / 1998 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan masyarakat, Undang-undang No. 22 / 1999 tentang pokok-pokok pemerintah daerah juga diperkuat oleh keputusan Menteri Sosial dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Masyarakat tentang pola dasar pembangunan bidang kesejahteraan.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan sosial dan ajaran-ajaran tentang kesejahteraan sebagai suatu pembangunan yang memiliki tujuan dimensi kemanusiaan dan merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional.

Pemerintah Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep adalah salah satu dari instansi pemerintah yang memiliki wewenang mengurus persoalan kesejahteraan masyarakat yang meliputi daerah wilayahnya yang terdiri dari 18 Rukun Tetangga (RT) dan 6 Rukun Warga (RW).

Sementara itu dalam kaitannya dengan upaya mensejahterakan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa banmaleng, berdasarkan studi pendahuluan diperoleh fenomena yang cukup menarik untuk diteliti. Dari hasil studi pendahuluan diketahui bahwa ada sebagian komponen masyarakat desa banmaleng yang tidak dapat menikmati hakikat dari

kesejahteraan. Masalah-masalah yang ada pada masyarakat antara lain kekurangan sarana pelayanan umum dan sosial, serta kekurangan sandang, pangan dan papan, kekurangan memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta masalah-masalah lain yang menyangkut masalah pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, perhubungan dan lain sebagainya. Hal tersebut menunjukkan belum meratanya kesejahteraan pada masyarakat di wilayah desa banmaleng. Ada sebagian masyarakat yang sudah mendapatkan kesejahteraan, tetapi apakah kesejahteraan yang didapat merupakan hasil kerja pelaksanaan program yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Desa Banmaleng.

Penyelenggaraan program-program pembangunan kesejahteraan menuntut adanya tanggung jawab bersama. Tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk keterlibatan peranan semua pihak khususnya pemerintah Desa Banmaleng berupa pemberian dukungan serta pengarahannya daya pikir, tenaga dan lain-lain. Upaya ini menuntut kemahiran mobilisasi semaksimal mungkin potensi masyarakat guna meningkatkan harkat dan martabat dari kehidupan masyarakat yang dinamis.

Penanggulangan terhadap masalah kesejahteraan di wilayah desa banmaleng bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat desa banmaleng. Pada kali ini peneliti yang memang menjabat sebagai kaur pemerintah desa banmaleng, ingin mengetahui lebih jauh tentang kemandirian masyarakat dalam menangani masalah-masalah tersebut. Sehingga muncul sebuah judul penelitian yaitu :**“KEMANDIRIAN**

MASYARAKAT DESA BANMALENG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI-NYA TANPA BANTU PEMERINTAH DESA.”

B. Pembatasan Dan Fokus Penelitian

1. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi pada kemandirian masyarakat desa banmaleng dalam meningkatkan kesejahteraan ekonominya masyarakat khususnya di bidang ekonomi dan pendidikan.

2. Fokus Penelitian

Dengan melihat pembatasan masalah di atas, maka fokus penelitian yang penulis angkat adalah :

- 1) Bagaimana Strategi masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dengan usaha rumahan.?
- 2) Apa strategi yang dilakukan masyarakat untuk mengembangkan usaha rumahan agar memenuhi kebutuhan.?
- 3) Apa kontribusi pemerintah desa dalam pengembangan usaha yang dilakukan warganya terhadap produk usaha warganya.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah ang telah dirumuskan sebelumnya.²

²Tim Penyusun IAIN Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (Jember: IAIN Jember Pres, 2017), 45.

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Strategi masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dengan usaha rumahan.?
2. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan masyarakat untuk mengembangkan usaha rumahan agar memenuhi kebutuhan.?
3. Untuk mengetahui kontribusi pemerintah desa dalam pengembangan usaha yang dilakukan warganya terhadap produk usaha warganya.?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan civitas akademika IAIN Jember, Khususnya jurusan pengembangan masyarakat islam.
2. Bagi tempat penelitian, dapat memberikan informasi yang akurat mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di desa banmaleng dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
3. Bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan, penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan penelitian lebih lanjut.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan definisi operasional berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian.

1) Pengertian Pemerintah Desa

Setiap lembaga atau organisasi disadari atau tidak berjalan kearah tertentu. Pernyataan yang luas mengenai arah yang disadari (dikehendaki)

disebut tujuan (goal). Untuk mencapai tujuan diperlukan kekuasaan atau power. Setiap orang yang bertanggung jawab dalam hal penggunaan (*exercising power*) disebut *government*.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia istilah *government* dapat diartikan pemerintah dan dapat pula diartikan pemerintah.³

Istilah pemerintahan berasal dari kata perintah berarti perkataan yang bermaksud menyuruh atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah.

Istilah pemerintah di dalam undang-undang 1945 tercantum di dalam alinea ke empat pembukaan :

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁴

2) Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan kata yang termasuk bahan kajian morfologi. Morfologi ialah bagian dari ilmu yang membicarakan seluk beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Sehingga kata kesejahteraan itu merupakan kata yang telah mendapatkan awalan Ke- dan akhiran -an.

Sedangkan morfem dasar dari kesejahteraan yaitu sejahtera.

³Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka: Jakarta 1988)

⁴ Undang-Undang Dasar 1945 Alinea-4

Dalam membahas pengertian kesejahteraan itu, tentu itu harus diketahui dahulu tentang pengertian sejahtera. Sejahtera menurut W.J.S Poerwadarmita adalah “Aman, sentosa dan makmur (terlepas dari segala yang mengganggu ketentraman dan sebagainya)” sehingga arti kesejahteraan itu meliputi keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup dan sebagainya) dan kemakmuran.⁵

Menurut shihab, kata “sejahtera” dalam kamus besar bahasa indonesia adalah “Aman, sentosa dan makmur, selama (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya.”⁶ Dengan demikian kesejahteraan sosial merupakan keadaan masyarakat yang sejahtera.

3) Pengertian Masyarakat

Masyarakat dalam bahasa inggris disebut society, asal katanya socius yang berarti kawan. Dalam bahasa arab yaitu syirk, artinya bergaul.⁷ Dalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan bahwa masyarakat adalah “sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh satuan kebudayaan yang mereka anggap sama.” Tajul arifin mengemukakan bahwa masyarakat itu adalah “sekelompok manusia yang memiliki kebiasaan, ide dan sikap yang sama, hidup didaerah tertentu, menganggapnya kelompok sosial yang berinteraksi.”⁸

Menurut koentjaraningrat masyarakat adalah “kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang

⁵ W.J.S. Poerwadarmita, *Pengertian Kesejahteraan Manusia*, (Bandung: Mizan 1996), h, 126

⁶ M Quraisy Shihab, *Wawasan Al-qur'an, Tafsir Mandhu'I Atas Pelbagai Persoalan Umum*, (Bandung: Mizan 1996), h. 127

⁷ Munandar Sulaiman, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: PT. Enesco 1993), h. 63

⁸ Tajul Arifin, *Pengantar Study Sosiologi*, (Bandung: Rosda Karya 1995), h. 41

bersifat kontinyu, dan terikat oleh suatu rasa solidaritas bersama.”

⁹Sedangkan menurut para ahli sosiologi dalam bukunya M. Cholil Mansyur

“Sosiologi masyarakat kota dan desa” dijelaskan bahwa masyarakat adalah

- a. Hasan Shadily, masyarakat adalah golongan besar atau kecil dari beberapa manusia, yang dengan sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh satu sama lain.
- b. M.M. Djojodigoe, masyarakat adalah mempunyai arti sempit dan arti luas. Arti sempit: masyarakat adalah yang terdiri dari suatu golongan saja, misalnya masyarakat india, arab dan china. Sedangkan arti luasnya: masyarakat adalah kebulatan dari semua penghubung yang mungkin dalam masyarakat, jadi meliputi semua golongan. Misalnya masyarakat surabaya yang terdiri dari masyarakat hindia, arab, china dan pelajar.
- c. P.J. Bouman, masyarakat adalah pergaulan hidup yang akrab antara manusia, di persatukan dengan cara tertentu oleh hasrat-hasrat kemasyarakatan mereka.
- d. A. Lysen, masyarakat adalah hubungan antara kekuatan-kekuatan dari bentuk-bentuk masyarakat dan kehidupan individu.¹⁰

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.¹¹

⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru 1990), h. 147

¹⁰ M. Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota & Desa*

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press), 2017), 48

Berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini;

Bab 1 Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika pembahasan. Serta akan dijelaskan secara menyeluruh oleh peneliti.

Bab II Kajian Keperpustakaan, dalam bab ini berisi tentang kajian terdahulu dan kajian teori, yang erat kaitannya dengan masalah yang dilakukan peneliti.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis Data, bab ini penyajian data dan analisis yang meliputi gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini peneliti akan mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Dengan melakukan hal ini maka akan tampak sejauh mana orisinilitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan adalah:

Mohammad Karmein Moidady dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Jurusan Ilmu Pemerintahan, dengan judul “Kinerja Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Pelayanan Desa Yang Berkualitas” (Suatu Penelitian Deskriptif Di Desa Selomar-Tari Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006).

Menurut Mohammad Karmein Moidady, “Bahwa pemerintah merupakan pelayanan masyarakat (*Public Servis*) sudah seharusnya memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan yang berkualitas selain bermanfaat bagi masyarakat juga bermanfaat terhadap citra aparat pemerintahan sendiri yang salah satunya yaitu pemerintahan desa. Kualitas aparatur pemerintahan kepada masyarakat merupakan tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktifitas dari sistem kemampuan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan dalam mendorong, menumbuhkan serta

memberikan pengayoman terhadap prakarsa dan pemenuhan kebutuhan pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.

Dalam penelitian karya ilmiah di atas lebih memaparkan tentang kualitas aparatur pemerintahan. Berbeda dengan peneliti yang penulis lakukan ini lebih memaparkan bagaimana kemandirian masyarakat desa banmaleng dalam meningkatkan kesejahteraan ekonominya tanpa bantu pemerintah desa terutama dibidang ekonomi dan sosial.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Pemerintah Desa

Setiap lembaga atau organisasi disadari atau tidak berjalan kearah tertentu. Pernyataan yang luas mengenai arah yang disadari (dikehendaki) disebut tujuan (goal). Untuk mencapai tujuan diperlukan kekuasaan atau power. Setiap orang yang bertanggung jawab dalam hal penggunaan (exerasing power) disebut goverment.

Dalam kamus besar bahasa indonesia istilah goverment dapat diartikan pemerintah dan dapat pula diartikan pemerintah.

Istilah pemerintahan berasal dari kata perintah berarti perkataan yang bermaksud menyuruh atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah.

Istilah pemerintah di dalam undang-undang 1945 tercantum di dalam alenia ke empat pembukaan :

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan pernyataan tersebut dapat diambil dua pengertian; (1) Pemerintah dan (2) Yang diperintah. Pemerintah dalam hal ini adalah segenap alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional.

Istilah pemerintah mempunyai arti yang bersifat relatif, istilah pemerintah negara indonesia dapat diartikan pemerintah dalam arti terluas, sedangkan pemerintah itu sendiri adalah pemerintah dalam arti sempit. Selain dari itu ada pengertian pemerintah dalam konteks lainnya, yakni yang dimaksud pemerintah daerah, yaitu kepala daerah dan DPRD. Jadi dalam arti luas, DPRD atau lembaga legislatif juga disebut unsur pemerintah.

Untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas, pemerintah menata dirinya secara horizontal dan secara vertikal dan penataan tersebut dilakukan dengan jalan fungsionalisasi dan departementalisasi.

Berbeda dengan skema jaman orde baru, skema pemerintah desa di jaman otonomi lebih di tandai oleh suatu skema yang pling otonom, dimana desa tidak menjadi bawahan langsung kecamatan sebagaimana dalam UU No. 22 Tahun 1999 pemerintah desa akan terdiri dari :

- Desa, yakni kepala desa dan perangkatnya.
- Badan perwakilan yang merupakan parlemen ditingkat desa.

Adapun yang paling penting dari skema perubahan ini adalah terjadinya pemisah fungsi legislatif dan eksekutif, sehingga pemerintah desa dapat dikontrol dan diawasi oleh Badan Perwakilan Desa (BPD).¹²

Dalam penelitian ini penulis menitik beratkan pada pemerintah desa, karena pemerintah desa merupakan persekutuan terkecil, pemerintah desa memiliki otonom yang bersifat tradisional. Beberapa undang-undang tentang pemerintah daerah tidak menyebutkan secara luas definisi otonom pemerintahan desa, namun dapat disusun definisi mengenai otonom desa yaitu sebagai berikut:

Otonom pemerintah desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang muncul bersamaan dengan terbentuknya persekutuan masyarakat hukum yang lebih luas dan tinggi tingkatannya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan kesatuan masyarakat hukum yang bersangkutan.¹³

Berkembangnya tuntutan reformasi dan aspirasi menjelang S1 (Sidang Istimewa) tahun 1999, maka agenda sidang S1 bukan saja membahas perubahan jadwal pemilihan umum tetapi juga membahas tentang perlu adanya ketetapan-ketetapan MPR baru untuk menampung dan menyalurkan aspirasi tersebut termasuk diantaranya ketetapan baru tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Ketentuan ini memberi arti

¹² *Majalah Parlemen*, Edisi 32, November 2015

¹³ Sedu Warsistiono, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, (Bandung: CV. Puskomedia 2003), h. 59

bahwa undang-undang yang ada yang mengatur otonomi daerah dan pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah, yaitu undang-undang Nomor 5 tahun 1974 sudah tidak memadai lagi dan sudah diganti.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dinyatakan, pemerintah desa adalah sistem menjalankan dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya, atau sekelompok orang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan.¹⁴ Sedangkan pengertian desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah kelompok yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.¹⁵

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan di atas, maka peneliti mendefinisikan pengertian pemerintah desa itu sebagai sistem yang mengatur jalannya kehidupan ekonomi, sosial dan politik dan budaya masyarakat yang berbeda dibawah camat untuk tujuan yang diinginkan berdasarkan undang-undang dasar 1945 dan pancasila.

Adapun menurut beberapa pendapat, pengertian pemerintah desa dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Menurut unang suparjo dalam bukunya pemerintah desa dan kelurahan menyatakan:

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat atau hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya. Memiliki ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat baik

¹⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1995), h. 756

¹⁵ *Ibid*, h. 226

karena keturunan maupun kepentingan politik, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama memiliki kebudayaan alam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.¹⁶

- b. Berdasarkan undang-undang tentang pemerintah daerah dari Negara kesatuan RI yaitu undang-undang No. 22/1999 pasal 1, kalimat pertama memberikan rumusan sebagai berikut:

Desa adalah wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara kesatuan RI.¹⁷

Dari perumusan di atas, bahwa Desa adalah suatu wilayah, akan tetapi semua wilayah tidak semua disebut Desa. Dengan kata lain ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar wilayah menjadi Desa. Jadi suatu wilayah tersebut harus diduduki atau ditempati oleh sejumlah penduduk. Wilayah yang tidak ada penduduknya tidak dapat disebut Desa. Penduduk itu tidak sekedar bertempat tinggal di daerah dan tidak asal penduduk saja, akan tetapi harus merupakan suatu kesatuan dalam masyarakat. Tidak semua kesatuan dalam masyarakat dapat dipandang sebagai unsur penentu wilayah pemerintah yang terendah yang berada langsung di bawah

¹⁶ Unang Suparjo, *Pemerintah Desa dan Kelurahan*, tahun 1981, h. 11

¹⁷ Bayu Surianingrat, *Pamong Praja dan Kepala Wilayah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 10

Camat. Organisasi pemerintah yakni yang menjadi wilayah Desa harus merupakan wilayah Kecamatan. Dengan kata lain wilayah Kecamatan terdiri dari beberapa bagian, wilayah Desa harus ditentukan besarnya. Batasan Desa pada umumnya berupa batasan alam, misalnya kali, sungai, pegunungan, pesawahan, atau berupa jalanan.

Berdasarkan undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah Desa menjelaskan bahwa pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Dalam mencapai tujuan pembangunan Desa yang berhasil dengan baik. Terutama dalam kesejahteraan masyarakat, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh aparat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, kepala-kepala dusun, RT, RW dan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatannya dengan para ulama dan tokoh masyarakat. Menurut analisis penulis, pemerintah itu dapat diartikan suatu kerja sama diantara beberapa orang untuk mencapai tujuan dengan mengadakan pembagian dan peraturan kerja. Dan yang menjadi ikatan kerja sama dalam organisasi adalah tercapainya tujuan secara efektif dan efisien.

Bila disimpulkan, maka pemerintah Desa adalah suatu badan dalam organisasi Desa yang memiliki fungsi dan tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan dengan dilengkapi oleh sistem administrasi dan manajemen yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta menggerakkan masyarakat Desa untuk

dapat berpartisipasi semaksimal mungkin untuk membangun warganya, maupun membangun Bangsa dan Negara.

Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan pemerintah Desa, sebagaimana yang tertuang dalam keputusan Menteri Dalam Negeri NO. 64 tahun 1999 tentang pedoman umum pengaturan mengenai Desa, adalah “Kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa”. Dalam pelaksanaan tugasnya pemerintah Desa dibantu oleh perangkat Desa, sedangkan Badan Perwakilan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang pedoman Umum Pengaturan Keputusan Mengenai Desa).

Maka dapat dikatakan lebih lanjut, bahwa yang dimaksud dengan pemerintah Desa adalah “Satuan Organisasi Terendah Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan asas dekonsentrasi ditempatkan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah Kecamatan yang bersangkutan”.¹⁸ Sedangkan personal satuan organisasi yang disebut pemerintah Desa kecuali Kelurahan

¹⁸ Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara 1991), h.24

disebut perangkat negara dan bukan perangkat atau pegawai negeri, karena berbagai pertimbangan antara lain:

- a. Konsisten dengan pengertian Desa satuan kenegaraan
- b. Perangkat tersebut, kendatipun pada umumnya dipilih dan dari kalangan masyarakat Desa setempat, namun yang mengangkatnya adalah pejabat Negara, bukan kepada masyarakat yang dipimpinnya.
- c. Tidak disebut sebagai perangkat atau pegawai negeri bila diatur dengan peraturan perundang-undangan tertentu, yang tidak berlaku bagi perangkat pemerintah Desa otonom.

2. Tugas, Fungsi dan Kewajiban Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah sebagai penyelenggara pemerintah dan penggerak pembangunan maupun pembinaan terhadap masyarakat di lingkungan suatu Desa. Pemerintah Desa sebagai abdi bangsa dan negara, aparat pemerintah dan penuh pengabdian diri terhadap Negara dan masyarakat. Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Sehari-Hari Kepala Desa dijelaskan sebagai berikut:

Undang-undang No. 22 tahun 1999 menegaskan tentang tugas, hak dan wewenang Kepala Desa dalam menjalankan pemerintah Desa yakni: menyelenggarakan rumah tangga Desanya sendiri sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa dan urusan umum termasuk pembinaan keterampilan dan ketertiban serta menumbuhkan dan mengembangkan jiwa dan

semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintah Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Memperhatikan isi pasal tersebut maka kewajiban, hak dan wewenang Kepala Desa dapat dibagi dua, yaitu:

a. Kewajiban, hak dan wewenang yang berkenaan dengan penyelenggaraan rumah tangga Desa. Kepala Desa menjalankan kewajiban, hak dan wewenang sebagai pemimpin pemerintah Desa, yaitu menyelenggarakan urusan rumah tangga Desanya sendiri meliputi:

1. Bidang pemerintahan
2. Bidang agraria
3. Bidang ekonomi
4. Bidang Sosial budaya
5. Bidang pembangunan
6. Bidang administrasi
7. Bidang keamanan dan ketertiban

Sebagai alat pemerintahan Desa, Kepala Desa menyelenggarakan pemerintahan umum, menyelenggarakan pengurus Desa serta pembinaan masyarakat Desa. Mengenai pemerintahan umum, Kepala Desa bertanggung jawab kepada yang berwenang mengenai urusan rumah tangga. Kepala Desa berhubungan dengan urusan pemerintahannya,

¹⁹ Dep. Dalam Negeri RI, *Rencana Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa*, (Jakarta: Penebar Swadaya 1996), h.2

misalnya dalam hal pengesahan anggaran penerimaan dan penanggung jawab utama bidang pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan keagamaan, keamanan dan ketertiban.

b. Kewajiban, hak dan wewenang yang berkenaan dengan tugas pembantu dari pemerintah di atas Desa. Tugas-tugas pembantu yang menjadi kewajiban Kepala Desa meliputi:

- 1) Membina kesadaran masyarakat terhadap ideologi Negara Pancasila dan UUD 45, kesadaran terhadap pentingnya pembangunan.
- 2) Membina persatuan, kesatuan dan kerukunan warga Desanya.
- 3) Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan pemerintah Desa yang menyangkut kegiatan dari BIMAS POLRI, BABINSA dan petugas instansi lain di Desanya.
- 4) Membantu menyelesaikan penarikan PBB sampai lunas.²⁰

Pemerintah Desa yaitu sebagai penyelenggara pemerintah dan penggerak pembangunan juga berkewajiban membina terhadap masyarakat di lingkungan Desanya. Dalam buku Psikologi Dakwah yang ditulis oleh H.M. Arifin, dalam sebuah hadits menyatakan sebagai berikut:

Masing-masing kamu adalah pengembala dan masing-masing kamu bertanggung jawab terhadap yang digembalanya,

²⁰*Ibid*, h.10

maka pemimpin adalah pengembala dan bertanggung jawab atas yang digembalanya, seorang laki-laki adalah pengembala atas keluarganya, perempuan adalah pengembala/penjaga di dalam rumah suaminya dan dia harus bertanggung jawab terhadap tugas dan penjagaannya, dan pembantu rumah tangga adalah pengembala/penjaga harta milik tuannya dan dia harus bertanggung jawab terhadap tugasnya, dan laki-laki itu penjaga harta milik ayahnya dan dia harus bertanggung jawab terhadap tugasnya. Maka masing-masing akan dimintai pertanggung jawaban atas tugas pengembalaannya/penjagaannya itu.²¹

Harta kekayaan masyarakat merupakan amanat yang dipertanggung jawabkan ke atas pundak pemimpinnya (Pemerintah)

Baginya wajib menempatkan itu pada tempat yang semestinya dan harus kembali untuk kepentingan masyarakat sepenuhnya, demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga seorang Kepala Desa dituntut untuk mengarahkan masyarakatnya ke tingkat kehidupan yang lebih maju. Dan semua rencana hendaknya menunjang kepentingan umum, mendirikan proyek-proyek yang mampu memberikan rangsangan terhadap kemajuan masyarakat dalam segi spiritual maupun material.

Dalam buku Himpunan Peraturan Pemerintah Desa (PERDES) jilid I dijelaskan tentang intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24

²¹ H.M. Arifin, *Psikologi Dakwah Suatu Pengantar Study*, (Jakarta: Bumi Aksara 1994), h.81

tahun 1989 tentang penilaian pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintah Desa yaitu : (a) Bahwa Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama bidang penyelenggaraan urusan pemerintah Desa, pemerintah umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. (b) Bahkan Kepala Desa mempunyai tugas membantu masyarakat dalam menumbuhkan semangat membangun yang dijiwai oleh azas usaha bersama dan kekeluargaan. (c) Mempunyai tugas mengayomi masyarakat, menggerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam membangun serta mampu menyelenggarakan fungsi pemerintah secara efisien dan efektif, diperlukan adanya penilaian pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintah Desa. (d) Bahwa berhubungan dengan itu, dipandang perlu untuk menetapkan daftar isian penilaian pelaksanaan tugas Kepala Desa, dengan intruksi Menteri Dalam Negeri.²²

Dari uraian di atas dapat dijelaskan tentang tugas dan kewajiban pemerintah Desa yaitu:

- a. Membina ketentraman dan kewajiban di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- b. Melaksanakan segala urusan dan kegiatan di bidang penghayatan dan pengamalan pancasila, pembinaan politik

²² Biro Bina Pemerintahan Desa Tahun 1990, h.177

dalam negeri dan pembinaan kesatuan bangsa sesuai dengan garis kebijaksanaan pemerintah.

- c. Memimpin pemerintah Desa dan melaksanakan segala tugas yang dibebankan oleh pemerintah yang lebih luas.
- d. Menyelenggarakan koordinasi terhadap segala usaha kegiatan masyarakat, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mencapai daya guna hasil guna yang sebesar-besarnya.
- e. Membimbing dan mengawasi segala usaha dan kegiatan masyarakat dan atau organisasi-organisasi serta lembaga-lembaga kemasyarakatan.
- f. Mengusahakan terus menerus supaya semua peraturan yang dikeluarkan pemerintah ditaati oleh penduduk Desanya.

Adapun kegunaan dalam perincian tugas Kepala Desa tersebut agar Kepala Desa dapat mengelompokkan pekerjaan-pekerjaannya dan dapat mempertanggung jawabkan semua kewajiban, diantara kegunaannya yaitu:

1. Sebagai penegasannya dan penjelasannya dari pekerjaan yang diberikan Kepala Desa dari pemerintah yang lebih luas.
2. Sebagai pedoman kerja bagi petugas yang bersangkutan.
3. Sebagai alat ukur untuk menilai, apakah pekerjaan itu sudah dilaksanakan atau belum.
4. Sebagai pengawasan bagi pihak yang lebih tinggi.

5. Sebagai alat pendorong bagi seseorang, bila melihat daftar pekerjaannya, bahwa ia diperhatikan dan diberi pekerjaan yang tetap.
6. Sebagai suatu pola pekerjaan guna diperhatikan oleh setiap pihak, supaya jangan timbul kesimpangsiuran pekerjaan dan kekaburan batas-batas wewenang dan tanggung jawab.

Tugas Kepala Desa sangatlah luas dan kongkrit, beliau benar-benar seorang pemimpin. Ia langsung melayani kebutuhan penduduknya dan membantu terselenggaranya tugas-tugas pemerintah negara di dalam wilayah Desanya.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa, akan lebih sukses jika pelaksanaan tidak hanya didasarkan kepada peraturan-peraturan belaka, akan tetapi harus ditujukan dengan dasar hubungan pribadi, hubungan bathin antara pemimpin dan yang dipimpin. Seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk memberi contoh pada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mentaati pemimpin secara sukarela, disertai kesadaran tanpa paksaan. Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya benar-benar menjadi akar yang efektif dan efisien juga berwibawa. Sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas umum yang bersih, maupun untuk menegaskan kebijaksanaan pembangunan secara lancar, dengan dilandasi oleh semangat dan sikap pengabdian terhadap masyarakat, bangsa serta agama.

Dalam pelaksanaannya tugas pemerintah Desa dibantu oleh perangkat Desa dan tokoh masyarakat. Kepala Desa sebagai orang yang pertama mengemban kewajiban dan tugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

3. Pemerintah Desa sebagai Pemimpin Masyarakat

Dalam negara Indonesia yang sedang membangun disegala bidang, faktor pemimpin dan kepemimpinan semakin sering dipermasalahkan, karena baik pemerintah maupun masyarakat semakin menyadari bahwa suatu tujuan dalam skala nasional, regional atau lokal bergantung pada kepemimpinan seseorang yang memimpin suatu instansi, jawatan, perusahaan, lembaga dan lain sebagainya.

Hamzah Ya'qub dalam bukunya *Publisistik Islam* menyatakan sebagai berikut:

Kepemimpinan adalah keseluruhan tindakan untuk mempengaruhi atau mengajak orang lain dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan adalah proses pembinaan jalan yang mudah (fasilitas) dari pekerjaan-pekerjaan orang-orang yang terorganisir guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Atau dengan simpel dapat dikemukakan, kepemimpinan adalah usaha untuk mencapai tujuan dengan menggunakan tenaga orang lain.²³

²³ Hamzah Ya'qub, *Publistik Islam*, 1992, h.115

Dalam kehidupan manusia, terdapat kelompok manusia jama'ah atau umat yang hidup bersama (hidup bermasyarakat) disana diperlukan adanya suatu kepemimpinan dan kepengurusan yang berfungsi mengurus dan mengatur kehidupan perubahan antara manusia sehingga mutlak perlunya kepemimpinan dan kepengurusan tentulah dibutuhkan adanya manusia pengurus dan pemimpin yang diandalkan, Allah SWT menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 73 sebagai berikut:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ
 الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

Artinya: Kami Telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan Telah kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan Hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah (Al-Anbiya ayat: 73).

Pemerintah Desa adalah pemimpin masyarakat terdekat, mempunyai hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintah Desa, yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggaraan dan penanggung jawab utama di bidang pemerintah. Pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah Desa, urusan pemerintah umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintah Desa.

Pemerintah Desa sebagai unsur pemimpin pemerintah yang terendah yaitu Desa, merupakan pos terdepan yang langsung berhubungan dengan masyarakat sebagai ujung tombak dan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan secara nasional. Untuk itu seorang pemerintah Desa harus memiliki kualitas kepemimpinan pancasila, yang secara formal dan mempunyai prinsip utama dalam kepemimpinan pancasila yang harus dihayati dan dijalankan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pemimpin (pemerintah) dengan orang yang dipimpin (rakyat) merupakan satu kesatuan. Adanya rakyat menjadikan munculnya pemimpin disebabkan adanya rakyat sebagai orang yang dipimpin, keberadaan keduanya disebabkan laksana imam dan makmum dalam shalat, hanya saja jadi pemimpin atau imam, jauh lebih sulit dibandingkan menjadi rakyat/makmum sebab diperlukan kemampuan dan syarat-syarat tertentu. Seorang pemimpin dituntut untuk selalu berusaha menegakan aqidah dan syariah agama untuk dirinya sendiri, keluarga dan bagi masyarakat lingkungannya. Selain itu seorang pemimpin harus mampu mempertahankan nilai-nilai agama secara baik dan benar. Ia harus sanggup pula menjadi suri tauladan dan uswatun hasanah, artinya seorang pemimpin tidak hanya mampu berbicara, tetapi mampu berbuat baik dan benar sesuai dengan ajaran agama. Hal ini yang diwariskan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya.

Sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan masyarakat yang sedang membangun, maka secara operasional ketiga prinsip kepemimpinan pancasila itu dapat dikatakan sebagai berikut:

- a. Kepemimpinan harus mampu menjadi pola panutan masyarakat.
- b. Kepemimpinan harus berakar pada masyarakat.
- c. Kepemimpinan harus mampu mendorong usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat Desa.

Ketajaman sosial diperlukan oleh seorang pemerintah agar mampu menghadapi gejala-gejala sosial yang timbul dikalangan masyarakat, serta peka terhadap setiap permasalahan yang timbul dalam masyarakat serta berupaya mencari jalan pemecahannya.

Kemampuan berfikir secara abstrak serta diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengkaji gejala-gejala sosial yang timbul dikalangan masyarakat untuk selanjutnya dimanfaatkan bagi suksesnya misi kepemimpinannya.

Keseimbangan emosi diperlukan oleh pemerintah, karena tanpa adanya keseimbangan emosi, maka sulit bagi Kepala Desa untuk berperan selaku tokoh yang menjadi panutan rakyat

Sebagai pola panutan rakyat, pemerintah Desa harus memiliki jiwa pelopor. Sebagai pelopor ia tidak boleh tinggal diam, tetapi ia harus selaluberfikir, berkreasi serta berinisiatif di dalam mengidentifikasi berbagai kemungkinan dan alternatif terbaik yang dapat diputuskan untuk ditetapkan bagi kepentingan masyarakat.

Sebagai pemimpin, pemerintah Desa harus benar-benar mendapatkan pengakuan, kepercayaan dan kecintaan dari rakyatnya. Ia harus dapat berperan selaku tempat pengayoman rakyat yang mendapatkan suasana tenang, tentram dan kesejukan, penuh dedikasi, bersifat adil, penuh daya tarik dan percaya pada diri sendiri.

Dalam upayanya mempertahankan dan mengembangkan hidupnya, individu-individu ini tidak dapat hidup sendiri dan terpisah. Sebagai makhluk sosial mereka ditakdirkan untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat. Kelebihan dan kekurangan masing-masing mengharuskan manusia untuk saling mengisi dan saling membantu. Semakin kompleks suatu susunan hidup suatu kelompok atau semakin kompleks suatu susunan masyarakat, makin banyak masalah yang timbul untuk dipecahkan bersama dan semakin diperlukan lagi kerja sama antara anggotanya untuk dapat memenuhi syarat-syarat hidup dalam masyarakat dan walaupun ada sekelompok individu dalam suatu masyarakat, maka tampaklah bermacam-macam gejala yaitu ada individu yang ingin menguasai individu lainnya dengan kemampuan yang dimilikinya. Adapula individu yang menyerahkan dirinya untuk menimbulkan kepemimpinan secara wajar. Untuk dapat mempengaruhi sesama individu dalam suatu kelompok dan dapat menggerakkan kepemimpinannya ke arah yang dicita-citakan maka

seorang pemimpin harus mempunyai kelebihan yang diterima oleh kelompoknya sebagai orang yang mempunyai suatu kelebihan.

Kelebihan yang dimiliki seorang pemimpin tidak boleh membawa kepada sikap merasa lebih atau ingin lebih berkuasa terhadap kelompoknya. Kelebihan pemimpin tidak boleh dijadikan alat untuk mendominasi. Seorang pemimpin tidak boleh merasa bahwa dialah sumber keberhasilan dan kelompoknya tidak akan mencapai tujuan tanpa dirinya. Jika terjadi pemimpin seperti itu, maka akan meremehkan kemampuan dan kesanggupan anggota dan pada akhirnya akan menghambat seluruh kelompok untuk mencapai tujuan.

Lebih dari itu, seorang pemimpin pada hakikatnya adalah pelayan bagi orang yang dipimpinnya. Artinya, seorang pemimpin harus mampu melaksanakan tugas, memenuhi aspirasi dan kebutuhan orang yang dipimpinnya. Jadi, orang yang dipimpin (masyarakat) demikian juga dapat dikatakan bahwa orang yang dipimpin adalah pelayan bagi sang pemimpin. Artinya rakyat harus membantu dan mencukupi kebutuhan pemimpin, jadi pemimpin adalah seseorang yang minta dilayani, juga pemimpin dan rakyat adalah pelayanan yang sama-sama melayani.

Setiap orang yang diangkat menjadi pemimpin didasarkan atas kelebihan-kelebihan yang dimilikinya daripada orang yang dipimpin. Setiap orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan di

samping kekurangan-kekurangannya. Dalam keadaan tertentu dan pada waktu tertentu pula kelebihan itu dapat digunakan untuk bertindak sebagai pemimpin. Untuk menjadi pemimpin diperlukan adanya syarat-syarat serta sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah berbeda-beda menurut golongan dan fungsi jabatan yang dipegangnya. Misalnya, untuk menjadi pemimpin Negara tidak mungkin sama dengan syarat yang diperlukan pemimpin perusahaan.

4. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan kata yang termasuk bahan kajian morfologi. Morfologi ialah bagian dari ilmu yang membicarakan seluk beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Sehingga kata kesejahteraan itu merupakan kata yang telah mendapatkan awalan ke- dan akhiran -an. Sedangkan morfem dasar dari kesejahteraan yaitu sejahtera.

Dalam membahas pengertian kesejahteraan itu, tentu harus diketahui dahulu tentang pengertian sejahtera. Sejahtera menurut W.J.S. Poerwadarmita adalah “Aman, sentosa dan makmur (terlepas dari segala yang mengganggu ketentraman dan sebagainya)”. Sehingga arti kesejahteraan itu meliputi keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup dan sebagainya) dan kemakmuran.

Menurut Shihab, kata “sejahtera” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Aman, sentosa dan makmur, selama (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya”. Dengan demikian kesejahteraan sosial merupakan keadaan masyarakat yang sejahtera.

Shihab juga menambahkan bahwa dalam keadaan empiris sekarang ini sejahtera adalah yang terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, dahaga, penyakit, kebodohan, masa depan diri, keluarga, bahkan lingkungan.²⁴

Menurut Isbandi, kesejahteraan sosial dalam arti yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Taraf hidup yang baik ini bukan hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan spiritual.²⁵

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, bahwa kesejahteraan itu adalah terpenuhinya kebutuhan pokok lahir dan bathin, yang meliputi dari segi sandang, pangan dan papan, juga dari segi rohani, terpenuhinya pendidikan, mempunyai keterampilan yang berdasarkan atas ketaqwaan juga sekaligus pengalaman dari agama yang memotivasi untuk berprestasi.

Pengertian kesejahteraan sosial menurut UU No. 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

²⁴ *Ibid*, h.128

²⁵ Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Fak. Ekonomi UI 2002), h.40

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan kehidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemecahan kebutuhan jasmaniah, rohanian dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat dan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan falsafah negara Indonesia yaitu pancasila.²⁶

A. Klarifikasi Kesejahteraan

Dalam usaha untuk mendiskripsikan tingkatan kesejahteraan itu, tidak bisa dilepaskan dari penggolongan keluarga sejahtera. Sehingga keluarga sejahtera perlu dikembangkan menjadi wahana pembangunan anggotanya yang utama dan pertama. Untuk mendapatkan gambaran tentang klasifikasi kesejahteraan perlu diketahui tingkatan keluarga sejahtera. Dalam buku modul keluarga sejahtera diuraikan :

- a. Keluarga pra sejahtera, yaitu keluarga itu belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya.
- b. Keluarga sejahtera I, yaitu keluarga yang sudah dapat dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar.

²⁶ Undang-Undang No. 6 Tahun 1974

- c. Keluarga sejahtera II, yaitu keluarga yang selain dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, dapat pula kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembannya.
- d. Keluarga sejahtera III, yaitu keluarga yang selain dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan pengembannya, tetapi belum aktif menyumbang dan belum giat dalam usaha kemasyarakatan dalam lingkungan Desa atau wilayahnya.
- e. Keluarga sejahtera III plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan sosial psikologis, kebutuhan pengembangan, dan sekaligus secara teratur ikut menyumbang dalam kegiatan sosial dan aktif pula mengikuti gerakan semacam itu.

Dalam tingkatan masing-masing terdapat indikator yang dijadikan tolak ukur kesejahteraan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Keluarga Pra Sejahtera

Indikator yang dipergunakan adalah keluarga tersebut tidak dapat atau belum dapat memenuhi syarat sebagai keluarga sejahtera

- b. Keluarga Sejahtera I

- 1) Pada umumnya keluarga tersebut makan dua kali sehari atau lebih
- 2) Seluruh keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah, dan bepergian.

- 3) Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah
- 4) Bila anak sakit dibawa ke sarana/petugas atau diberi pengobatan modern

c. Keluarga Sejahtera II

- 1) Paling kurang sedikit seminggu keluarga mendapatkan daging/telur sebagai lauk pauk
- 2) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru setahun terakhir
- 3) Luas lantai paling kurang 8 m² untuk tiap penghuni rumah
- 4) Seluruh anak berusia 6-12 tahun bersekolah
- 5) Seluruh anggota keluarga berumur di bawah umur 60 tahun, bisa membaca tulisan latin.
- 6) Paling kurang satu anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai pekerjaan tetap
- 7) Seluruh anggota-anggota dalam satu bulan terakhir dalam keadaan sehat, sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing
- 8) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianutnya masing-masing

d. Keluarga Sejahtera III

- 1) Memiliki anak paling banyak 2 orang, atau lebih dari dua orang.

- 2) Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga
- 3) Keluarga makan bersama paling kurang sekali dalam seminggu
- 4) Keluarga biasanya ikut serta dalam kegiatan masyarakat dalam lingkungan tempat tinggal.
- 5) Keluarga mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang sekali dalam tiga bulan.
- 6) Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar/radio/majalah.
- 7) Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat.
- 8) Upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahuan agama.

e. Keluarga Sejahtera III Plus

- 1) Keluarga atau anggota keluarga secara teratur memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.
- 2) Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan atau instansi masyarakat lainnya (Kantor Menteri Negara Kependudukan/Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Jakarta).

Berdasarkan penjelasan diatas, tingkatan kesejahteraan itu mempunyai lima kategori dalam susunan keluarga. Dengan rincian, pra sejahtera, sejahtera I, sejahtera II, sejahtera III, sejahtera III Plus.

B. Kesejahteraan Menurut Islam

Dalam bentuk kesejahteraan perspektif Islam, tentu dalam hal ini tidak bisa dilepaskan tolak ukur pedoman umat Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Al-Qur'an secara tegas sekali menyatakan, bahwa kebahagiaan itu tergantung kepada ada atau tidak adanya hubungan manusia dengan Tuhan dan dengan sesama manusia sendiri.²⁷ Bahwa Islam tidak menerima untuk memisahkan agama dari bidang kehidupan sosial, maka Islam telah menetapkan suatu metode lengkap yang mencakup garis-garis yang harus dipatuhi oleh tingkah laku manusia terhadap dirinya sendiri atau kelompok. Dalam hal ini Masdar Helmy menyatakan bahwa tanggung jawab dan melakukan pembangunan yang seimbang adalah sesuai dengan ajaran Islam, yaitu harus ada keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi.²⁸

Dalam melaksanakan hukum syariah itu, manusia yang sebagai khalifah mempunyai tugas dua macam yaitu:

- a. Mewujudkan kemakmuran di bumi
- b. Mewujudkan kebahagiaan hidup. Bahwa tujuan utama syariah ialah “Untuk membangun kehidupan atas ma’rifat (kebijakan-

²⁷ Syahminan Zaini, Ananta Kusuma Seta, *Wawasan Al-qur'an Tentang Pembangunan Manusia Seutuhnya*, (Jakarta: Kalam Mulia 1986), h.94

²⁸ Masdar Helmy, *Dakwah Dalam Alam Pembangunan*, (Semarang: Toha Putra), h.22

kebijakan atau deugden) dan membersihkan diri munkarat (kemungkaran-kemungkaran ondeugden)".²⁹

Syahminan Zaini dan Ananto Kusuma Seta menjelaskan, bahwa suksesnya tugas kekhalifahan itu minimal tujuh syarat harus dipenuhi oleh manusia, yaitu:

1. Badan kuat
2. Terampil
3. Pandai berhubungan dengan Allah (dalam bentuk ibadah).
Dengan manusia (dalam bentuk penelitian, pengolahan dan pemanfaatannya).
4. Beriman dan beramal saleh
5. Berilmu pengetahuan yang banyak dalam segala bidang kehidupan manusia.
6. Bersungguh-sungguh dengan sebenar-benarnya kesungguhan melaksanakan semua itu.
7. Berdisiplin tinggi.³⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, kesejahteraan berdasarkan pandangan Islam itu adalah dengan melaksanakan pembangunan jasmani dan rohani. Pembangunan jasmani meliputi: 1) Pembangunan kekuatan jasmani, 2) Pembangunan kesehatan jasmani, 3) Pembangunan keterampilan jasmani, 4) Pembangunan keindahan jasmani. Pembangunan rohani, yaitu 1)

²⁹*Ibid*, h.11

³⁰Syahminan Zaini, Ananta Kusuma Seta, *Wawasan Al-qur'an Tentang Pembangunan Manusia Seutuhnya*, (Jakarta: Kalam Mulia 1986), h.12

- Pembangunan martabat manusia, 2) Pembangunan fitrah manusia, 3) Sifat-sifat manusia, dan 4) Tanggung jawab manusia.

5. Pengertian Masyarakat

Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut Society, asal katanya socius yang berarti kawan. Dalam bahasa Arab yaitu syirk, artinya bergaul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa masyarakat adalah “Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh satuan kebudayaan yang mereka anggap sama”. Tajul Arifin mengemukakan bahwa masyarakat itu adalah “Sekelompok manusia yang memiliki kebiasaan, ide dan sikap yang sama, hidup di daerah tertentu, menganggapnya sebagai kelompok sosial yang berinteraksi.

Menurut Koentjaraningrat masyarakat adalah “Kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan terikat oleh suatu rasa solidaritas bersama”. Sedangkan menurut para ahli sosiologi dalam bukunya M. Cholil Mansyur “Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa”, dijelaskan bahwa masyarakat adalah :

- a. Hasan Shadily, masyarakat adalah golongan besar atau kecil dari beberapa manusia, yang dengan sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh satu sama lain.
- b. M.M. Djodjodigoen, masyarakat adalah mempunyai arti sempit dan arti luas. Arti sempit: Masyarakat adalah yang terdiri dari suatu

golongan saja, misalnya masyarakat India, Arab dan Cina. Sedangkan arti luasnya : Masyarakat adalah kebulatan dari semua penghubung yang mungkin dalam masyarakat, jadi meliputi semua golongan. Misalnya masyarakat Surabaya yang terdiri dari masyarakat Hindia, Arab, Cina dan Pelajar.

- c. P.J. Bouman, masyarakat adalah pergaulan hidup yang akrab antara manusia, di persatukan dengan cara tertentu oleh hasrat-hasrat kemasyarakatan mereka.
- d. A. Lysen, masyarakat adalah hubungan antara kekuatan-kekuatan dari bentuk-bentuk masyarakat dan kehidupan individu.

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat ialah kumpulan manusia yang bersatu dengan cara tertentu, disebabkan adanya hasrat-hasrat kemasyarakatan yang sama. Adapun yang menjadi syarat-syarat timbulnya masyarakat ialah:

- a. Harus ada sekumpulan manusia yang banyak
- b. Telah bertempat tinggal di suatu daerah tertentu dalam waktu yang lama.
- c. Adanya aturan-aturan yang mengatur untuk kepentingan bersama.

Masyarakat merupakan satu kesatuan manusia yang tidak bisa dipisahkan dan saling membutuhkan. Manusia sering disebut sebagai makhluk sosial, makhluk ekonomi aktualisasi diri dan makhluk yang berbicara atau makhluk yang berfikir. Sebagai makhluk

sosial, manusia adalah masyarakat yang senang berkumpul dan berkelompok satu sama lainnya saling membutuhkan.

Sebagai makhluk ekonomi, manusia bertujuan mencari kenikmatan sebesar-besarnya dan menjauhi ketidaknyamanan sebisa mungkin. Sebagai makhluk aktualisasi diri, manusia senantiasa berusaha untuk mengaktualisasikan dirinya dengan keadaan agar tidak ketinggalan sekaligus sebagai makhluk yang progres yang selalu berubah-ubah dan berkembang untuk mencari tujuan. Sebagai makhluk yang berbicara, manusia adalah makhluk yang berakal yang mempergunakan akal pikiran dalam ucapan dan perbuatan.

Menurut Soejono Soekanto, manusia merupakan makhluk yang mempunyai aneka ragam sebutan, pada prinsipnya adalah makhluk yang saling bergantung pada sesamanya, baik yang menyangkut sandang, pangan, papan, keselamatan diri dan harta, harta diri, potensi untuk berkembang maupun kasih sayang.³¹

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Sehingga manusia akan membentuk satu kesatuan yaitu masyarakat.

Dalam pengertian sosiologi, masyarakat tidak hanya dipandang sebagai kumpulan individu secara fisik atau pejumlahan manusia secara statistik belaka, melainkan harus

³¹Soerjoeno Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi ke-4* (Jakarta: Grafindo Persada 1990),

dipandang sebagai suatu pergaulan hidup manusia mengikuti pola tata hubungan yang berlaku umum. Manusia merupakan makhluk yang penuh dengan keterbatasan sehingga tak mampu mengisolasi diri secara keseluruhan, maka tak ada pilihan lain mempertahankan kelangsungan hidupnya kecuali harus berhubungan, kerja sama dan mengorganisir kepentingan dengan manusia yang lain dalam satu kelompok masyarakat. Dengan perkataan lain masyarakat merupakan suatu sistem kemasyarakatan.

Selain itu juga masyarakat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Manusia yang hidup bersama.
- b. Bergaul dalam jangka waktu yang relatif lama.
- c. Mengikuti pola tata hubungan yang berlaku umum
- d. Adanya kesadaran diri setiap anggota bahwa masing-masing mereka merupakan bagian dari kelompok atau masyarakatnya.

Menurut Koentjaraningrat, masyarakat merupakan istilah yang paling lazim dipakai untuk menyebut kesatuan-kesatuan hidup manusia, baik dalam tulisan ilmiah maupun dalam bahasa sehari-hari.

Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata latin *socius* yang berarti kawan. Istilah masyarakat pada dasarnya berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang berarti ikut serta.³²

Lebih lanjut Koentjaraningrat menyatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang sering bergaul atau

³²*Ibid*, h.143

saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui sesuatu yang bisa membuat warga-warganya saling berinteraksi. Suatu negara modern misalnya, merupakan suatu kesatuan manusia dengan berbagai macam prasarana, yang memungkinkan para warganya untuk berinteraksi secara intensif, dan dengan frekuensi yang tinggi. Artinya masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

A. Tipe-tipe Masyarakat

Menurut Nothingham sebagaimana dikutip oleh Kahmad, masyarakat dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Golongan Petani

Pada umumnya, golongan petani termasuk yang terbelakang. Lokasinya berada di daerah terisolasi, sistem masyarakatnya masih sederhana, lembaga-lembaga sosialnya pun belum banyak berkembang. Disamping alasan-alasan tersebut, unsur-unsur ketidak pastian, ketidak mampuan, kelangkaan, sangat erat dengan kehidupan petani. Mata pancaharian utamanya tergantung pada alam yang tidak bisa dipercepat. Diperlambat, atau diperhitungkan secara cermat sesuai dengan keinginan petani.

b. Golongan Nelayan

Masyarakat yang memiliki mata pencaharian nelayan bergantung pada keadaan alam, yang mencari ikan di laut, rawa atau sungai. Para nelayan tentunya tergantung dengan keadaan alam. Adanya badai merupakan hal yang tidak diinginkan, karena akan menghambat pekerjaan mereka sebagai nelayan.

c. Golongan Pengrajin

Golongan pengrajin tidak terlalu terikat dengan situasi alam dan tidak terlalu bergantung pada hukum alam. Hidup mereka didasarkan atas landasan ekonomi yang memerlukan perhitungan rasional. Mereka tidak menyadarkan diri pada kemarahan alam yang tidak bisa dipastikan, tetapi lebih mempercayai perencanaan yang diteliti dan pengarahannya yang pasti.

d. Golongan Pedagang Besar

Kategori yang paling menonjol dari golongan pedagang besar adalah memiliki sikap yang lain terhadap agama. Pada umumnya kelompok ini mempunyai jiwa yang jauh dari gagasan tentang imbalan jasa (compensation) moral, seperti yang dimiliki golongan tingkat menengah kebawah dan cenderung menutup agama profesi dan etnis.

e. Golongan Karyawan

Golongan karyawan bisa dimasukkan pada masyarakat industri karena sistem sosial yang ada sudah bersifat modern. Hal ini dilihat dari pembagian fungsi-fungsi kerja yang ada sudah jelas dan adanya penyelesaian suatu masalah kemanusiaan berdasarkan penalaran dan efisiensi.

f. Golongan Buruh

Yang dimaksud dengan golongan buruh adalah mereka yang bekerja dalam industri-industri atau perusahaan-perusahaan modern.

g. Golongan Tua-Muda

Di Indonesia usia 40 tahun ke atas biasanya dianggap telah tua dan usia 40 tahun kebawah dianggap muda.

h. Golongan Pria-Wanita

Secara psikologis, watak umum pria dan wanita berbeda. Dalam menghadapi suatu keadaan watak pria lebih dominan menggunakan rasional, sedangkan wanita lebih dominan pertimbangan rasa atau emosinya.³³

Para pakar sosiologi yaitu Muhyiddin dan Syafe'i membuat sejumlah karakter masyarakat Desa diantaranya sebagai berikut:

³³Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Rosda Karya 2002), h.132

- a. Mayoritas latar belakang komunitas Desa bersama pencaharian pertanian (termasuk peternakan dan perikanan), baik bertani dengan cocok tanam di ladang atau di sawah.
- b. Karakteristik komunitas Desa relatif sederhana, taat pada tradisi dan agama.
- c. Masih meyakini adanya hal-hal yang tabu dan mistik.
- d. Kehidupan warganya masih bersikap gotong-royong dan masing-masing warganya saling mengenal.
- e. Etos kerja dan pola kehidupan dalam pengaturan waktunya kurang memperhatikan efisiensi.
- f. Ketergantungan pada sumber daya alam masih sangat sesuai dengan hasil pengalamannya sehari-hari.
- g. Tunduk pada orang yang dianggap tokoh atau panutan.
- h. Adanya kontrol sosial yang sangat kuat.
- i. Tingkat mobilisasi masih sangat rendah dan statis.³⁴

Menurut Maftuh yang dikutip oleh Muhyiddin dan Syafe'i karakteristik masyarakat Desa yang tradisional dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Cenderung memiliki sifat homogen dalam hal mata pencaharian, nilai-nilai, sikap dan tingkah laku.
- b. Lebih menekankan anggota keluarga sebagai inti ekonomi.

³⁴Asep Muhyidin, Agus Ahmad Syafe'i, *Metode Pengembangan Dakwah*, (Bandung: Pustaka Setia 2002), h.146

- c. Faktor geografis berpengaruh atas kehidupan yang ada, misalnya sangat terikat pada tanah kelahirannya.
- d. Hubungan sesama anggota masyarakat sangat intim.
- e. Jumlah anak yang ada dalam keluarga inti lebih banyak.
- f. Memiliki pandangan yang sempit.
- g. Adanya ketergantungan dan sekaligus rasa curiga terhadap pemerintah.
- h. Ada rasa enggan untuk menerima atau menciptakan ide-ide.
- i. Fatalisme.
- j. Memiliki aspirasi dan keinginan yang sangat rendah.
- k. Memiliki pandangan yang terbatas pada dunia luar.
- l. Memiliki derajat yang rendah.
- m. Memiliki sifat curiga terhadap orang yang datang dari luar masyarakat mereka.
- n. Adanya sikap otoritas orang tua terhadap mereka yang berusia muda.
- o. Tidak mau tahu dunia luar dan orang luar.
- p. Ada sifat konservatif.
- q. Pasrah.
- r. Memiliki sifat udik dan pendalaman.
- s. Melakukan pekerjaan secara gotong royong.
- t. Perasaan lebih dominan daripada nalar.
- u. Belum menghargai waktu.
- v. Terikat oleh adat istiadat dan nilai budaya setempat.

w. Kepercayaan terhadap Tuhan yang sangat mendalam.³⁵

Karakteristik masyarakat Desa menurut pakar sosiologis sebagaimana dikutip oleh Asep Muhyiddin dan Agus Ahmad Syafe'i, dapat dikarakteristikan sebagai berikut:

- a. Berorientasi pada tradisi setempat.
- b. Tingkat diferensiasi rendah.
- c. Tingkat spesialisasi rendah.
- d. Pembagian kerja mekanis.
- e. Tingkat urbanisasi rendah
- f. Media komunikasi lisan.
- g. Basis ekonomi pertanian.

6. Masyarakat Menurut Islam

Fazlur Rahman mengemukakan bahwa tidak diragukan lagi tujuan utama Al-Qur'an adalah menegakkan sebuah tata masyarakat yang adil, berdasarkan etika, dan dapat bertahan di muka bumi ini.³⁶ Demikian pula Ismail Raji al-Furuqi menyatakan bahwa, "Tata sosial Islam adalah tata sosial yang totalitas, dalam artian bahwa ia menganggap Islam relevan dengan setiap bidang kegiatan hidup manusia".³⁷ Selanjutnya Omar Mohammad Al-Thony Al-Syaibany mengutip pendapat Ahmad Musa Salim, bahwa:

Islam adalah sistem Illahi dipandang dari perundang-undangannya, ilmiah dipandang dari segi pengalaman sejarahnya, Islam

³⁵*Ibid*, h.147

³⁶Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka 1980), h,54

³⁷Ismail Raji Al-Furudi, (Jakarta: Bumi Aksara 1988), h,188

membangun masyarakat Islam bersifat kolektif antara anggotanya. Dengan iman anggota masyarakat menjadi hamba Allah, bersaudara dan menjadi sumber-sumber kekayaan alam yang telah dijadikan untuk mereka. Mereka membina masyarakat atas dasar keinsyafan bahwa usaha atau kerja menjadi sumber hak dan derajat seseorang. Atas kesadaran bahwa persaudaraan sesama manusia menjadikan mereka sekutu dalam pekerjaan yang baik sumber penghasilan atau kerja.³⁸

Islam adalah satu peradaban yang sempurna, bukan sekedar tuntunan rohani dan bukan pula sekedar bimbingan ibadah. Ia diturunkan Tuhan untuk membangun dunia yang maju, makmur, adil, bebas dari kebodohan, kemiskinan dan ketidakadilan. Oleh karena itu masyarakat yang berdasarkan Islam memiliki ciri-ciri khusus. Dalam hal ini Oemar Mohammad al-Thouny al-Syaibany menguraikan tentang ciri-ciri masyarakat Islam. Adapun ciri-ciri masyarakat Islam sebagai berikut:

- a. Masyarakat Islam wujud atas tonggak iman kepada Allah, para Nabi, kitab-kitab samawi, hari akhirat, hari kebangkitan, hari berkumpul di padang mahsyar, perhitungan dan balasan. Buah keimanan kepada Allah SWT dalam ke-Tuhanannya ialah jiwa menjadi tenang dan damai. Mendidik insan agar merasakan harga dirinya di samping menggalakkannya bekerja dan memproduksi sesuatu

³⁸Oemar Muhammad, *Falsafah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1979), h.166

yang mendatangkan manfaat kepada masyarakat. Iman membebaskan ketakutan, kecuali kepada Allah melahirkan insan yang berguna bagi masyarakat.

- b. Agama diletakkan pada proporsi yang tertinggi. Segala urusan hidup dikembalikan kepada hukumnya sesuai dengan Al-Qur'an yang menyeru supaya pertikaian dikembalikan kepada putusan Allah dan Rasul. Artinya merujuk prinsip dan dasar yang dikandung oleh ajaran Allah dan Rasul. Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*”

- c. Penilaian yang tertinggi diberikan kepada akhlak dan tata susila. Segala kegiatan dan perbuatan insan ditundukan kepada prinsip metode yang telah diterima dari-Nya sebagai perinsip insaniah yang jelas.
- d. Ilmu diberi perhatian yang utama. Ilmu yang benar dianggap sebagai cara untuk memantapkan akidah dan agama. Ilmu yang

benar sebagai suatu cara mencapai kemajuan ekonomi, kemakmuran dan menambah produktifitas.

- e. Masyarakat Islam menghormati dan menjaga kehormatan insan. Tidak bersikap terpisah karena warna kulit, bangsa, agama, harta atau keturunan.
- f. Keluarga atau kehidupan berkeluarga mendapat perhatian yang sangat besar. Masyarakat Islam berusaha untuk menguatkan ikatan dan binaan intuisi keluarga. Hubungan kekeluargaan dibina atas tunas-tunas yang luhur, kebenaran, keadilan dan kasih sayang.

Mengacu pada penjelasan-penjelasan tersebut di atas masyarakat menurut Islam adalah masyarakat yang satu sama lain sangat erat dengan kasih sayang dan keakraban yang mendalam, terhormat, tegas dan berprestasi tinggi.³⁹

7. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat mengandung makna lahir dan batin seluruh masyarakat yang berisikan unsur kualitas kehidupan beragama, tingkat pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani, serta pelayanan sosial dan pemenuhan kebutuhan materi masyarakat pada umumnya.

Dalam menjalani kehidupannya manusia senantiasa dihadapkan dengan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhinya. Namun untuk memenuhi kebutuhan tersebut sering kali seseorang

³⁹*Ibid*, h.157

dibenturkan pada permasalahan yang apabila dibiarkan mungkin saja akan berkembang semakin kompleks. Oleh karena itu, sumber yang ada dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan yang mengatasi permasalahan yang ada.

Kesejahteraan atau yang biasa disebut kesejahteraan sosial merupakan serangkaian aktifitas yang terorganisir yang ditunjukan untuk meningkatkan kualitas hidup, relasi sosial, serta peningkatan kehidupan masyarakat yang selaras dengan standar dan norma-norma masyarakat sebagai tujuan, merupakan cita-cita, pedoman, aspirasi dan juga tujuan supaya terpenuhinya kebutuhan materi, sosial dan spiritual.

Terkait dengan hal ini Spicker yang dikutip Isbandi menggambarkan kaitan dengan kebijakan sosial sekurang-sekurangnya mencakup lima bidang utama yang disebut dengan Big

Five yaitu:

1. Bidang kesehatan
2. Bidang pendidikan
3. Bidang perumahan
4. Bidang jaminan sosial
5. Bidang pekerjaan sosial.⁴⁰

Bila Spicker mengemukakan lima bidang di atas, maka Zastrow mengemukakan pula aspek rekreasi sebagai salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

⁴⁰Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, h.128

masyarakat, sehingga bila digabungkan ada enam bidang yang perlu diperhatikan oleh pembuat kebijakan ataupun pengambil keputusan.⁴¹

Dalam Kehidupan masa kini dapat dikatakan bahwa masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan, masa depan diri, sanak keluarga bahkan lingkungan.⁴²

Undang-undang No. 13 tahun 1998 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan masyarakat memuat definisi kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat baik materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa takut keselamatan kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan usaha penemuan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.⁴³

Friedlander (1976) merumuskan kesejahteraan sebagai suatu sistem yang terorganisasi dan pelayanan-pelayanan sosial dalam lembaga-lembaga yang dimaksudkan untuk membantu individu atau kelompok atau mereka dapat mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan serta terciptanya hubungan-hubungan

⁴¹*Ibid*, h.128

⁴²Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, h.129

⁴³Undang-Undang No. 13 Tahun 1998

seseorang atau sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1998. kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan menjadi seirama dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.⁴⁴



⁴⁴Isbandi Rukminto Adi, *Wawasan Al-Qur'an*, h.31

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sebagaimana menurut Bogdan dan Taylor dalam bukunya Lexy. J. Moleong mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁵ Dengan metode ini penulis mengharapkan dapat memperoleh data-data yang akurat dan lengkap berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Semua yang dikumpulkan berkenungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.⁴⁶

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan.⁴⁷ Penelitian ini dilakukan Di Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

C. Subyek penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh warga masarakat desa banmaleng khususnya yang belum sejahtera. Dari data BLT (Bantuan

⁴⁵Lexi, J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya 2012), cet.6

⁴⁶*Ibid*, h.6

⁴⁷Tim penusun, *Pedoman Penulisan*, 43

Langsung Tunai) tahun 2017, desa banmaleng yang memiliki jumlah penduduk 5,981 jiwa, yang terbagi atas 6 Rukun Warga (RW) dan 18 Rukun Tetangga (RT) terdapat 550 warga miskin. Hampir disetiap RT yang rata-rata jumlah penduduknya 300 orang itu terdapat 30 warga miskin yang hidupnya belum sejahtera.⁴⁸ Namun karena keterbatasan waktu, biaya serta tenaga, maka subyek penelitiannya saya batasi dengan mengambil contoh satu RW yaitu RW 06 yang terdiri dari 3 RT. Alasan saya mengambil contoh RW 06 itu karena warga masyarakat RW 06 tingkat kemiskinannya paling tinggi diantara RW-RW yang lain yang ada di desa banmaleng. Ini bisa dilihat dari pekerjaan mereka sehari-hari yang sebagian besar menjadi petani.

D. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara study lapangan (*Field Research*) yang dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

- a. Pengamatan (observasi) yaitu metode pengumpulan data dengan cara peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dan melakukan pengamatan mengenai keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat secara obyektif.

Setelah peneliti amati, ternyata masyarakat yang belum sejahtera itu bisa dilihat dari beberapa aspek, diantaranya bisa dilihat dari segi bangunan rumahnya yang dindingnya hanya terbuat dari bambu, lantainya tanah dan belum diplester. Selain itu juga bisa dilihat dari segi pekerjaannya yang kebanyakan dari mereka menjadi seorang petani yang

⁴⁸ Data BLT Desa Banmaleng Tahun 2017

hidupnya dalam setiap harinya sebatas cari makannya sapinya dan itupun tidak dapat uang sehingga kebutuhan hidup sehari-harinya kurang.

b. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara agar diperoleh data yang lebih akurat dengan menggunakan pedoman wawancara.

Peneliti juga melakukan wawancara mengenai kesejahteraan masyarakat yang dilakukan langsung dengan masyarakatnya dan melakukan wawancara langsung dengan kepala desa banmaleng beserta staf-stafnya.

c. Study Dokumentasi

Yaitu mempelajari bahan-bahan bacaan atau dokumen-dokumen yang ada yang berhubungan dengan penelitian seperti data monografi desa banmaleng dan data BLT (Bantuan Langsung Tunai) tahun 2017.

E. Teknik analisa data

Setelah data-data yang diinginkan terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah tahap analisa data. Dalam penelitian ini analisa data disajikan dengan model/desain analisa deskriptif, artinya data-data yang telah diperoleh disajikan secara deskriptif setelah sebelumnya dianalisa.

F. Keabsahan data

Tehnik keabsahan data dalam penelitian ini yaitu kredibilitas (derajat kepercayaan) dengan tehnik triangulasi yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Hal itu dapat dicapai dengan jalan

: (a). Membandingkan data hasil pengamatan di lapangan dengan hasil wawancara Kepala Desa Banmaleng. (b). Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain, misalnya dalam hal ini peneliti membandingkan jawaban yang diberikan oleh masyarakat dengan jawaban yang diberikan Bapak Kepala Desa Banmaleng



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

Desa Banmaleng adalah salah satu desa di Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep yang terletak di sebelah barat desa Banbaru dan desa Jate yang berada di pulau Giliraja dan jarak 36 km dari kabupaten sumenep. Kehidupan masyarakatnya adalah bertani dan nelayan yang secara turun temurun merupakan warisan dari para leluhurnya yang menggantungkan nasibnya pada ladang dan laut, dan ternak terutama ternak sapi, kambing dan ayam. Penduduknya dari jaman dulu tidak banyak berubah, karena tidak ada perpindahan penduduk begitu juga dengan pertumbuhan penduduknya yang tidak banyak meningkat.⁴⁹

1. Sejarah Desa Banmaleng

Asal muasal nama Desa Banmaleng dan asal mula Giliraja memiliki cerita masing-masing. Pada tahun 1300 M ada seorang patih atau demang (Agung Demang) yang mengikuti sayembara Raja Baragung untuk mengalahkan Nyi Roro Kidul (Dewi Saraswati). Maka berangkatlah Agung Demang ke pulau Giliraja. Sesampainya di pulau Giliraja Agung Demang dihadang oleh segerombolan perampok (Maleng) yang jumlahnya sekitar 41 orang hingga terjadilah pertarungan dan akhirnya para perampok tersebut dapat ditumpas.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Ketua RW. 04 yaitu Bpk. Odim tanggal 25 Mei 2019

Hingga akhirnya daerah ini diberi nama desa Banmaleng (Ban berarti Kumpulan dan Maleng berarti Maling/Perampok). Setelah beberapa peristiwa yang dialami Agung Demang (Pangeran Rawit) melakukan pertapaan dengan berubah dirinya menjadi seekor buaya putih untuk melawan Nyi Roro Kidul. Dengan perwujudan Pangeran Rawit/Agung Demang menjadi buaya putih ini maka menurut dawuh para leluhur pulau ini diberi nama Gili Bajah (Gili Raja). Gili berarti pulau dan Bajah berarti buaya.

2. Visi dan Misi Desa Banmaleng

a. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi dalam hal ini Desa Banmaleng hendak di bawa dan berkarya agar tetap konsisten, eksis serta produktif, untuk menunjang semua itu maka Desa Banmaleng memiliki visi yang berbunyi **“Terwujudnya Pemerintahan Desa Yang Ramah, Aman, Kenangan, Indah dan Berkeadilan Sosial Mandiri”** Visi tersebut mengandung pengertian bahwa cita-cita yang akan dituju dimasa yang akan mendatang oleh segenap warga Desa Banmaleng.

b. Misi

Misi merupakan mempresentasikan sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan dapat dilaksanakan sehingga dapat bergaya guna dan berhasil.

Adapun misi yang telah dirumuskan oleh Desa Banmaleng adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keutuhan, ketertiban, dan kemandirian desa dengan semangat kebersamaan yang berorientasi pada terciptanya pola hidup ramah, aman, dinamis, harmonis dan religius.
- 2) Meningkatkan semangat pendidikan, pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang proses pembangunan masyarakat yang berorientasi di masa depan.
- 3) Memberdayakan kelompok masyarakat ekonomi lemah menjadi ekonomi produktif, inovatif dan kreatif yang di jiwai semangat interpreneur.
- 4) Peningkatan sarana dan prasarana sosial, ekonomi, kesehatan, keagamaan, perikanan dan kelautan sebagai penunjang pembangunan yang terpadu dan berkeadilan sosial.
- 5) Menjadikan desa sebagai pusat kebudayaan dan peradaban yang luhur, fleksible, dialetik dan menyenangkan guna mewujudkan kesejahteraan sosial, humanis dan kharismatik.

3. Pemerintahan Desa Banmaleng

Pemerintah desa banmaleng merupakan suatu pemerintahan yang ada sejak jaman kerajaan. Sesuai dengan keadaan dan kondisi alam masyarakat Banmaleng maka wilayah pemerintahan terdiri atas 4 dusun.

Sejak adanya pemerintahan desa Banmaleng dipimpin oleh Pangeran Rawit yang kemudian digantikan oleh seorang kepala desa yang bernama P.Lusin sekitar tahun 1930 yang pemerintahannya menggantikan Pangeran Rawit masih mengikuti pola kerajaan Sumenep.

Masa kepemimpinan kepala desa P.Lusin digantikan oleh P.Ratima dan Masa kepemimpinannya belum ada perkembangan karena masih dalam masa pemerintah penjajah Belanda. Sedang beberapa tahun kemudian kepemimpinan kepala desa Banmaleng diganti oleh Asm'e setelah itu diganti oleh H, Musyafak (1975-2007) setelah sekian lama dipimpin oleh H.Musaffak desa Banmaleng kemudian diganti oleh H.Moh.Rakib terpilih lagi sebagai kepala desa Banmaleng periode kedua Yaitu tahun 2013-2019.⁵⁰

Sebelum tahun 1999 tepatnya pada pemerintahan aqidah dan sebelumnya, struktur organisasi pemerintahan desa yaitu kepala desa di bantu oleh :

- a. Carek
- b. Apel
- c. PKD
- d. LKMD
- e. LMD
- f. Modin

⁵⁰ Sumber data wawancara kepala desa banmaleng, 15 juni 2019

Kemudian setelah tahun 1999 pemerintahan desa berubah struktur menjadi :

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa
- c. Kepala Seksi (Kasi)
- d. Kepala Urusan (Kaur)
- e. Kepala Dusun
- f. BPD

4. Letak Geografis Desa Banmaleng

Desa Banmaleng termasuk dalam wilayah Kecamatan Giligenting yang terletak sekitar 13,5 km dari kecamatan dan kurang lebih 36 km dari kabupaten Sumenep. Secara geografis desa

Banmaleng dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga dengan batas-batas wilayah Desa Banmaleng adalah sebagai berikut :

Batas Wilayah Desa :

Sebelah Barat : Laut Madura

Sebelah Timur : Desa Banbaru & Desa Jate

Sebelah Utara: Laut Madura

Sebelah Selatan : Laut Madura

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan program pemerintah dan memudahkan komunikasi antara aparat Desa dengan masyarakat setempat, maka desa Banmaleng di bagi menjadi 4 dusun, 8 Rukun Warga (RW), 26 Rukun Tangga (RT). Dalam proses pelaksanaan

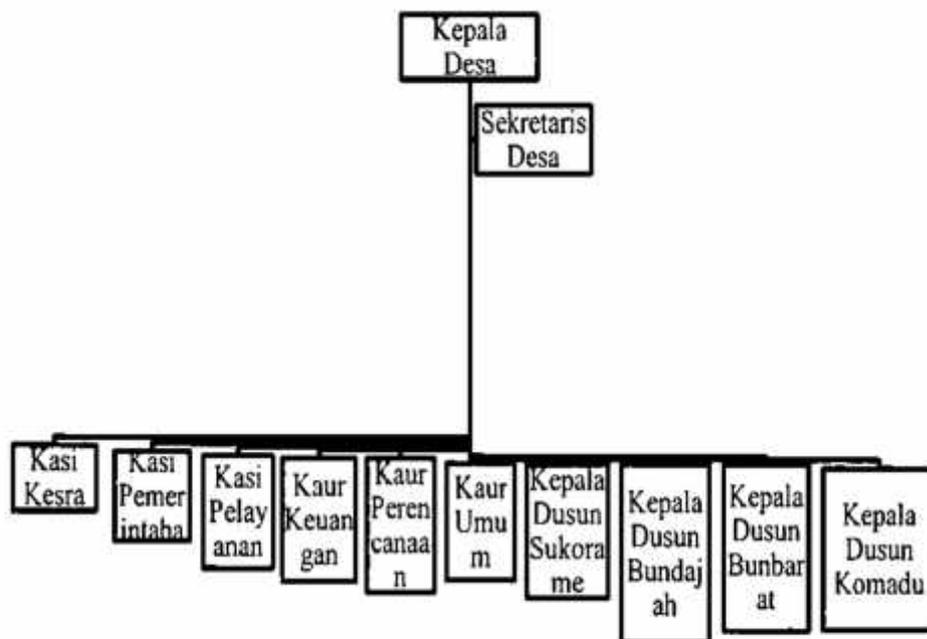
program pemerintah, diawasi oleh Badan Perwakilan Desa (BPD), sedangkan operasional pengelolaan dan pengembangan Desa Banmaleng dilakukan oleh orang-orang yang telah ditentukan dengan dibantu oleh seluruh masyarakat desa.⁵¹ Nama Kepala Desa beserta pamongnya adalah sebagai berikut :

Kepala Desa	: H. Rakib
Sekretaris Desa	: Edy Sunaidi
Kasi Kesra	: M. arwi
Kasi Pemerintahan	: Zainurrahman
Kasi Pelayanan	: Abd. Mu'ti Sujak
Kaur Keuangan	: Arsilam
Kaur Perencanaan	: Moh. zainuddin
Kaur Umum	: Nur Holis
Kadus Sokoramme	: Zayyadi
Kadus Bundajah	: Ali Wafa
Kadus Bunbarat	: Hosman
Kadus Komadu	: Mude

IAIN JEMBER

⁵¹ Sumber Data Dokumentasi pada tahun 2019

Tabel 1
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Banmaleng



5. Demografi Desa Banmaleng

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 3515 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.703 jiwa, sedangkan berjenis perempuan berjumlah 1.812 jiwa. Survei Data Sekunder dilakukan oleh Fasilitator Pembangunan Desa, dimaksudkan sebagai Data Pembanding dari data yang ada di Pemerintah Desa. Survei Data Sekunder yang dilakukan pada bulan Maret 2017 berkaitan dengan data penduduk pada saat itu, terlihat dalam Tabel berikut ini :

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Banmaleng
Tahun 2017

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	1.703	48.45%
2	Perempuan	1.812	51.55%
	Jumlah	3.515	100%

Sumber : Data Surve sekunder Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting, Maret tahun 2017

6. Potensi Desa

Sumber Daya Alam (Umum, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Air)

Sumber Daya Manusia (Jumlah, Pendidikan, Mata Pencaharian, Tenaga Kerja)

Sumber Daya Kelembagaan (Pemerintahan, Kemasyarakatan, Politik, Ekonomi, Pendidikan, Keamanan)

Sarana & Prasarana (Air Bersih, Irigasi, Ibadah, Olahraga, Kesehatan, Pendidikan, Penerangan)

Tabel 3
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Banmaleng

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Keterangan
1	Pengrajin Perhiasan	753	
2	Petani	129	
3	Buruh	66	
4	Pedagang	64	
5	Jasa Angkutan	125	
6	Jasa Keterampilan	27	
7	Karyawan		
	a. PNS	36	
	b. TNI/POLRI	9	
	c. Swasta	67	
8	Pemulung	60	
	JUMLAH	1336	

Sumber : Monografi Desa Banmaleng 2019

B. Penyajian Data dan Analisis

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh data. Setelah mengalami proses peralihan dan sesuai dengan metode yang digunakan, maka secara berurutan akan disajikan data-data yang mengacu pada fokus penelitian. Penelitian ini menggambarkan tentang penyajian data berupa gambaran tentang Kemandirian Masyarakat Desa Banmaleng Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonominya Tanpa Bantu Pemerintah Desa.

1. Kemandirian Masyarakat Desa Banmaleng Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.

Masalah kesejahteraan hingga saat ini masih merupakan sesuatu hal yang masih hangat di perbincangkan, baik pada tataran global, regional maupun local. Pokok masalah dari dari kesejahteraan itu sendiri adalah kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat serta terbatasnya akses ekonomi pada masyarakat khususnya masyarakat golongan bawah. Maka tidaklah mengherankan jika masalah kesejahteraan tidak akan pernah selesai dibahas selama masalah kemiskinan dan pengangguran masih terjadi.

Begitu pula yang terjadi pada ruang lingkup lokal, dalam hal ini di Desa Banmaleng. Sebagai sebuah desa sebagaimana Desa-desa lain yang ada di Indonesia, masalah kemiskinan dan ketidakberdayaan merupakan masalah yang hingga saat ini masih terus diupayakan jalan

keluarnya agar masyarakat Desa Banmaleng kehidupannya secara umum dapat sejahtera. Karena itu berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah Desa Banmaleng ditujukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakatnya dengan cara membuat program pemberdayaan masyarakat.

Sebelum penulis uraikan lebih lanjut mengenai kemandirian masyarakat Desa Banmaleng dalam meningkatkan kesejahteraan ekonominya, terlebih dahulu akan penulis uraikan tentang peta pekerjaan masyarakat setempat. Masyarakat Desa Banmaleng mayoritas adalah pekerja atau bermata pencahariannya di sektor perdagangan keluar Desa. Hal ini sudah berlangsung sejak tahun 2014 kemaren dan menjadi pekerjaan yang bersifat turun temurun. Dari hasil observasi penulis di ketahui sekitar 70-80 persen penduduknya bekerja pada sektor perdagangan, sementara sisanya bekerja disektor pertanian, nelayan. Berikut penulis tampilkan peta mata pencaharian masyarakat Desa Banmaleng dalam bentuk tabel.

Beberapa masalah yang hingga kini dihadapi masyarakat Desa Banmaleng berkaitan dengan masalah kesejahteraannya adalah masalah Sumber Daya Manusia (SDM), perlu diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Banmaleng rata-rata rendah sehingga potensi sumber daya manusianya dapat penulis katakan sangat terbatas, hal ini berhubungan dengan budaya dan cara pandang masyarakat di Desa tersebut mengenai arti pentingnya pendidikan bagi

anak-anak mereka. Berikut penulis tampilkan peta tingkat pendidikan masyarakat yang ada di Desa Banmaleng.

Tabel 4
Urutan Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Buta aksara dan angka	299	
2	Tidak tamat SD	1196	
3	Tamat SD	3588	
4	Tamat SLTP	232	
5	Tamat SLTA	179	
6	Sarjana/S1	18	
	Jumlah	5512	

Sumber : Monografi Desa Banmaleng 2019

Masalah teknologi produksi, masalah permodalan, masalah system manajemen produksi dan lain sebagainya. Berkaitan dengan masalah kesejahteraan ekomi masyarakat Desa Banmaleng tersebut, pemerintah Desa Banmaleng tidaklah tinggal diam begitu saja. Pemerintah Desa Banmaleng berupaya menyusun sebuah program bermanfaat bagi proses peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Banmaleng. Diantanya program yang telah dirancang dan dijalankan adalah program pemberdayaan masyarakat pengrajin assesoris yang ada di Desa tersebut. Dari hasil observasi penulis di lapangan diketahui program pemberdayaan tersebut secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga bagian yakni program penyuluhan, program pelatihan, dan program bantuan modal usaha. Program pemberdayaan dibentuk sebagai upaya pemerintah Desa Banmaleng dalam membantu masyarakat guna meningkatkan kemampuan usaha agar lebih baik lagi, dengan kata lain program ini dirancang guna

mendorong pada proses peningkatan kesejahteraan yang pada prosesnya akhirnya diharapkan masyarakat dapat hidup mandiri.

Beberapa program pemberdayaan masyarakat yang dibuat pemerintah Desa Banmaleng dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

1. Program Pelatihan dan Keterampilan bagi ibu-ibu PKK.

Diantara program yang telah dijalankan oleh pemerintah kepala Desa Banmaleng melalui Lembaga social kemasyarakatan yang tergabung dalam kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), adalah program pelatihan dan keterampilan memasak dan menjahit. Berdasarkan hasil Analisa penulis merujuk pada data hasil wawancara, bahwa program yang dirancang ini ditujukan agar kemampuan masyarakat Desa Banmaleng dalam hal keterampilan dapat meningkat guna menopang kehidupan ekonominya sehingga dengan adanya program ini kesejahteraan masyarakat dapat terwujud melalui usaha kreatifitas dalam hal memasak dan menjahit.

Menurut penulis apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Banmaleng melalui programnya tersebut merupakan sebuah proses pengembangan ekonomi masyarakat pada sisi sumber daya manusia. Dalam teori sumber daya manusia pengembangan asset manusia merupakan kunci keberhasilan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Agar pembahasannya lebih sistematis, maka terlebih dahulu akan penulis uraikan tentang program pelatihan dan memasak terlebih dahulu. Program pelatihan dan keterampilan memasak ini dilakukan setiap dua bulan sekali tujuan dari program ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat Desa Banmaleng, khususnya ibu-ibu rumah tangga. Program keterampilan memasak ini berdasarkan Analisa penulis dapat dijadikan sebagai sebuah modal usaha yang sifatnya usaha kreatif, sebab dalam program pelatihan dan keterampilan memasak para peserta didorong untuk menghasilkan sebuah karya masakan yang berbeda dari masakan kebanyakan dan memiliki nilai jual ekonomi. Beberapa bahan makanan local seperti singkong yang memang selama ini banyak terdapat di Desa tersebut dapat lebih diberdayakan lagi dengan cara dibuat kripik dengan aneka rasa, maka tidaklah mengherankan jika dalam program pelatihan dan keterampilan tersebut, antusias masyarakat khususnya kaum ibu rumah tangga sangat banyak. Dengan adanya program ini setidaknya ada dua hal yang didapat oleh masyarakat Desa Banmaleng, pertama adalah pengetahuan mereka bertambah karena telah mengikuti program itu. Kedua adalah timbulnya peluang usaha dari hasil akhir program tersebut.

Dari hasil observasi dan wawancara penulis diperoleh keterangan bahwa sudah ada beberapa peserta program pelatihan

dan keterampilan memasak yang kini mulai mencoba usaha pembuatan kripik singkong dengan aneka rasa.

Diakui oleh ibu ratna yang kini berusaha dalam pembuatan kripik singkong, usaha yang kini dia lakukan termotivasi berkat program pelatihan dan keterampilan memasak yang diikutinya.

Usahanya kini mulai menunjukkan hasil kearah positif, banyak permintaan mulai bermunculan meskipun usaha pemasaran masih bersifat mulut ke mulut. Dengan usaha yang dilakukan selama ini setidaknya dirinya dapat membantu penghasilan suami. Dari contoh kasus tersebut menurut penulis program yang dibuat pemerintah Desa Banmaleng memiliki dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebab masyarakat

termotivasi untuk berusaha. Dengan diberi dukungan berupa pemahaman dalam sikap berwirausaha diharapkan masyarakat dapat lebih mandiri. Kunci utama dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat menurut penulis adalah adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri mengenai pandangan hidupnya dalam berusaha, meskipun factor permodalan tidak begitu saja diabaikan.

Karena masalah yang dihadapi masyarakat Desa Banmaleng tidak hanya sebatas pada masalah sumber daya manusianya, tetapi masalah yang dihadapi dalam proses peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya adalah program keterampilan menjahit. Berdasarkan hasil observasi penulis dan hasil wawancara diperoleh sebuah kesimpulan bahwa program ini dirancang guna meningkatkan keterampilan masyarakat Desa Banmaleng khususnya peserta kursus menjahit. Dengan adanya program ini para ibu rumah tangga diharapkan memiliki kemampuan dan keterampilan tambahan yang berguna guna membantu penambahan penghasilan keluarga sehingga dengan mereka berusaha atau bekerja sebagai penjahit mereka memiliki pendapatan diluar pendapatan suami sehingga dengan demikian terjadi penambahan pendapatan. Dalam konteks ilmu ekonomi dengan adanya peningkatan pendapatan maka belanja rumah tangga juga akan bertambah yang pada akhirnya terjadi pergerakan uang dalam rumah tangga. Dengan adanya peningkatan pendapatan rumah tangga tersebut menurut penulis merupakan salah satu indikator terjadinya peningkatan kesejahteraan ekonomi. Program pelatihan dan keterampilan menjahit ini menurut penulis juga memiliki dua sisi yang positif. Pertama, dengan adanya program ini masyarakat khususnya para peserta memiliki pengetahuan lebih jika dibandingkan dengan masyarakat yang tidak mengikuti program ini. Artinya mereka memiliki nilai lebih dari yang lain, sebab dalam proses peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat kemampuan atau *Skill* merupakan syarat yang sangat dibutuhkan.

Kedua, dengan program tersebut masyarakat khususnya para peserta didorong untuk kreatif dalam membuka usaha baru yang memiliki nilai jual ekonomi.

Dengan kemampuan yang didapat para ibu rumah tangga dari hasil program pelatihan dan keterampilan menjahit tersebut bias dijadikan sebagai modal usaha bagi peningkatan kesejahteraan rumah tangga mereka.

Menurut ibu ecih, peserta kursus menjahit yang kini mulia membuka usaha jahit dirumahnya, apa yang telah dia dapat selama dirinya mengikuti program pelatihan dan keterampilan menjahit sangat berguna bagi dirinya dan keluarganya. Berkat program yang dibuat oleh Pemerintah Desa Banmaleng melalui Lembaga PKK, kini dirinya sudah menjahit dan bisa menghasilkan pendapatan sendiri dari hasil usahanya tersebut. Diakui usahanya untuk bulan-bulan ini menunjukkan kearah positif. Beberapa tetangga dekat sudah mulai mempercayai dirinya untuk dibuatkan baju khususnya guna menghadapi hari raya nanti. Pendapatan yang diperoleh juga lumayan cukup untuk membantu menghidupi keluarganya.

Dari contoh kasus tersebut, penulis dapat simpulkan bahwa program kursus menjahit memiliki dampak positif bagi peningkatan kemampuan kapasitas masyarakat. Selain itu program ini berdampak pada munculnya usaha-usaha baru skala rumah

tangga yang pada akhirnya terjadinya peningkatan kesejahteraan ekonominya masyarakat melalui lahirnya berbagai usaha.

2. Program Pelatihan dan Keterampilan bagi Masyarakat Pengrajin Assesoris

Selain program pelatihan dan keterampilan yang ditujukan bagi ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam organisasi PKK Desa Banmaleng, pemerintah Desa Banmaleng juga membuat sebuah program pemberdayaan bagi masyarakat pengrajin di Desa Banmaleng. Sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya bahwa masyarakat Desa Banmaleng mayoritas penduduknya bekerja sebagai pengrajin pembuatan assesoris. Berangkat dari permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat, khususnya masalah dalam hal pembuatan assesoris, maka pemerintah bekerja sama dengan pemda Kabupaten Sumenep berupaya menyusun sebuah program dimana program yang dijalankan tersebut sudah mengakomodir berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat pengrajin yang ada di Desa Banmaleng.

Beberapa masalah yang dihadapi masyarakat pengrajin yang ada di Desa Banmaleng adalah masalah sumber daya manusia (SDM) yang menyangkut keterbatasan keterampilan, produktifitas yang rendah, tidak mampu berkompetensi, masalah teknologi produksi dan masalah permodalan. Berdasarkan permasalahan tersebut pemerintah Desa Banmaleng selalu rutin

menyelenggarakan program pemberdayaan bagi masyarakat pengrajin assesoris.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya di sektor industry assesoris pemerintah Desa Banmaleng bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Sumenep memberikan berbagai bantuan demi kemajuan industry assesoris yang memang menjadi andalan masyarakat Desa Banmaleng secara umum tersebut. Bantuan yang diberikan tersebut berupa bantuan yang bersifat teknis maupun non teknis.

Bantuan tersebut biasanya berwujud pada program pemberdayaan masyarakat berupa program pelatihan, penyuluhan, pemberian bantuan usaha, dan program study banding guna meningkatkan SDM masyarakat pengrajin di Desa Banmaleng.

2. Program Penyuluhan Kewirausahaan bagi Masyarakat Pengrajin Assesoris di Desa Banmaleng

Program penyuluhan dilakukan guna mengakomodir masalah sumber daya manusia yang rendah guna meningkatkan kemampuan mereka berhubungan dengan permasalahan kewirausahaan di bidang industri assesoris. Penyuluhan tersebut berhubungan dengan bagaimana cara manajemen keuangan industri yang terpisah dengan pengelolaan keuangan rumah tangga. Sehingga dengan adanya penyuluhan ini diharapkan masyarakat pengrajin dapat mengelola keuangan secara baik, manajemen produksi yang berhubungan dengan

bagaimana memproduksi sebuah produk yang dapat diterima pasar dan sesuai dengan standart pasar, dan lain sebagainya.

Menurut penulis dengan adanya penyuluhan tersebut masyarakat diajak untuk mengerti tentang bagaimana pengelolaan manajemen berwirausaha dengan baik. Tujuan dari program penyuluhan adalah upaya penyadaran bgi masyarakat mengenai berbagai masalah yang dihadapinya, dengan kata lain program penyuluhan tersebut merupakan sebuah proses penyadaran dan alternatif bagi usaha peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pengrajin di Desa Banmaleng. Sebab menurut pandangan penulis bahwa usaha untuk mencapai kesejahteraan adalah adanya kesadaran berusaha secara benar yang diperoleh melalui penambahan wawasan.

Penambahan wawasan tersebut dapat diperoleh melalui jalur penyuluhan.

Wirausaha merupakan model pencaharian atau usaha masyarakat kebanyakan. Karena itu pemberdayaan usaha kecil dan menengah merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pada kemandirian dan sumber daya lokal. Wirausaha juga terbukti mampu mengurangi angka pengangguran, khususnya yang terjadi di Desa Banmaleng. Urgensi yang diadakan oleh pemerintah Desa Banmaleng menurut penulis adalah sebagai proses atau bagian dari pengembangan dan peningkatan kesejahteraan yang berujung pada kemandirian

masyarakat dalam bidang ekonomi. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang memiliki kepercayaan diri sendiri sehingga setiap individu memiliki kemampuan tersendiri untuk hidup lebih sejahtera. Kemampuan untuk hidup sejahtera menurut penulis berhubungan erat dengan proses pencerdasan masyarakat dengan cara meningkatkan sumber daya manusia (SDM), ilmu pengetahuan dan teknologi.

Konsep pemberdayaan yang demikian itu bagi penulis sudah terakomodir di dalam program penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Banmaleng dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Banmaleng tersebut.

Program penyuluhan bagi masyarakat pengrajin di Desa Banmaleng dirasakan oleh para pengusaha dan pengrajin sebagai sebuah kegiatan yang positif. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh bapak H. Tandi yang berprofesi sebagai pengusaha industri pembuatan asesoris. Menurutnya kegiatan penyuluhan yang ditujukan bagi masyarakat pengrajin memiliki nilai positif dalam berbagai hal, diantaranya masyarakat menjadi lebih tahu mengenai berbagai hal yang mendukung keberhasilan usaha mereka di bidang industri asesoris.⁵²

Penyuluhan juga sering dilakukan manakala ada bantuan peralatan produksi berupa mesin produksi di Desa Banmaleng. Tujuannya adalah memberikan himbauan dan motifasi kepada mereka

⁵² Wawancara dengan bapak H. Tandi Pengusaha dan Pengrajin di Desa Banmaleng

agar selalu berkarya dengan memperhatikan kualitas produksi sehingga produk mereka dapat diterima pasar dan sesuai dengan keinginan pasar.

3. Program Pelatihan bagi Peningkatan Produktifitas Masyarakat Pengrajin

Selain program penyuluhan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Banmaleng, program pelatihan juga selalu diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai pengrajin di bidang industri asesoris. Berbeda dengan program penyuluhan yang terkesan para pesertanya berperan pasif, pada program pelatihan peningkatan produktifitas masyarakat pengrajin, seluruh peserta di dorong untuk selalu berperan aktif dalam setiap proses kegiatannya. Sebab dalam program pelatihan ini kemampuan para peserta dibentuk dan diarahkan agar selalu bertambah dan meningkat.

Sebagaimana yang diutarakan oleh bapak Rohim kepada penulis bahwa pada program pelatihan ini dirinya dituntut selalu berperan aktif, sebab program pelatihan ini kemampuan teknis dari setiap peserta selalu dituntut. Para pembimbing hanya berfungsi sebagai motifator dan fasilitator dalam program pelatihan tersebut. Materi pelatihan biasanya berhubungan dengan teknik produksi, antara lain kemampuan mengoperasikan mesin produksi hasil sumbangan dari pemda kabupaten sumenep, kemampuan dalam

teknik pengemasan hasil produksi yang menarik, kemampuan *maintenance* atau perawatan mesin jika terjadi kerusakan serta berbagai teknik produksi yang bersifat efektif dan efisien.⁵³

Dari kegiatan pelatihan tersebut, penulis berkesimpulan bahwa program pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Banmaleng bekerja sama dengan pemda kabupaten sumenep adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam program pelatihan ini terdapat proses atau transfer teknologi yang berguna bagi peningkatan kemampuan masyarakat. Kemampuan atau skill yang dimiliki tersebut nantinya dapat dijadikan modal bagi masyarakat yang bersangkutan dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Selain itu, menurut analisa penulis program pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Banmaleng bagi pesertanya memiliki keunggulan komparatif. Sebab antara program penyuluhan dan program pelatihan yang diadakan memiliki hubungan yang tak bisa dipisahkan. Program penyuluhan berhubungan dengan upaya penyadaran dan penambahan wawasan bagi masyarakat pengrajin, sedang program pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat pengrajin dalam hal produktifitasnya. Dengan demikian proses peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang dilakukan oleh pemerintah Desa Banmaleng guna meningkatkan kesejahteraan

⁵³ Wawancara dengan bapak rohim peserta penyuluhan dan pelatihan yang juga berprofesi sebagai pengrajin didesa banmaleng

ekonomi masyarakat sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat yakni berbasis pada sumber daya manusia stempat, partisipasi aktif masyarakat dan berkelanjutan (*Sustainable*).

4. **Program Bantuan Modal Usaha bagi Masyarakat Pengrajin Assesoris**

Sebagaimana penulis utarakan sebelumnya bahwa masalah permodalan bagi masyarakat pengrajin assesoris Desa Banmaleng merupakan masalah klise yang selalu mereka hadapi. Menanggapi hal tersebut pemerintah Desa Banmaleng bekerjasama dengan pemda Kabupaten Sumenep memberikan bantuan modal usaha bagi masyarakat desa, khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai pengrajin assesoris. Bantuan usaha tersebut berasal dari pemerintah pusat melalui Depattemen Koperasi dan UKM yang disalurkan kepihak Provinsi dan pemda Kabupaten yang berakhir di pihak Desa di seluruh Indonesia.

Masalah permodalan merupakan keluhan yang sering penulis dengar berkaitan dengan produktifitas mereka dalam bidang industri assesoris. Tidak adanya permodalan yang cukup dalam rangka pengembangan usaha menjadi pemicu lemahnya produktifitas mereka baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Bagi masyarakat Desa Banmaleng modal menjadi kebutuhan yang mendasar pada saat usaha mereka memasuki tahap perkembangan, baik pada sisi pengembangan produk maupun pada pengembangan pasar.

Kasus yang umum terjadi pada masyarakat Desa Banmaleng adalah ketika usahanya mulai berkembang dan mulai mendapat perhatian pasar, sering kali terbentur bahkan surut kembali kebelakang karena tidak di *Back-up* oleh modal yang mencukupi. Berdasarkan hasil observasi penulis, mayoritas masyarakatnya yang bermata pencaharian sebagai pengusaha atau pengrajin di sektor industri assesoris mengakui masalah permodalan hingga kini masih merupakan masalah pokok.

Bagi penulis berdasarkan kasus tersebut, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Banmaleng sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam menyikapi masalah permodalan dengan program bantuan modal usaha secara bergulir menggunakan pendekatan strategi peningkatan kesejahteraan. Strategi peningkatan ekonomi yang berbasis kesejahteraan masyarakat dengan cara lebih banyak memberikan bantuan permodalan bergulir yang di drop oleh pemerintah yang disertai dengan berbagai kebijakan dan ketentuan yang sengaja dibuat oleh pemerintah.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak jaelani, salah satu pengrajin yang ada di Desa Banmaleng yang tercatat sebagai anggota penerima bantuan modal usaha bergulir dari pemerintah Desa Banmaleng. Menurutnya ada beberapa kriteria yang harus dia penuhi sebelum layak untuk menerima bantuan tersebut. Pertama harus dipahami bahwa bantuan yang diberikan bukanlah

bantuan yang sifatnya Cuma-Cuma. Kedua sebelum dilakukan survey tentang kelayakan usaha yang selam ini dijalannya. Ketiga adalah kemampuan untuk mengembalikan dana yang dipinjamkan yang disertai dengan berbagai aturan yang ketat.⁵⁴

Dari uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa program pemberian bantuan modal secara bergulir yang dilakukan oleh pemerintah Desa Banmaleng dalam membantu masyarakatnya menuju peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sudah sesuai prinsip keadilan sosial. Sebab dana yan dipinjamkan tersebut nantinya akan di salurkan kembali kepada mereka yang berkesempatan menerima bantuan tersebut.

Dengan adanya bantuan modal tersebut masyarakat pengraji assesoris yang ada di Desa Banmaleng dapat memperkuat usahanya baik dari sisi peningkatan produksi secara kualitatif maupun kuantitatif. Peningkatan secar kualitatif diperoleh dengan cara pengadaan mesin-mesin produksi guna memperlancar proses produksi, sedangkan secara kuantitatif dapat dilakukan dengan jalan memperbesar volume produksi. Indikator peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pengrajin berkat adanya bantuan modal bergulir ini menurut penulis dapat dilihat dari sisi peningkatan jumlah produksi, peningkatan pendapatan, peningkatan aset-aset produksi berupa bertambahnya jumlah tenaga kerja, mesin dan lain sebagainya.

⁵⁴ Wawancara dengan bapak jaelani, pengrajin penerima bantuan modal bergulir bagi UKM desa Banmaleng

Menurut bapak H. Tandi selaku pengusaha di bidang pembuatan asesoris yang juga tercatat sebagai warga penerima bantuan modal usaha bergulir, sebelum dirinya mendapat bantuan usaha dari pihak Desa, kemampuan usaha untuk memproduksi asesoris rata-rata perhari hanya 500 kodi. Setelah dirinya mendapat bantuan modal usaha bergulir dari pemerintah sebesar 5 juta untuk jangka waktu pengembalian modal usaha selama 10 bulan, kini kemampuan produsinya bisa ditingkatkan hingga 850 kodi perhari. Selain peningkatan produksi berkat bantuan tersebut dirinya kini juga berhasil menambah jumlah tenaga kerja yang dimiliki dimana sebelumnya hanya 8 orang kini bertambah menjadi 10 orang.⁵⁵

Dengan demikian menurut penulis program pemberian bantuan usaha bergulir yang dilakukan oleh pemerintah Desa Banmaleng berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya, khususnya masyarakat penerima bantuan tersebut. Jika program penyuluhan dan pelatihan yang selama ini diberikan oleh pemerintah Desa Banmaleng memiliki dampak pada peningkatan kapasitas skill dan pengetahuan bagi masyarakat yang dapat dijadikan modal bagi usaha peningkatan kesejahteraan ekonomi khususnya di bidang industri pembuatan asesoris, maka pada program pemberian bantuan modal bergulir ini pemerintah Desa Banmaleng telah berhasil meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan cara

⁵⁵ Wawancara dengan bapak H. Tandi penerima bantuan dana bergulir bagi UKM di desa banmaleng

memperbesar jumlah produksi yang berakhir pada peningkatan jumlah pendapatan yang didapat oleh para pengrajin dan pengusaha.

Selain itu, program bantuan modal usaha secara bergulir berdasarkan hasil analisa penulis juga berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah pekerja yang dimiliki oleh pengusaha sebagaimana yang dialami oleh bapak H. Tandi.⁵⁶

Berikut ini penulis sajikan analisa hasil analisa penuli dari program bantuan modal usaha bergulir berkaitan dengan proses peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pengrajin di bidang industri assesoris.

No	Jenis Bantuan	Indikator Kesejahteraan	Keterangan
1	Modal Bergulir Usaha	Meningkatkan jumlah produk yang diproduksi akibat penambahan modal usaha. Meningkatkan kualitas produk akibat adanya penambahan mesin baru. Bertambahnya jumlah tenaga kerja akibat bertambahnya volume produksi	Meningkatkan pendapatan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan pengusaha dan pekerja.
2	Pelatihan	Bertambahnya kemampuan/skill yang dimiliki oleh pengrajin yang berpengaruh pada kualitas dan kuantitas produk yang	

⁵⁶ Wawancara dengan H. Tandi Pengusaha industri assesoris desa banmaleng

		dihasilkan.	
3	Penyuluhan	Bertambahnya pemahaman masyarakat pengrajin mengenai pengelolaan usaha di bidang industri pembuatan assesoris.	
4	Bantuan Bahan Baku	Bertambahnya jumlah bahan baku yang tersedia untuk diproduksi	Bantuan berupa bahan nikel dan timah
5	Program Banding Study	Bertambahnya wawasan karena terjadinya pertukaran pengalaman.	

Tabel 5
Data Penerima Bantuan Modal Usaha Bergulir Desa Banmaleng

No	Nama Penerima Bantuan	Jumlah Yang Diterima	Jangka Waktu
1	H. Tandi	5 Juta	10 Bulan
2	Darma	2.5 Juta	10 Bulan
3	Safta	3 Juta	10 Bulan
4	Saprudin	2.5 Juta	10 Bulan
5	Caca	1 Juta	10 Bulan
6	H. Asrarudin	3 Juta	10 Bulan
7	Ahmad Yani	2 Juta	10 Bulan
8	Rasim	2 Juta	10 Bulan
9	H. Opay	3 Juta	10 Bulan
10	Jaenudin	3 Juta	10 Bulan

11	H. Kahfi	3 Juta	10 Bulan
12	Cahyono	3 Juta	10 Bulan
13	Syarifuddin	3 Juta	10 Bulan
14	Santa	3 Juta	10 Bulan
15	Rohim	3 Juta	10 Bulan
16	Ahmad Jaelani	2.5 Juta	10 Bulan
17	Tawi	1.5 Juta	10 Bulan
18	Haci	3 Juta	10 Bulan
19	Jamar	2 Juta	10 Bulan
20	H. Aco	3 Juta	10 Bulan

Sumber: Data Penerima Bantuan modal usaha Desa Banmaleng 2015

5. Program Magan dan Study Banding bagi Pengusaha dan Pengrajin Industri Assesoris

Program study banding yang dilakukan oleh pemerintah Desa Banmaleng bekerja sama dengan pemda sumenep dibuat guna menambah pengetahuan dan wawasan serta keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat pengusaha dan pengrajin yang ada di Desa Banmaleng. Dengan adanya program ini para peserta yang berpartisipasi dalam program ini dapat bertukar pikiran dengan masyarakat pengrajin yang sama di luar Desa Banmaleng mengenai masalah yang berkaitan dengan usaha di bidang industri pembuatan assesoris. Dengan demikian setelah mereka pulang dari kegiatan magang atau study banding akan menghasilkan karya yang bersifat

inovatif yang terinspirasi dari hasil kegiatan magang dan study banding tersebut.

Berdasarkan hasil observasi penulis program magang dan study banding yang dilakukan oleh beberapa pengusaha dan pengrajin ini bertujuan untuk mengetahui proses produksi usaha yang sejenis dengan usaha mereka di Desa Banmaleng khususnya dalam hal proses penyepuhan yang lebih baik lagi. Program ini dibiayai oleh Departemen koperasi dan UKM melalui dinas yang ada di kabupaten Sumenep. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh H. Opay selaku peserta study banding ke daerah Bali selama tiga hari. Menurutnya dari hasil kegiatannya tersebut dirinya memperoleh banyak pengalaman dan ilmu yang baru. Ilmu yang diperoleh dari hasil kegiatannya bersama rekan-rekannya itu kemudian akan ditularkan kepada para pengusaha dan pengrajin yang ada di Desa Banmaleng.⁵⁷

Dengan demikian menurut pendapat penulis, program magang dan pelatihan yang telah dilakukan oleh H. Opay beserta rekan-rekannya itu merupakan proses pencarian ilmu dan wawasan bagi kemajuan usaha industri pembuatan asesoris. Dengan bertambahnya ilmu yang di dapat oleh para pengusaha dan pengrajin itu, proses peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah bertambahnya

⁵⁷ Wawancara dengan H. Opay ketua pengrajin yang berangkat study banding ke bali

ilmu dan skill yang dimiliki yang dapat dijadikan modal guna memperoleh kesejahteraan ekonomi.

Tabel 6
Daftar Peserta Study Banding

No	Nama Peserta	Status	Kota Tujuan
1	H. Opay	Ketua Pengrajin Desa Banmaleng	Bali
2	Jaenudin	Pengrajin	Bali
3	Cahyono	Pengrajin	Bali
4	H. Kahfi	Pengrajin	Bali
5	Syarifuddin	Pengrajin	Bali

Sumber: Data hasil observasi dan wawancara

Sementara menurut bapak Jaenudin study banding yang dilakukan bersama rekan-rekannya tersebut merupakan modal yang sangat berharga bagi kemajuan usaha kerajinan di bidang industri asesoris. Mengingat Bali merupakan kota yang terkenal dengan seni kerajinan peraknya.⁵⁸ Dengan demikian menurut analisa penulis ada hubungan positif dari kegiatan study banding dengan upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, sebab ilmu yang didapat merupakan modal usaha yang berharga bagi keberhasilan usaha mereka.

⁵⁸ Wawancara dengan bapak jaelani peserta study banding ke bali

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Program peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang telah dilakukan pemerintah Desa Banmaleng sebagaimana yang penulis utarakan antara lain adalah program mengaktifkan program PKK yang berhubungan dengan proses peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Banmaleng dengan jalan memberikan pelatihan dan keterampilan bagi kaum wanitanya, sedangkan bagi kaum laki-laki, pemerintah Desa Banmaleng memberikan pelatihan dan penyuluhan kewirausahaan khususnya kepada masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha dan pengrajin industri asesoris.

Program-program tersebut akan terus dilaksanakan sejalan dengan perkembangan dan kemajuan jaman. Pemerintah dalam hal ini perangkat Desa dituntut untuk selalu berperan aktif dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga tercapai suatu tatanan masyarakat yang ideal. Program peningkatan kesejahteraan akan selalu ditingkatkan dan dievaluasi. Tidak ada kata menyerah untuk selalu berbuat ke arah yang positif, sebab kemiskinan akan ada selama manusia ada di bumi ini.

Oleh sebab itu diperlukan kerja sama yang baik antara perangkat Desa dengan masyarakat guna memerangi kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang sejahtera dalam arti yang lebih luas lagi. Pemerintah dalam

hal ini hanyalah bertindak sebagai fasilitator, mengarahkan masyarakat agar dapat mandiri, meningkatkan kapasitas skill yang ada dalam diri masyarakat.

Kita boleh saja berbangga hati sebab Indonesia sudah merdeka semenjak 73 tahun lalu, tapi sejatinya kemerdekaan yang hakiki masih terus diperjuangkan. Masalah kemiskinan, kebodohan dan pengangguran hingga kini masih menjadi agenda perjuangan rakyat dan bangsa. Peran pemerintah dalam menangani masalah tersebut masih diupayakan sehingga cita-cita masyarakat dan rakyat yang sejahtera dapat terwujud. Begitu pula yang kini dialami oleh pemerintah Desa Banmaleng, terus berjuang mengentaskan masyarakatnya menjadi masyarakat yang sejahtera melalui upaya-upaya yang terarah dan terprogram.

B. SARAN

Upaya pemerintah Desa Banmaleng dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui program penyuluhan, pelatihan dan pemberian bantuan usaha di bidang kewirausahaan industri pembuatan asesoris dan pembagian beras miskin merupakan bentuk usaha pemerintah Desa Banmaleng dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Mungkin kiranya bermanfaat penulis menyarankan khususnya kepada pihak pemerintah Desa Banmaleng agar pemerintah Desa Banmaleng lebih meningkatkan kinerjanya dan lebih memperbanyak lagi program-program yang tujuannya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.

Berbagai program yang tidak begitu penting sebaiknya dihilangkan dan digantikan dengan program-program yang memiliki prospek yang lebih

berguna bagi masyarakatnya. Selanjutnya di sisi masyarakatnya, masyarakat juga harus lebih tanggap lagi bahwa program yang dilakukan oleh pemerintah Desa Banmaleng tidak semata-mata proyek rutin yang dijalankan agar bisa dikatakan pemerintah punya agenda, tetapi jauh dari itu, bahwa program yang diselenggarakan pemerintah Desa Banmaleng adalah bersumber dari kesungguhan dan perhatian pemerintah terhadap masyarakat dan rakyatnya dalam sekup yang kecil yakni pada tataran Desa.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat hendaknya tidak bertolak dari anggaran dana pemerintah semata, kedepannya harus ada penggalian dana secara swadaya guna membiayai program pengembangan dan peningkatan sumber daya masyarakat Desa. Masyarakat Desa kedepannya harus mampu berdikari dalam menciptakan sesuatu yang berguna bagi Desa banmaleng.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, H. M, *Psikologi Dakwah Suatu Pengantar Studi*, (Jakarta: Bumi Aksara 1994).
- Arifin, Tajul, *Pengantar Studi Sosiologi*, (Bandung: Ari and Brother 1995).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta 1997).
- Danim, Sudarman, *Transformasi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara 1995).
- Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta: 2002).
- Departemen Dalam Negeri RI, *Rencana Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa*, (Jakarta: Penebar Swadaya 1996).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1990), cet. Ke-3
- Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, *Modul Keluarga Sejahtera*.
- Hakim Atang Abdul, Mubarak Jaih, *Metode Studi Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya 2000).
- Himpunan Materi Penyuluhan Hukum Bagi Perangkat Desa, tahun 2015.
- Himpunan Pedoman Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, tahun 2015
- Himpunan Peraturan Pemerintah Desa Banmaleng, Tahun 2015.
- Kahmad, Dadang, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Remaja Rosada Karya 2002).
- Mansur, Cholil, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya: Usaha Nasional).
- Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karya 2002). Cet. Ke-13
- Muhyidin Asep, Syafi'i Agus Ahmad, *Metode Pengembangan Dakwah*, (Bandung: Pustaka Setia 2002).
- Muhyidin, Asep, Syafi'i Agus Ahmad, *Metode Penelitian Dakwah*, (Bandung: Pustaka Setia 2003).

Narbuko Cholid, Achmad Abu, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara 1999).

Ndraha Taliziduhu, *Dimensi-Dimensi Pemerintah Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara 1991), Cet. Ke-3

Rahman Fazlur, *Tema Pokok Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka 1980).



MATRIK PENELITIAN

MASALAH PENELITIAN	PERTANYAAN PENELITIN	VARIABEL	INDIKATOR
<p>Ditengah himpitan ekonomi dan melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok, masyarakat Desa Banmaleng mampu bertahan hidup dengan mengembangkan berbagai usaha rumahan, seperti usaha mebeler, produksi batik dan lain-lain. Berbagai usaha tersebut, sayangnya tidak cukup menjadi perhatian pemerintah desa setempat. Pemerintah seolah meyerahkan persoalan yang dihadapi kepada warganya sendiri tanpa ada trobosan berarti. Akibatnya, masyarakat berusaha mandiri dengan segala keterbatasan mereka untuk tetap memenuhi kebutuhan keseharian. Berangkat dari fenomena di atas, yang menjadi masalah penelitian (research probem) ini adalah sebagai berikut: Mengapa masyarakat mampu mempertahankan perekonomian mereka di tengah kebutuhan dan harga-harga semakin meningkat, padahal pemerintah desa tidak peduli dengan persoalan warganya?.</p>	<p>1. Bagaimana Strategi masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dengan usaha rumahan</p>	Bertani	
		Mencari pinjaman	
		Berjualan seadanya	
	<p>2. Apa strategi yang dilakukan masyarakat untuk mengembangkan usaha rumahan agar memenuhi kebutuhan</p>	Menambah modal usaha	
		Pemasaran	
		Menjalin Kerjasama	
	<p>3. Apa kontribusi pemerintah desa dalam pegembangan usaha yang dilakukan warganya terhadap produk usaha warganya</p>	Pendampingan masyarakat	Penyuluhan Bengkel kerja Pelatihan skill
		Mencari distributor	

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irwan Hidayat
NIM : 082144014
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Kemandirian Masyarakat Desa Banmaleng Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonominya Tanpa Bantu Pemerintah Desa*" adalah hasil dari penelitian/karya sendiri.

Bagian atau data tertentu yang saya peroleh dari Perusahaan atau Lembaga dan/atau saya kutip dari hasil karya orang lain telah di tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dngan kaidah penulisan karya ilmiah.

Jember, 23 November 2020
Saya yang menyatakan

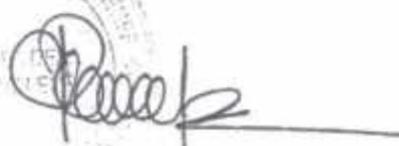


Irwan Hidayat
NIM. 082144014

**JURNAL KEGIATAN
DI DESA BANMALENG KECAMATAN GILI GENTING
KABUPATEN SUMENEP**

NO	TANGGAL	KEGIATAN	TANDA TANGAN
1	08 Juni 2017	Penyerahan surat penelitian kepada Kepala Desa Banmaleng	
2	14 Juni 2017	Wawancara dengan Kepala Desa Banmaleng	
3	17 Juni 2017	Wawancara dengan bapak H. Tandi	
4	20 Juni 2017	Wawancara dengan bapak Hermawan Darma	
5	27 Juni 2017	Wawancara dengan H. Asraruddin	
6	04 Juli 2017	Wawancara dengan H. Opay	
7	10 Juli 2017	Wawancara H. Kahfih	
8	15 Juli 2017	Wawancara dengan bapak Cah Yono	
9	17 Juli 2017	Melanjutkan penelitian yang kurang	
10	24 Februari 2020	Pengambilan keterangan penelitian surat selesai	

Banmaleng, 24 Februari 2020
Kepala Desa Banmaleng



RAMLI



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN GILIGENTING
DESA BANMALENG

Jalan Raya Asta Agung Demang No. 10 HP. 087886896888

BANMALENG

Kode Pos 69482

SURAT KETERANGAN

Nomor : 36 /435.309.108/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAMLI
Jabatan : Kepala Desa Banmaleng Kec.Giligenting Kab.Sumenep

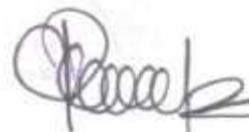
Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : IRWAN HIDAYAT
Tempat & Tgl.Lahir : Sumenep, 05 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Dusun Sokarammi Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep

Bahwasanya orang tersebut benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep..

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banmaleng, 24 Februari 2020
Kepala Desa Banmaleng


RAMLI

DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Kepala Desa Bapak Romli



Wawancara dengan h. Tandi



wawancara dengan bapak cah yono



Wawancara dengan Asra ruddin

BIODATA

Nama : Irwan Hidayat
NIM : 082144014
Tempat-tanggal-lahir : Sumenep, 07 Juli 1995
Alamat : Banmaleng - Gili Genting - Sumenep - Madura
Jurusan/Prodi : Dakwah / Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
No.Telp : 087765792374

RIWAYAT PENDIDIKAN

- ❖ MI Sabilul Huda (2008)
- ❖ MTS Sabilul Huda (2011)
- ❖ SMAI Sabilul Huda (2014)
- ❖ UIN KH. ACHMAD SHIDDIQ (2020)

PENGALAMAN ORGANISASI

- ❖ Ketua Litbang UKPK IAIN Jember 2016/2017
- ❖ Departemen Penelitian, Pengembangan dan Pembinaan HMI Cabang Jember
Komisariat Sunan Ampel 2018/2019
- ❖ Kabid Pengembangan Instruktur dan Kurikulum BPL HMI Cabang Jember
2018/2019
- ❖ Ketua Umum BPL HMI Cabang Jember 2019/2020

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- ❖ Latihan Kader I (*Basic Training*) HMI Cabang Jember
- ❖ Latihan Kader II (*Intermediate Training*) HMI Cabang Karawang
- ❖ Latihan Kader III (*Advance Training*) HMI Badko Jawa Barat
- ❖ Pelatihan Instruktur Tingkat Dasar (PITD)
- ❖ Pelatihan Senior Course (SC)
- ❖ Training of Trainer (NDP)

**KEMANDIRIAN MASYARAKAT DESA BANMALENG
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
EKONOMINYA TANPA BANTU PEMERINTAH DESA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)



Oleh :

IRWAN HIDAYAT
NIM. 082 144 014

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
DESEMBER 2020**

**EMANDIRIAN MASYARAKAT DESA BANMALENG DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN EKONOMINYA TANPA BANTU PEMERINTAH DESA**

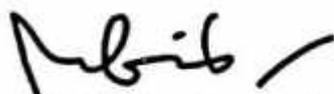
SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Oleh :

Irwan Hidayat
NIM. 082144014

Disetujui Pembimbing :



Muhibbin, S.Ag, M.Si
NIP. 19711110 200003 1 018

**KEMANDIRIAN MASYARAKAT DESA BANMALENG DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMINYA TANPA BANTU
PEMERINTAH DESA**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Hari : Senin
Tanggal : 09 November 2020

Tim Penguji :

Ketua



Fuadatul Hudaibiyah, M.Si
NIP. 19750524 200003 2 002

Sekretaris



Arrumaisha Fitri, M.Psi
NIP. 19871223 201903 2 005

Anggota :

1. Dr. H. Hepni, MM
2. Muhibbin, S.Ag., M.Si



Menyetujui,
Dekan Fakultas Dakwah




Ahidul Asror, M. Ag
NIP. 19740606 200003 1 003

MOTTO

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

Artinya: “Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukur kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.”(QS. Al-Baqorah: 152).¹



¹ Departemen Agama RI, AlQur'an dan Terjemahan As-Salam, (Jakarta: AlHuda. 2015), 24

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar, Nabi Muhammad S.A.W., kupersembahkan sebuah kebahagiaan dalam perjalanan dan perjuangan hidupku teriring rasa terima kasihku yang terdalam kepada:

1. Ayahanda tercinta Fusairi yang senantiasa memberikan kasih sayang, luapan cinta dan naungan doa tiada henti untuk kesuksesan dan keselamatanku di dunia dan akhirat. Ibunda tercinta Zainab terima kasih atas doa, semangat, dukungan dan kasih sayang yang selalu diberikan.
2. Guru yang luar biasa di PP. Sabilul Huda yang telah menjadi partner mengajar Ridha ilahi dan telah mengajarku tegaknya alif sampai banyak hal
3. Saudara kandung saya Mulyadi Abadi. Ema Syafitri S. Pd dan adik Albaroah S.Pd makasih atas doa kalian dan motivasi kalian untukku.
4. Terima kasih kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jember khususnya Komisariat Sunan Ampel IAIN Jember, tempat menampung segala gagasan dan pemikiranku lengkap dengan keluh kesahku. Tempat yang membentuk jiwa visioner makasih.
5. Teman-teman Angkatan 2014, Kelas PMI dan teman-teman yang selalu mendoakan, membantu, dan memberi semangat, serta selalu merangkai momen-momen indah selama masa perkuliahan.
6. Terima kasih juga untuk semua pemberi semangat dan dukungan doa hingga terselesainya tugas ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Kemandirian Masyarakat Desa Banmaleng Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonominya Tanpa Bantu Pemerintah Desa” dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM. Rektor IAIN Jember,
2. Bapak Dr. Ahidul Asror, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam IAIN Jember,
3. Bapak H. Zainul Fanani, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Pemberdayaan Masyarakat Islam
4. Ibu Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom selaku Wakil Dekan Bidang Akademik 1 Fakultas Dakwah IAIN Jember yang telah membimbing kami.
5. Bapak Muhibbin, S.Ag, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan waktu dan kesabarannya dalam membimbing selama penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas Akademik IAIN Jember yang telah membekali ilmu pengetahuan dan teknologi kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan studi di Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam.

7. Seluruh dosen, karyawan dan staf Fakultas Dakwah, khususnya yang berada di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya serta pelayanan akademik yang baik selama ini bagi penulis.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin

Jember, 10 Desember 2020

Penulis



ABSTRAK

Irwan Hidayat, 2020 : *Kemandirian Masyarakat Desa Banmaleng dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonominya Tanpa Bantu Pemerintah Desa.*

Ditengah himpitan ekonomi dan melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok, masyarakat Desa Banmaleng mampu bertahan hidup dengan mengembangkan berbagai usaha rumahan, seperti usaha mebel, produksi batik dan lain-lain. Berbagai usaha tersebut, sayangnya tidak cukup menjadi perhatian pemerintah desa setempat. Pemerintah seolah meyerahkan persoalan yang dihadapi kepada warganya sendiri tanpa ada trobosan berarti. Akibatnya, masyarakat berusaha mandiri dengan segala keterbatasan mereka untuk tetap memenuhi kebutuhan keseharian. Berangkat dari fenomena di atas, yang menjadi masalah penelitian (research problem) ini adalah sebagai berikut: Mengapa masyarakat mampu mempertahankan perekonomian mereka di tengah kebutuhan dan harga-harga semakin meningkat, padahal pemerintah desa tidak peduli dengan persoalan warganya?

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1). Bagaimana Strategi Masyarakat Memenuhi Kebutuhan Dasar Dengan Usaha Rumahan? 2). Apa Strategi Yang Dilakukan Masyarakat Untuk Mengembangkan Usaha Rumahan Agar Memenuhi Kebutuhan? Apa Kontribusi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Usaha Yang Dilakukan Warganya Terhadap Produk Usaha Warganya ?

Tujuan penelitian ini 1). Untuk mengetahui tahapan proses Strategi Masyarakat Memenuhi Kebutuhan Dasar Dengan Usaha Rumahan. 2). Untuk mengetahui strategi yang dilakukan masyarakat untuk mengembangkan usaha rumahan agar memenuhi kebutuhan. 3). Untuk mengetahui kontribusi pemerintah desa dalam pengembangan usaha yang dilakukan warganya terhadap produk usaha warganya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif dengan jenis penelitiannya adalah studi lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumenter. Teknik subyek penelitian menggunakan teknik *purposive* Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, teknik atau metode, dan diskusi sejawat.

Hasil dari penelitian ini yaitu 1). Strategi masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dengan usaha rumahan. 2). Strategi yang di lakukan masyarakat untuk mengembangkan usaha rumahan agar memenuhi kebutuhan. 3). Kontribusi pemerintah desa dalam pengembangan usaha yang dilakukan warganya terhadap produk usaha warganya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Dan Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	12
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	56

B. Lokasi Penelitian	56
C. Subyek Penelitian	56
D. Metode Pengumpulan Data	57
E. Teknik Analisa Data	58
F. Keabsahan Data	58
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	60
A. Gambaran Objek Penelitian	60
B. Penyajian Data dan Analisis	68
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Halaman
Tabel 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Banmaleng	66
Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa banmaleng...	67
Tabel 3 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Banmaleng	67
Tabel 4 Urutan Tingkat Pendidikan Masyarakat	70
Tabel 5 Data Penerimaan Bantuan Modal Usaha Bergulir Desa Banmaleng	87
Tabel 6 Daftar Peserta Study Banding	90



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia sebagian besar masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan, yang hidupnya belum mencapai angka standar kemanusiaan atau belum sejahtera. Tidak sedikit diantaranya keluarga-keluarga yang tidak dapat menyekolahkan anak-anaknya karena menyangkut masalah ekonomi, bahkan masih banyak keluarga-keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya karena mereka tidak bekerja dan tidak memiliki keahlian.

Keluarga yang belum sejahtera tersebut hanya berharap khususnya kepada para pemerintah untuk memberikan bantuan yang berupa lapangan pekerjaan yang sangat mereka butuhkan karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Salah satunya adalah masyarakat desa yaitu masyarakat yang lingkupnya paling terkecil dalam tatanan pemerintahan.

Dalam masyarakat desa, peran kepala desa sangatlah penting demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, kepala desa haruslah orang yang betul-betul peduli terhadap nasib rakyatnya. Kepala desa yang dipilih langsung oleh rakyatnya, diberikan amanat agar dapat betul-betul bisa berperan sebagai pemerintah sekaligus kepala masyarakat yang banyak tantangannya karena seorang kepala desa berhubungan langsung dengan masyarakatnya.

Tantangan terbesar yang harus dihadapi adalah membebaskan rakyat dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan serta belenggu yang menghambat perkembangan kemampuan bangsa. Tantangan dan persoalan yang di hadapi rakyat kita atasi bersama-sama, karena pemerintah tidak mungkin bisa mengatasi tantangan dan persoalan bangsa saat ini tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat serta seluruh komponen bangsa.

Apabila peran serta masyarakat dalam usaha-usaha kesejahteraan telah berlangsung secara melembaga dan terorganisasikan serta telah lebih besar dari peran pemerintah, sedangkan peran pemerintah lebih mengutamakan pada pelaksanaan fungsi-fungsi pengaturan dan pengawasan sedemikian rupa, sehingga masyarakat menjadi pangkal pertama dan utama dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan di lingkungannya.

Masalah di atas merupakan masalah sosial yang senantiasa muncul di tengah kehidupan masyarakat. Hal ini merupakan suatu penyimpangan dari norma dan moral yang berlaku di masyarakat pada satu pihak, sementara dipihak lain ingin menjunjung tinggi norma dan moral bangsa.¹

Kesejahteraan dan kebahagiaan merupakan cita-cita manusia. Untuk mencapai cita-cita tersebut manusia melaksanakan berbagai cara dan upaya yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai komponen utama kesejahteraan. Di samping itu banyak faktor pendukung untuk mencari cita-cita tersebut hingga kesejahteraan masyarakat secara lahiriah mungkin dapat diukur dengan pemenuhan kebutuhan hidup, sedangkan tingkat kebahagiaan

¹ Radar Madura, *Edisi* 21 Oktober. 2017

tidak dapat diukur secara nyata karena relatif, namun mempunyai kaitan dengan tingkat kesejahteraan.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut antara lain terbukti dalam Undang-undang No. 13 / 1998 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan masyarakat, Undang-undang No. 22 / 1999 tentang pokok-pokok pemerintah daerah juga diperkuat oleh keputusan Menteri Sosial dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Masyarakat tentang pola dasar pembangunan bidang kesejahteraan.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan sosial dan ajaran-ajaran tentang kesejahteraan sebagai suatu pembangunan yang memiliki tujuan dimensi kemanusiaan dan merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional.

Pemerintah Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep adalah salah satu dari instansi pemerintah yang memiliki wewenang mengurus persoalan kesejahteraan masyarakat yang meliputi daerah wilayahnya yang terdiri dari 18 Rukun Tetangga (RT) dan 6 Rukun Warga (RW).

Sementara itu dalam kaitannya dengan upaya mensejahterakan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa banmaleng, berdasarkan studi pendahuluan diperoleh fenomena yang cukup menarik untuk diteliti. Dari hasil studi pendahuluan diketahui bahwa ada sebagian komponen masyarakat desa banmaleng yang tidak dapat menikmati hakikat dari

kesejahteraan. Masalah-masalah yang ada pada masyarakat antara lain kekurangan sarana pelayanan umum dan sosial, serta kekurangan sandang, pangan dan papan, kekurangan memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta masalah-masalah lain yang menyangkut masalah pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, perhubungan dan lain sebagainya. Hal tersebut menunjukkan belum meratanya kesejahteraan pada masyarakat di wilayah desa banmaleng. Ada sebagian masyarakat yang sudah mendapatkan kesejahteraan, tetapi apakah kesejahteraan yang didapat merupakan hasil kerja pelaksanaan program yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Desa Banmaleng.

Penyelenggaraan program-program pembangunan kesejahteraan menuntut adanya tanggung jawab bersama. Tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk keterlibatan peranan semua pihak khususnya pemerintah Desa Banmaleng berupa pemberian dukungan serta pengarahannya daya pikir, tenaga dan lain-lain. Upaya ini menuntut kemahiran mobilisasi semaksimal mungkin potensi masyarakat guna meningkatkan harkat dan martabat dari kehidupan masyarakat yang dinamis.

Penanggulangan terhadap masalah kesejahteraan di wilayah desa banmaleng bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat desa banmaleng. Pada kali ini peneliti yang memang menjabat sebagai kaur pemerintah desa banmaleng, ingin mengetahui lebih jauh tentang kemandirian masyarakat dalam menangani masalah-masalah tersebut. Sehingga muncul sebuah judul penelitian yaitu :**“KEMANDIRIAN**

MASYARAKAT DESA BANMALENG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI-NYA TANPA BANTU PEMERINTAH DESA.”

B. Pembatasan Dan Fokus Penelitian

1. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi pada kemandirian masyarakat desa banmaleng dalam meningkatkan kesejahteraan ekonominya masyarakat khususnya di bidang ekonomi dan pendidikan.

2. Fokus Penelitian

Dengan melihat pembatasan masalah di atas, maka fokus penelitian yang penulis angkat adalah :

- 1) Bagaimana Strategi masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dengan usaha rumahan.?
- 2) Apa strategi yang dilakukan masyarakat untuk mengembangkan usaha rumahan agar memenuhi kebutuhan.?
- 3) Apa kontribusi pemerintah desa dalam pengembangan usaha yang dilakukan warganya terhadap produk usaha warganya.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah ang telah dirumuskan sebelumnya.²

²Tim Penyusun IAIN Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (Jember: IAIN Jember Pres, 2017), 45.

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Strategi masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dengan usaha rumahan.?
2. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan masyarakat untuk mengembangkan usaha rumahan agar memenuhi kebutuhan.?
3. Untuk mengetahui kontribusi pemerintah desa dalam pengembangan usaha yang dilakukan warganya terhadap produk usaha warganya.?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan civitas akademika IAIN Jember, Khususnya jurusan pengembangan masyarakat islam.
2. Bagi tempat penelitian, dapat memberikan informasi yang akurat mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di desa banmaleng dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
3. Bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan, penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan penelitian lebih lanjut.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan definisi operasional berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian.

1) Pengertian Pemerintah Desa

Setiap lembaga atau organisasi disadari atau tidak berjalan kearah tertentu. Pernyataan yang luas mengenai arah yang disadari (dikehendaki)

disebut tujuan (goal). Untuk mencapai tujuan diperlukan kekuasaan atau power. Setiap orang yang bertanggung jawab dalam hal penggunaan (*exercising power*) disebut *government*.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia istilah *government* dapat diartikan pemerintah dan dapat pula diartikan pemerintah.³

Istilah pemerintahan berasal dari kata perintah berarti perkataan yang bermaksud menyuruh atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah.

Istilah pemerintah di dalam undang-undang 1945 tercantum di dalam alinea ke empat pembukaan :

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁴

2) Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan kata yang termasuk bahan kajian morfologi. Morfologi ialah bagian dari ilmu yang membicarakan seluk beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Sehingga kata kesejahteraan itu merupakan kata yang telah mendapatkan awalan Ke- dan akhiran -an.

Sedangkan morfem dasar dari kesejahteraan yaitu sejahtera.

³Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka: Jakarta 1988)

⁴ Undang-Undang Dasar 1945 Alinea-4

Dalam membahas pengertian kesejahteraan itu, tentu itu harus diketahui dahulu tentang pengertian sejahtera. Sejahtera menurut W.J.S Poerwadarmita adalah “Aman, sentosa dan makmur (terlepas dari segala yang mengganggu ketentraman dan sebagainya)” sehingga arti kesejahteraan itu meliputi keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup dan sebagainya) dan kemakmuran.⁵

Menurut shihab, kata “sejahtera” dalam kamus besar bahasa indonesia adalah “Aman, sentosa dan makmur, selama (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya.”⁶ Dengan demikian kesejahteraan sosial merupakan keadaan masyarakat yang sejahtera.

3) Pengertian Masyarakat

Masyarakat dalam bahasa inggris disebut society, asal katanya socius yang berarti kawan. Dalam bahasa arab yaitu syirk, artinya bergaul.⁷ Dalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan bahwa masyarakat adalah “sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh satuan kebudayaan yang mereka anggap sama.” Tajul arifin mengemukakan bahwa masyarakat itu adalah “sekelompok manusia yang memiliki kebiasaan, ide dan sikap yang sama, hidup didaerah tertentu, menganggapnya kelompok sosial yang berinteraksi.”⁸

Menurut koentjaraningrat masyarakat adalah “kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang

⁵ W.J.S. Poerwadarmita, *Pengertian Kesejahteraan Manusia*, (Bandung: Mizan 1996), h, 126

⁶ M Quraisy Shihab, *Wawasan Al-qur'an, Tafsir Mandhu'I Atas Pelbagai Persoalan Umum*, (Bandung: Mizan 1996), h. 127

⁷ Munandar Sulaiman, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: PT. Enesco 1993), h. 63

⁸ Tajul Arifin, *Pengantar Study Sosiologi*, (Bandung: Rosda Karya 1995), h. 41

bersifat kontinyu, dan terikat oleh suatu rasa solidaritas bersama.”

⁹Sedangkan menurut para ahli sosiologi dalam bukunya M. Cholil Mansyur

“Sosiologi masyarakat kota dan desa” dijelaskan bahwa masyarakat adalah

- a. Hasan Shadily, masyarakat adalah golongan besar atau kecil dari beberapa manusia, yang dengan sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh satu sama lain.
- b. M.M. Djojodigoe, masyarakat adalah mempunyai arti sempit dan arti luas. Arti sempit: masyarakat adalah yang terdiri dari suatu golongan saja, misalnya masyarakat india, arab dan china. Sedangkan arti luasnya: masyarakat adalah kebulatan dari semua penghubung yang mungkin dalam masyarakat, jadi meliputi semua golongan. Misalnya masyarakat surabaya yang terdiri dari masyarakat hindia, arab, china dan pelajar.
- c. P.J. Bouman, masyarakat adalah pergaulan hidup yang akrab antara manusia, di persatukan dengan cara tertentu oleh hasrat-hasrat kemasyarakatan mereka.
- d. A. Lysen, masyarakat adalah hubungan antara kekuatan-kekuatan dari bentuk-bentuk masyarakat dan kehidupan individu.¹⁰

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.¹¹

⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru 1990), h. 147

¹⁰ M. Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota & Desa*

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press), 2017), 48

Berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini;

Bab 1 Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika pembahasan. Serta akan dijelaskan secara menyeluruh oleh peneliti.

Bab II Kajian Keperpustakaan, dalam bab ini berisi tentang kajian terdahulu dan kajian teori, yang erat kaitannya dengan masalah yang dilakukan peneliti.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis Data, bab ini penyajian data dan analisis yang meliputi gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini peneliti akan mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Dengan melakukan hal ini maka akan tampak sejauh mana orisinilitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan adalah:

Mohammad Karmein Moidady dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Jurusan Ilmu Pemerintahan, dengan judul “Kinerja Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Pelayanan Desa Yang Berkualitas” (Suatu Penelitian Deskriptif Di Desa Selomar-Tari Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006).

Menurut Mohammad Karmein Moidady, “Bahwa pemerintah merupakan pelayanan masyarakat (*Public Servis*) sudah seharusnya memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan yang berkualitas selain bermanfaat bagi masyarakat juga bermanfaat terhadap citra aparat pemerintahan sendiri yang salah satunya yaitu pemerintahan desa. Kualitas aparatur pemerintahan kepada masyarakat merupakan tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktifitas dari sistem kemampuan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan dalam mendorong, menumbuhkan serta

memberikan pengayoman terhadap prakarsa dan pemenuhan kebutuhan pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.

Dalam penelitian karya ilmiah di atas lebih memaparkan tentang kualitas aparatur pemerintahan. Berbeda dengan peneliti yang penulis lakukan ini lebih memaparkan bagaimana kemandirian masyarakat desa banmaleng dalam meningkatkan kesejahteraan ekonominya tanpa bantu pemerintah desa terutama dibidang ekonomi dan sosial.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Pemerintah Desa

Setiap lembaga atau organisasi disadari atau tidak berjalan kearah tertentu. Pernyataan yang luas mengenai arah yang disadari (dikehendaki) disebut tujuan (goal). Untuk mencapai tujuan diperlukan kekuasaan atau power. Setiap orang yang bertanggung jawab dalam hal penggunaan (exerasing power) disebut goverment.

Dalam kamus besar bahasa indonesia istilah goverment dapat diartikan pemerintah dan dapat pula diartikan pemerintah.

Istilah pemerintahan berasal dari kata perintah berarti perkataan yang bermaksud menyuruh atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah.

Istilah pemerintah di dalam undang-undang 1945 tercantum di dalam alenia ke empat pembukaan :

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan pernyataan tersebut dapat diambil dua pengertian; (1) Pemerintah dan (2) Yang diperintah. Pemerintah dalam hal ini adalah segenap alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional.

Istilah pemerintah mempunyai arti yang bersifat relatif, istilah pemerintah negara indonesia dapat diartikan pemerintah dalam arti terluas, sedangkan pemerintah itu sendiri adalah pemerintah dalam arti sempit. Selain dari itu ada pengertian pemerintah dalam konteks lainnya, yakni yang dimaksud pemerintah daerah, yaitu kepala daerah dan DPRD. Jadi dalam arti luas, DPRD atau lembaga legislatif juga disebut unsur pemerintah.

Untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas, pemerintah menata dirinya secara horizontal dan secara vertikal dan penataan tersebut dilakukan dengan jalan fungsionalisasi dan departementalisasi.

Berbeda dengan skema jaman orde baru, skema pemerintah desa di jaman otonomi lebih di tandai oleh suatu skema yang pling otonom, dimana desa tidak menjadi bawahan langsung kecamatan sebagaimana dalam UU No. 22 Tahun 1999 pemerintah desa akan terdiri dari :

- Desa, yakni kepala desa dan perangkatnya.
- Badan perwakilan yang merupakan parlemen ditingkat desa.

Adapun yang paling penting dari skema perubahan ini adalah terjadinya pemisah fungsi legislatif dan eksekutif, sehingga pemerintah desa dapat dikontrol dan diawasi oleh Badan Perwakilan Desa (BPD).¹²

Dalam penelitian ini penulis menitik beratkan pada pemerintah desa, karena pemerintah desa merupakan persekutuan terkecil, pemerintah desa memiliki otonom yang bersifat tradisional. Beberapa undang-undang tentang pemerintah daerah tidak menyebutkan secara luas definisi otonom pemerintahan desa, namun dapat disusun definisi mengenai otonom desa yaitu sebagai berikut:

Otonom pemerintah desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang muncul bersamaan dengan terbentuknya persekutuan masyarakat hukum yang lebih luas dan tinggi tingkatannya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan kesatuan masyarakat hukum yang bersangkutan.¹³

Berkembangnya tuntutan reformasi dan aspirasi menjelang S1 (Sidang Istimewa) tahun 1999, maka agenda sidang S1 bukan saja membahas perubahan jadwal pemilihan umum tetapi juga membahas tentang perlu adanya ketetapan-ketetapan MPR baru untuk menampung dan menyalurkan aspirasi tersebut termasuk diantaranya ketetapan baru tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Ketentuan ini memberi arti

¹² *Majalah Parlemen*, Edisi 32, November 2015

¹³ Sedu Warsistiono, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, (Bandung: CV. Puskomedia 2003), h. 59

bahwa undang-undang yang ada yang mengatur otonomi daerah dan pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah, yaitu undang-undang Nomor 5 tahun 1974 sudah tidak memadai lagi dan sudah diganti.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dinyatakan, pemerintah desa adalah sistem menjalankan dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya, atau sekelompok orang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan.¹⁴ Sedangkan pengertian desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah kelompok yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.¹⁵

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan di atas, maka peneliti mendefinisikan pengertian pemerintah desa itu sebagai sistem yang mengatur jalannya kehidupan ekonomi, sosial dan politik dan budaya masyarakat yang berbeda dibawah camat untuk tujuan yang diinginkan berdasarkan undang-undang dasar 1945 dan pancasila.

Adapun menurut beberapa pendapat, pengertian pemerintah desa dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Menurut unang suparjo dalam bukunya pemerintah desa dan kelurahan menyatakan:

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat atau hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya. Memiliki ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat baik

¹⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1995), h. 756

¹⁵ *Ibid*, h. 226

karena keturunan maupun kepentingan politik, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama memiliki kebudayaan alam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.¹⁶

- b. Berdasarkan undang-undang tentang pemerintah daerah dari Negara kesatuan RI yaitu undang-undang No. 22/1999 pasal 1, kalimat pertama memberikan rumusan sebagai berikut:

Desa adalah wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara kesatuan RI.¹⁷

Dari perumusan di atas, bahwa Desa adalah suatu wilayah, akan tetapi semua wilayah tidak semua disebut Desa. Dengan kata lain ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar wilayah menjadi Desa. Jadi suatu wilayah tersebut harus diduduki atau ditempati oleh sejumlah penduduk. Wilayah yang tidak ada penduduknya tidak dapat disebut Desa. Penduduk itu tidak sekedar bertempat tinggal di daerah dan tidak asal penduduk saja, akan tetapi harus merupakan suatu kesatuan dalam masyarakat. Tidak semua kesatuan dalam masyarakat dapat dipandang sebagai unsur penentu wilayah pemerintah yang terendah yang berada langsung di bawah

¹⁶ Unang Suparjo, *Pemerintah Desa dan Kelurahan*, tahun 1981, h. 11

¹⁷ Bayu Surianingrat, *Pamong Praja dan Kepala Wilayah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 10

Camat. Organisasi pemerintah yakni yang menjadi wilayah Desa harus merupakan wilayah Kecamatan. Dengan kata lain wilayah Kecamatan terdiri dari beberapa bagian, wilayah Desa harus ditentukan besarnya. Batasan Desa pada umumnya berupa batasan alam, misalnya kali, sungai, pegunungan, pesawahan, atau berupa jalanan.

Berdasarkan undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah Desa menjelaskan bahwa pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Dalam mencapai tujuan pembangunan Desa yang berhasil dengan baik. Terutama dalam kesejahteraan masyarakat, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh aparat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, kepala-kepala dusun, RT, RW dan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatannya dengan para ulama dan tokoh masyarakat. Menurut analisis penulis, pemerintah itu dapat diartikan suatu kerja sama diantara beberapa orang untuk mencapai tujuan dengan mengadakan pembagian dan peraturan kerja. Dan yang menjadi ikatan kerja sama dalam organisasi adalah tercapainya tujuan secara efektif dan efisien.

Bila disimpulkan, maka pemerintah Desa adalah suatu badan dalam organisasi Desa yang memiliki fungsi dan tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan dengan dilengkapi oleh sistem administrasi dan manajemen yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta menggerakkan masyarakat Desa untuk

dapat berpartisipasi semaksimal mungkin untuk membangun warganya, maupun membangun Bangsa dan Negara.

Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan pemerintah Desa, sebagaimana yang tertuang dalam keputusan Menteri Dalam Negeri NO. 64 tahun 1999 tentang pedoman umum pengaturan mengenai Desa, adalah “Kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa”. Dalam pelaksanaan tugasnya pemerintah Desa dibantu oleh perangkat Desa, sedangkan Badan Perwakilan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang pedoman Umum Pengaturan Keputusan Mengenai Desa).

Maka dapat dikatakan lebih lanjut, bahwa yang dimaksud dengan pemerintah Desa adalah “Satuan Organisasi Terendah Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan asas dekonsentrasi ditempatkan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah Kecamatan yang bersangkutan”.¹⁸ Sedangkan personal satuan organisasi yang disebut pemerintah Desa kecuali Kelurahan

¹⁸ Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara 1991), h.24

disebut perangkat negara dan bukan perangkat atau pegawai negeri, karena berbagai pertimbangan antara lain:

- a. Konsisten dengan pengertian Desa satuan kenegaraan
- b. Perangkat tersebut, kendatipun pada umumnya dipilih dan dari kalangan masyarakat Desa setempat, namun yang mengangkatnya adalah pejabat Negara, bukan kepada masyarakat yang dipimpinnya.
- c. Tidak disebut sebagai perangkat atau pegawai negeri bila diatur dengan peraturan perundang-undangan tertentu, yang tidak berlaku bagi perangkat pemerintah Desa otonom.

2. Tugas, Fungsi dan Kewajiban Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah sebagai penyelenggara pemerintah dan penggerak pembangunan maupun pembinaan terhadap masyarakat di lingkungan suatu Desa. Pemerintah Desa sebagai abdi bangsa dan negara, aparat pemerintah dan penuh pengabdian diri terhadap Negara dan masyarakat. Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Sehari-Hari Kepala Desa dijelaskan sebagai berikut:

Undang-undang No. 22 tahun 1999 menegaskan tentang tugas, hak dan wewenang Kepala Desa dalam menjalankan pemerintah Desa yakni: menyelenggarakan rumah tangga Desanya sendiri sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa dan urusan umum termasuk pembinaan keterampilan dan ketertiban serta menumbuhkan dan mengembangkan jiwa dan

semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintah Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Memperhatikan isi pasal tersebut maka kewajiban, hak dan wewenang Kepala Desa dapat dibagi dua, yaitu:

a. Kewajiban, hak dan wewenang yang berkenaan dengan penyelenggaraan rumah tangga Desa. Kepala Desa menjalankan kewajiban, hak dan wewenang sebagai pemimpin pemerintah Desa, yaitu menyelenggarakan urusan rumah tangga Desanya sendiri meliputi:

1. Bidang pemerintahan
2. Bidang agraria
3. Bidang ekonomi
4. Bidang Sosial budaya
5. Bidang pembangunan
6. Bidang administrasi
7. Bidang keamanan dan ketertiban

Sebagai alat pemerintahan Desa, Kepala Desa menyelenggarakan pemerintahan umum, menyelenggarakan pengurus Desa serta pembinaan masyarakat Desa. Mengenai pemerintahan umum, Kepala Desa bertanggung jawab kepada yang berwenang mengenai urusan rumah tangga. Kepala Desa berhubungan dengan urusan pemerintahannya,

¹⁹ Dep. Dalam Negeri RI, *Rencana Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa*, (Jakarta: Penebar Swadaya 1996), h.2

misalnya dalam hal pengesahan anggaran penerimaan dan penanggung jawab utama bidang pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan keagamaan, keamanan dan ketertiban.

b. Kewajiban, hak dan wewenang yang berkenaan dengan tugas pembantu dari pemerintah di atas Desa. Tugas-tugas pembantu yang menjadi kewajiban Kepala Desa meliputi:

- 1) Membina kesadaran masyarakat terhadap ideologi Negara Pancasila dan UUD 45, kesadaran terhadap pentingnya pembangunan.
- 2) Membina persatuan, kesatuan dan kerukunan warga Desanya.
- 3) Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan pemerintah Desa yang menyangkut kegiatan dari BIMAS POLRI, BABINSA dan petugas instansi lain di Desanya.
- 4) Membantu menyelesaikan penarikan PBB sampai lunas.²⁰

Pemerintah Desa yaitu sebagai penyelenggara pemerintah dan penggerak pembangunan juga berkewajiban membina terhadap masyarakat di lingkungan Desanya. Dalam buku Psikologi Dakwah yang ditulis oleh H.M. Arifin, dalam sebuah hadits menyatakan sebagai berikut:

Masing-masing kamu adalah pengembala dan masing-masing kamu bertanggung jawab terhadap yang digembalanya,

²⁰*Ibid*, h.10

maka pemimpin adalah pengembala dan bertanggung jawab atas yang digembalanya, seorang laki-laki adalah pengembala atas keluarganya, perempuan adalah pengembala/penjaga di dalam rumah suaminya dan dia harus bertanggung jawab terhadap tugas dan penjagaannya, dan pembantu rumah tangga adalah pengembala/penjaga harta milik tuannya dan dia harus bertanggung jawab terhadap tugasnya, dan laki-laki itu penjaga harta milik ayahnya dan dia harus bertanggung jawab terhadap tugasnya. Maka masing-masing akan dimintai pertanggung jawaban atas tugas pengembalaannya/penjagaannya itu.²¹

Harta kekayaan masyarakat merupakan amanat yang dipertanggung jawabkan ke atas pundak pemimpinnya (Pemerintah)

Baginya wajib menempatkan itu pada tempat yang semestinya dan harus kembali untuk kepentingan masyarakat sepenuhnya, demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga seorang Kepala Desa dituntut untuk mengarahkan masyarakatnya ke tingkat kehidupan yang lebih maju. Dan semua rencana hendaknya menunjang kepentingan umum, mendirikan proyek-proyek yang mampu memberikan rangsangan terhadap kemajuan masyarakat dalam segi spiritual maupun material.

Dalam buku Himpunan Peraturan Pemerintah Desa (PERDES) jilid I dijelaskan tentang intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24

²¹ H.M. Arifin, *Psikologi Dakwah Suatu Pengantar Study*, (Jakarta: Bumi Aksara 1994), h.81

tahun 1989 tentang penilaian pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintah Desa yaitu : (a) Bahwa Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama bidang penyelenggaraan urusan pemerintah Desa, pemerintah umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. (b) Bahkan Kepala Desa mempunyai tugas membantu masyarakat dalam menumbuhkan semangat membangun yang dijiwai oleh azas usaha bersama dan kekeluargaan. (c) Mempunyai tugas mengayomi masyarakat, menggerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam membangun serta mampu menyelenggarakan fungsi pemerintah secara efisien dan efektif, diperlukan adanya penilaian pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintah Desa. (d) Bahwa berhubungan dengan itu, dipandang perlu untuk menetapkan daftar isian penilaian pelaksanaan tugas Kepala Desa, dengan intruksi Menteri Dalam Negeri.²²

Dari uraian di atas dapat dijelaskan tentang tugas dan kewajiban pemerintah Desa yaitu:

- a. Membina ketentraman dan kewajiban di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- b. Melaksanakan segala urusan dan kegiatan di bidang penghayatan dan pengamalan pancasila, pembinaan politik

²² Biro Bina Pemerintahan Desa Tahun 1990, h.177

dalam negeri dan pembinaan kesatuan bangsa sesuai dengan garis kebijaksanaan pemerintah.

- c. Memimpin pemerintah Desa dan melaksanakan segala tugas yang dibebankan oleh pemerintah yang lebih luas.
- d. Menyelenggarakan koordinasi terhadap segala usaha kegiatan masyarakat, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mencapai daya guna hasil guna yang sebesar-besarnya.
- e. Membimbing dan mengawasi segala usaha dan kegiatan masyarakat dan atau organisasi-organisasi serta lembaga-lembaga kemasyarakatan.
- f. Mengusahakan terus menerus supaya semua peraturan yang dikeluarkan pemerintah ditaati oleh penduduk Desanya.

Adapun kegunaan dalam perincian tugas Kepala Desa tersebut agar Kepala Desa dapat mengelompokkan pekerjaan-pekerjaannya dan dapat mempertanggung jawabkan semua kewajiban, diantara kegunaannya yaitu:

1. Sebagai penegasannya dan penjelasannya dari pekerjaan yang diberikan Kepala Desa dari pemerintah yang lebih luas.
2. Sebagai pedoman kerja bagi petugas yang bersangkutan.
3. Sebagai alat ukur untuk menilai, apakah pekerjaan itu sudah dilaksanakan atau belum.
4. Sebagai pengawasan bagi pihak yang lebih tinggi.

5. Sebagai alat pendorong bagi seseorang, bila melihat daftar pekerjaannya, bahwa ia diperhatikan dan diberi pekerjaan yang tetap.
6. Sebagai suatu pola pekerjaan guna diperhatikan oleh setiap pihak, supaya jangan timbul kesimpangsiuran pekerjaan dan kekaburan batas-batas wewenang dan tanggung jawab.

Tugas Kepala Desa sangatlah luas dan kongkrit, beliau benar-benar seorang pemimpin. Ia langsung melayani kebutuhan penduduknya dan membantu terselenggaranya tugas-tugas pemerintah negara di dalam wilayah Desanya.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa, akan lebih sukses jika pelaksanaan tidak hanya didasarkan kepada peraturan-peraturan belaka, akan tetapi harus ditujukan dengan dasar hubungan pribadi, hubungan bathin antara pemimpin dan yang dipimpin. Seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk memberi contoh pada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mentaati pemimpin secara sukarela, disertai kesadaran tanpa paksaan. Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya benar-benar menjadi akar yang efektif dan efisien juga berwibawa. Sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas umum yang bersih, maupun untuk menegaskan kebijaksanaan pembangunan secara lancar, dengan dilandasi oleh semangat dan sikap pengabdian terhadap masyarakat, bangsa serta agama.

Dalam pelaksanaannya tugas pemerintah Desa dibantu oleh perangkat Desa dan tokoh masyarakat. Kepala Desa sebagai orang yang pertama mengemban kewajiban dan tugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

3. Pemerintah Desa sebagai Pemimpin Masyarakat

Dalam negara Indonesia yang sedang membangun disegala bidang, faktor pemimpin dan kepemimpinan semakin sering dipermasalahkan, karena baik pemerintah maupun masyarakat semakin menyadari bahwa suatu tujuan dalam skala nasional, regional atau lokal bergantung pada kepemimpinan seseorang yang memimpin suatu instansi, jawatan, perusahaan, lembaga dan lain sebagainya.

Hamzah Ya'qub dalam bukunya *Publisistik Islam* menyatakan sebagai berikut:

Kepemimpinan adalah keseluruhan tindakan untuk mempengaruhi atau mengajak orang lain dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan adalah proses pembinaan jalan yang mudah (fasilitas) dari pekerjaan-pekerjaan orang-orang yang terorganisir guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Atau dengan simpel dapat dikemukakan, kepemimpinan adalah usaha untuk mencapai tujuan dengan menggunakan tenaga orang lain.²³

²³ Hamzah Ya'qub, *Publistik Islam*, 1992, h.115

Dalam kehidupan manusia, terdapat kelompok manusia jama'ah atau umat yang hidup bersama (hidup bermasyarakat) disana diperlukan adanya suatu kepemimpinan dan kepengurusan yang berfungsi mengurus dan mengatur kehidupan perubahan antara manusia sehingga mutlak perlunya kepemimpinan dan kepengurusan tentulah dibutuhkan adanya manusia pengurus dan pemimpin yang diandalkan, Allah SWT menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 73 sebagai berikut:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ
 الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

Artinya: Kami Telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan Telah kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan Hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah (Al-Anbiya ayat: 73).

Pemerintah Desa adalah pemimpin masyarakat terdekat, mempunyai hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintah Desa, yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggaraan dan penanggung jawab utama di bidang pemerintah. Pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah Desa, urusan pemerintah umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintah Desa.

Pemerintah Desa sebagai unsur pemimpin pemerintah yang terendah yaitu Desa, merupakan pos terdepan yang langsung berhubungan dengan masyarakat sebagai ujung tombak dan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan secara nasional. Untuk itu seorang pemerintah Desa harus memiliki kualitas kepemimpinan pancasila, yang secara formal dan mempunyai prinsip utama dalam kepemimpinan pancasila yang harus dihayati dan dijalankan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pemimpin (pemerintah) dengan orang yang dipimpin (rakyat) merupakan satu kesatuan. Adanya rakyat menjadikan munculnya pemimpin disebabkan adanya rakyat sebagai orang yang dipimpin, keberadaan keduanya disebabkan laksana imam dan makmum dalam shalat, hanya saja jadi pemimpin atau imam, jauh lebih sulit dibandingkan menjadi rakyat/makmum sebab diperlukan kemampuan dan syarat-syarat tertentu. Seorang pemimpin dituntut untuk selalu berusaha menegakan aqidah dan syariah agama untuk dirinya sendiri, keluarga dan bagi masyarakat lingkungannya. Selain itu seorang pemimpin harus mampu mempertahankan nilai-nilai agama secara baik dan benar. Ia harus sanggup pula menjadi suri tauladan dan uswatun hasanah, artinya seorang pemimpin tidak hanya mampu berbicara, tetapi mampu berbuat baik dan benar sesuai dengan ajaran agama. Hal ini yang diwariskan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya.

Sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan masyarakat yang sedang membangun, maka secara operasional ketiga prinsip kepemimpinan pancasila itu dapat dikatakan sebagai berikut:

- a. Kepemimpinan harus mampu menjadi pola panutan masyarakat.
- b. Kepemimpinan harus berakar pada masyarakat.
- c. Kepemimpinan harus mampu mendorong usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat Desa.

Ketajaman sosial diperlukan oleh seorang pemerintah agar mampu menghadapi gejala-gejala sosial yang timbul dikalangan masyarakat, serta peka terhadap setiap permasalahan yang timbul dalam masyarakat serta berupaya mencari jalan pemecahannya.

Kemampuan berfikir secara abstrak serta diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengkaji gejala-gejala sosial yang timbul dikalangan masyarakat untuk selanjutnya dimanfaatkan bagi suksesnya misi kepemimpinannya.

Keseimbangan emosi diperlukan oleh pemerintah, karena tanpa adanya keseimbangan emosi, maka sulit bagi Kepala Desa untuk berperan selaku tokoh yang menjadi panutan rakyat

Sebagai pola panutan rakyat, pemerintah Desa harus memiliki jiwa pelopor. Sebagai pelopor ia tidak boleh tinggal diam, tetapi ia harus selaluberfikir, berkreasi serta berinisiatif di dalam mengidentifikasi berbagai kemungkinan dan alternatif terbaik yang dapat diputuskan untuk ditetapkan bagi kepentingan masyarakat.

Sebagai pemimpin, pemerintah Desa harus benar-benar mendapatkan pengakuan, kepercayaan dan kecintaan dari rakyatnya. Ia harus dapat berperan selaku tempat pengayoman rakyat yang mendapatkan suasana tenang, tentram dan kesejukan, penuh dedikasi, bersifat adil, penuh daya tarik dan percaya pada diri sendiri.

Dalam upayanya mempertahankan dan mengembangkan hidupnya, individu-individu ini tidak dapat hidup sendiri dan terpisah. Sebagai makhluk sosial mereka ditakdirkan untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat. Kelebihan dan kekurangan masing-masing mengharuskan manusia untuk saling mengisi dan saling membantu. Semakin kompleks suatu susunan hidup suatu kelompok atau semakin kompleks suatu susunan masyarakat, makin banyak masalah yang timbul untuk dipecahkan bersama dan semakin diperlukan lagi kerja sama antara anggotanya untuk dapat memenuhi syarat-syarat hidup dalam masyarakat dan walaupun ada sekelompok individu dalam suatu masyarakat, maka tampaklah bermacam-macam gejala yaitu ada individu yang ingin menguasai individu lainnya dengan kemampuan yang dimilikinya. Adapula individu yang menyerahkan dirinya untuk menimbulkan kepemimpinan secara wajar. Untuk dapat mempengaruhi sesama individu dalam suatu kelompok dan dapat menggerakkan kepemimpinannya ke arah yang dicita-citakan maka

seorang pemimpin harus mempunyai kelebihan yang diterima oleh kelompoknya sebagai orang yang mempunyai suatu kelebihan.

Kelebihan yang dimiliki seorang pemimpin tidak boleh membawa kepada sikap merasa lebih atau ingin lebih berkuasa terhadap kelompoknya. Kelebihan pemimpin tidak boleh dijadikan alat untuk mendominasi. Seorang pemimpin tidak boleh merasa bahwa dialah sumber keberhasilan dan kelompoknya tidak akan mencapai tujuan tanpa dirinya. Jika terjadi pemimpin seperti itu, maka akan meremehkan kemampuan dan kesanggupan anggota dan pada akhirnya akan menghambat seluruh kelompok untuk mencapai tujuan.

Lebih dari itu, seorang pemimpin pada hakikatnya adalah pelayan bagi orang yang dipimpinnya. Artinya, seorang pemimpin harus mampu melaksanakan tugas, memenuhi aspirasi dan kebutuhan orang yang dipimpinnya. Jadi, orang yang dipimpin (masyarakat) demikian juga dapat dikatakan bahwa orang yang dipimpin adalah pelayan bagi sang pemimpin. Artinya rakyat harus membantu dan mencukupi kebutuhan pemimpin, jadi pemimpin adalah seseorang yang minta dilayani, juga pemimpin dan rakyat adalah pelayanan yang sama-sama melayani.

Setiap orang yang diangkat menjadi pemimpin didasarkan atas kelebihan-kelebihan yang dimilikinya daripada orang yang dipimpin. Setiap orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan di

samping kekurangan-kekurangannya. Dalam keadaan tertentu dan pada waktu tertentu pula kelebihan itu dapat digunakan untuk bertindak sebagai pemimpin. Untuk menjadi pemimpin diperlukan adanya syarat-syarat serta sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah berbeda-beda menurut golongan dan fungsi jabatan yang dipegangnya. Misalnya, untuk menjadi pemimpin Negara tidak mungkin sama dengan syarat yang diperlukan pemimpin perusahaan.

4. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan kata yang termasuk bahan kajian morfologi. Morfologi ialah bagian dari ilmu yang membicarakan seluk beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Sehingga kata kesejahteraan itu merupakan kata yang telah mendapatkan awalan ke- dan akhiran -an. Sedangkan morfem dasar dari kesejahteraan yaitu sejahtera.

Dalam membahas pengertian kesejahteraan itu, tentu harus diketahui dahulu tentang pengertian sejahtera. Sejahtera menurut W.J.S. Poerwadarmita adalah “Aman, sentosa dan makmur (terlepas dari segala yang mengganggu ketentraman dan sebagainya)”. Sehingga arti kesejahteraan itu meliputi keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup dan sebagainya) dan kemakmuran.

Menurut Shihab, kata “sejahtera” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Aman, sentosa dan makmur, selama (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya”. Dengan demikian kesejahteraan sosial merupakan keadaan masyarakat yang sejahtera.

Shihab juga menambahkan bahwa dalam keadaan empiris sekarang ini sejahtera adalah yang terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, dahaga, penyakit, kebodohan, masa depan diri, keluarga, bahkan lingkungan.²⁴

Menurut Isbandi, kesejahteraan sosial dalam arti yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Taraf hidup yang baik ini bukan hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan spiritual.²⁵

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, bahwa kesejahteraan itu adalah terpenuhinya kebutuhan pokok lahir dan bathin, yang meliputi dari segi sandang, pangan dan papan, juga dari segi rohani, terpenuhinya pendidikan, mempunyai keterampilan yang berdasarkan atas ketaqwaan juga sekaligus pengalaman dari agama yang memotivasi untuk berprestasi.

Pengertian kesejahteraan sosial menurut UU No. 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

²⁴ *Ibid*, h.128

²⁵ Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Fak. Ekonomi UI 2002), h.40

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan kehidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemecahan kebutuhan jasmaniah, rohanian dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat dan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila.²⁶

A. Klarifikasi Kesejahteraan

Dalam usaha untuk mendiskripsikan tingkatan kesejahteraan itu, tidak bisa dilepaskan dari penggolongan keluarga sejahtera. Sehingga keluarga sejahtera perlu dikembangkan menjadi wahana pembangunan anggotanya yang utama dan pertama. Untuk mendapatkan gambaran tentang klasifikasi kesejahteraan perlu diketahui tingkatan keluarga sejahtera. Dalam buku modul keluarga sejahtera diuraikan :

- a. Keluarga pra sejahtera, yaitu keluarga itu belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya.
- b. Keluarga sejahtera I, yaitu keluarga yang sudah dapat dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar.

²⁶ Undang-Undang No. 6 Tahun 1974

- c. Keluarga sejahtera II, yaitu keluarga yang selain dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, dapat pula kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembannya.
- d. Keluarga sejahtera III, yaitu keluarga yang selain dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan pengembannya, tetapi belum aktif menyumbang dan belum giat dalam usaha kemasyarakatan dalam lingkungan Desa atau wilayahnya.
- e. Keluarga sejahtera III plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan sosial psikologis, kebutuhan pengembangan, dan sekaligus secara teratur ikut menyumbang dalam kegiatan sosial dan aktif pula mengikuti gerakan semacam itu.

Dalam tingkatan masing-masing terdapat indikator yang dijadikan tolak ukur kesejahteraan dengan rincian sebagai berikut:

a. Keluarga Pra Sejahtera

Indikator yang dipergunakan adalah keluarga tersebut tidak dapat atau belum dapat memenuhi syarat sebagai keluarga sejahtera

b. Keluarga Sejahtera I

- 1) Pada umumnya keluarga tersebut makan dua kali sehari atau lebih
- 2) Seluruh keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah, dan bepergian.

- 3) Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah
- 4) Bila anak sakit dibawa ke sarana/petugas atau diberi pengobatan modern

c. Keluarga Sejahtera II

- 1) Paling kurang sedikit seminggu keluarga mendapatkan daging/telur sebagai lauk pauk
- 2) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru setahun terakhir
- 3) Luas lantai paling kurang 8 m² untuk tiap penghuni rumah
- 4) Seluruh anak berusia 6-12 tahun bersekolah
- 5) Seluruh anggota keluarga berumur di bawah umur 60 tahun, bisa membaca tulisan latin.
- 6) Paling kurang satu anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai pekerjaan tetap
- 7) Seluruh anggota-anggota dalam satu bulan terakhir dalam keadaan sehat, sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing
- 8) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianutnya masing-masing

d. Keluarga Sejahtera III

- 1) Memiliki anak paling banyak 2 orang, atau lebih dari dua orang.

- 2) Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga
- 3) Keluarga makan bersama paling kurang sekali dalam seminggu
- 4) Keluarga biasanya ikut serta dalam kegiatan masyarakat dalam lingkungan tempat tinggal.
- 5) Keluarga mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang sekali dalam tiga bulan.
- 6) Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar/radio/majalah.
- 7) Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat.
- 8) Upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahuan agama.

e. Keluarga Sejahtera III Plus

- 1) Keluarga atau anggota keluarga secara teratur memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.
- 2) Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan atau instansi masyarakat lainnya (Kantor Menteri Negara Kependudukan/Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Jakarta).

Berdasarkan penjelasan diatas, tingkatan kesejahteraan itu mempunyai lima kategori dalam susunan keluarga. Dengan rincian, pra sejahtera, sejahtera I, sejahtera II, sejahtera III, sejahtera III Plus.

B. Kesejahteraan Menurut Islam

Dalam bentuk kesejahteraan perspektif Islam, tentu dalam hal ini tidak bisa dilepaskan tolak ukur pedoman umat Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Al-Qur'an secara tegas sekali menyatakan, bahwa kebahagiaan itu tergantung kepada ada atau tidak adanya hubungan manusia dengan Tuhan dan dengan sesama manusia sendiri.²⁷ Bahwa Islam tidak menerima untuk memisahkan agama dari bidang kehidupan sosial, maka Islam telah menetapkan suatu metode lengkap yang mencakup garis-garis yang harus dipatuhi oleh tingkah laku manusia terhadap dirinya sendiri atau kelompok. Dalam hal ini Masdar Helmy menyatakan bahwa tanggung jawab dan melakukan pembangunan yang seimbang adalah sesuai dengan ajaran Islam, yaitu harus ada keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi.²⁸

Dalam melaksanakan hukum syariah itu, manusia yang sebagai khalifah mempunyai tugas dua macam yaitu:

- a. Mewujudkan kemakmuran di bumi
- b. Mewujudkan kebahagiaan hidup. Bahwa tujuan utama syariah ialah “Untuk membangun kehidupan atas ma’rifat (kebijakan-

²⁷ Syahminan Zaini, Ananta Kusuma Seta, *Wawasan Al-qur'an Tentang Pembangunan Manusia Seutuhnya*, (Jakarta: Kalam Mulia 1986), h.94

²⁸ Masdar Helmy, *Dakwah Dalam Alam Pembangunan*, (Semarang: Toha Putra), h.22

kebijakan atau deugden) dan membersihkan diri munkarat (kemungkaran-kemungkaran ondeugden)".²⁹

Syahminan Zaini dan Ananto Kusuma Seta menjelaskan, bahwa suksesnya tugas kekhalifahan itu minimal tujuh syarat harus dipenuhi oleh manusia, yaitu:

1. Badan kuat
2. Terampil
3. Pandai berhubungan dengan Allah (dalam bentuk ibadah).
Dengan manusia (dalam bentuk penelitian, pengolahan dan pemanfaatannya).
4. Beriman dan beramal saleh
5. Berilmu pengetahuan yang banyak dalam segala bidang kehidupan manusia.
6. Bersungguh-sungguh dengan sebenar-benarnya kesungguhan melaksanakan semua itu.
7. Berdisiplin tinggi.³⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, kesejahteraan berdasarkan pandangan Islam itu adalah dengan melaksanakan pembangunan jasmani dan rohani. Pembangunan jasmani meliputi: 1) Pembangunan kekuatan jasmani, 2) Pembangunan kesehatan jasmani, 3) Pembangunan keterampilan jasmani, 4) Pembangunan keindahan jasmani. Pembangunan rohani, yaitu 1)

²⁹*Ibid*, h.11

³⁰Syahminan Zaini, Ananta Kusuma Seta, *Wawasan Al-qur'an Tentang Pembangunan Manusia Seutuhnya*, (Jakarta: Kalam Mulia 1986), h.12

Pembangunan martabat manusia, 2) Pembangunan fitrah manusia, 3) Sifat-sifat manusia, dan 4) Tanggung jawab manusia.

5. Pengertian Masyarakat

Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut Society, asal katanya socius yang berarti kawan. Dalam bahasa Arab yaitu syirk, artinya bergaul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa masyarakat adalah “Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh satuan kebudayaan yang mereka anggap sama”. Tajul Arifin mengemukakan bahwa masyarakat itu adalah “Sekelompok manusia yang memiliki kebiasaan, ide dan sikap yang sama, hidup di daerah tertentu, menganggapnya sebagai kelompok sosial yang berinteraksi.

Menurut Koentjaraningrat masyarakat adalah “Kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan terikat oleh suatu rasa solidaritas bersama”. Sedangkan menurut para ahli sosiologi dalam bukunya M. Cholil Mansyur “Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa”, dijelaskan bahwa masyarakat adalah :

- a. Hasan Shadily, masyarakat adalah golongan besar atau kecil dari beberapa manusia, yang dengan sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh satu sama lain.
- b. M.M. Djodjodigoen, masyarakat adalah mempunyai arti sempit dan arti luas. Arti sempit: Masyarakat adalah yang terdiri dari suatu

golongan saja, misalnya masyarakat India, Arab dan Cina. Sedangkan arti luasnya : Masyarakat adalah kebulatan dari semua penghubung yang mungkin dalam masyarakat, jadi meliputi semua golongan. Misalnya masyarakat Surabaya yang terdiri dari masyarakat Hindia, Arab, Cina dan Pelajar.

- c. P.J. Bouman, masyarakat adalah pergaulan hidup yang akrab antara manusia, di persatukan dengan cara tertentu oleh hasrat-hasrat kemasyarakatan mereka.
- d. A. Lysen, masyarakat adalah hubungan antara kekuatan-kekuatan dari bentuk-bentuk masyarakat dan kehidupan individu.

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat ialah kumpulan manusia yang bersatu dengan cara tertentu, disebabkan adanya hasrat-hasrat kemasyarakatan yang sama. Adapun yang menjadi syarat-syarat timbulnya masyarakat ialah:

- a. Harus ada sekumpulan manusia yang banyak
- b. Telah bertempat tinggal di suatu daerah tertentu dalam waktu yang lama.
- c. Adanya aturan-aturan yang mengatur untuk kepentingan bersama.

Masyarakat merupakan satu kesatuan manusia yang tidak bisa dipisahkan dan saling membutuhkan. Manusia sering disebut sebagai makhluk sosial, makhluk ekonomi aktualisasi diri dan makhluk yang berbicara atau makhluk yang berfikir. Sebagai makhluk

sosial, manusia adalah masyarakat yang senang berkumpul dan berkelompok satu sama lainnya saling membutuhkan.

Sebagai makhluk ekonomi, manusia bertujuan mencari kenikmatan sebesar-besarnya dan menjauhi ketidaknyamanan sebisa mungkin. Sebagai makhluk aktualisasi diri, manusia senantiasa berusaha untuk mengaktualisasikan dirinya dengan keadaan agar tidak ketinggalan sekaligus sebagai makhluk yang progres yang selalu berubah-ubah dan berkembang untuk mencari tujuan. Sebagai makhluk yang berbicara, manusia adalah makhluk yang berakal yang mempergunakan akal pikiran dalam ucapan dan perbuatan.

Menurut Soejono Soekanto, manusia merupakan makhluk yang mempunyai aneka ragam sebutan, pada prinsipnya adalah makhluk yang saling bergantung pada sesamanya, baik yang menyangkut sandang, pangan, papan, keselamatan diri dan harta, harta diri, potensi untuk berkembang maupun kasih sayang.³¹

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Sehingga manusia akan membentuk satu kesatuan yaitu masyarakat.

Dalam pengertian sosiologi, masyarakat tidak hanya dipandang sebagai kumpulan individu secara fisik atau pejumlahan manusia secara statistik belaka, melainkan harus

³¹Soerjoeno Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi ke-4* (Jakarta: Grafindo Persada 1990),

dipandang sebagai suatu pergaulan hidup manusia mengikuti pola tata hubungan yang berlaku umum. Manusia merupakan makhluk yang penuh dengan keterbatasan sehingga tak mampu mengisolasi diri secara keseluruhan, maka tak ada pilihan lain mempertahankan kelangsungan hidupnya kecuali harus berhubungan, kerja sama dan mengorganisir kepentingan dengan manusia yang lain dalam satu kelompok masyarakat. Dengan perkataan lain masyarakat merupakan suatu sistem kemasyarakatan.

Selain itu juga masyarakat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Manusia yang hidup bersama.
- b. Bergaul dalam jangka waktu yang relatif lama.
- c. Mengikuti pola tata hubungan yang berlaku umum
- d. Adanya kesadaran diri setiap anggota bahwa masing-masing mereka merupakan bagian dari kelompok atau masyarakatnya.

Menurut Koentjaraningrat, masyarakat merupakan istilah yang paling lazim dipakai untuk menyebut kesatuan-kesatuan hidup manusia, baik dalam tulisan ilmiah maupun dalam bahasa sehari-hari.

Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata latin *socius* yang berarti kawan. Istilah masyarakat pada dasarnya berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang berarti ikut serta.³²

Lebih lanjut Koentjaraningrat menyatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang sering bergaul atau

³²*Ibid*, h.143

saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui sesuatu yang bisa membuat warga-warganya saling berinteraksi. Suatu negara modern misalnya, merupakan suatu kesatuan manusia dengan berbagai macam prasarana, yang memungkinkan para warganya untuk berinteraksi secara intensif, dan dengan frekuensi yang tinggi. Artinya masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

A. Tipe-tipe Masyarakat

Menurut Nothingham sebagaimana dikutip oleh Kahmad, masyarakat dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Golongan Petani

Pada umumnya, golongan petani termasuk yang terbelakang. Lokasinya berada di daerah terisolasi, sistem masyarakatnya masih sederhana, lembaga-lembaga sosialnya pun belum banyak berkembang. Disamping alasan-alasan tersebut, unsur-unsur ketidak pastian, ketidak mampuan, kelangkaan, sangat erat dengan kehidupan petani. Mata pancaharian utamanya tergantung pada alam yang tidak bisa dipercepat. Diperlambat, atau diperhitungkan secara cermat sesuai dengan keinginan petani.

b. Golongan Nelayan

Masyarakat yang memiliki mata pencaharian nelayan bergantung pada keadaan alam, yang mencari ikan di laut, rawa atau sungai. Para nelayan tentunya tergantung dengan keadaan alam. Adanya badai merupakan hal yang tidak diinginkan, karena akan menghambat pekerjaan mereka sebagai nelayan.

c. Golongan Pengrajin

Golongan pengrajin tidak terlalu terikat dengan situasi alam dan tidak terlalu bergantung pada hukum alam. Hidup mereka didasarkan atas landasan ekonomi yang memerlukan perhitungan rasional. Mereka tidak menyadarkan diri pada kemarahan alam yang tidak bisa dipastikan, tetapi lebih mempercayai perencanaan yang diteliti dan pengarahannya yang pasti.

d. Golongan Pedagang Besar

Kategori yang paling menonjol dari golongan pedagang besar adalah memiliki sikap yang lain terhadap agama. Pada umumnya kelompok ini mempunyai jiwa yang jauh dari gagasan tentang imbalan jasa (compensation) moral, seperti yang dimiliki golongan tingkat menengah kebawah dan cenderung menutup agama profesi dan etnis.

e. Golongan Karyawan

Golongan karyawan bisa dimasukkan pada masyarakat industri karena sistem sosial yang ada sudah bersifat modern. Hal ini dilihat dari pembagian fungsi-fungsi kerja yang ada sudah jelas dan adanya penyelesaian suatu masalah kemanusiaan berdasarkan penalaran dan efisiensi.

f. Golongan Buruh

Yang dimaksud dengan golongan buruh adalah mereka yang bekerja dalam industri-industri atau perusahaan-perusahaan modern.

g. Golongan Tua-Muda

Di Indonesia usia 40 tahun ke atas biasanya dianggap telah tua dan usia 40 tahun kebawah dianggap muda.

h. Golongan Pria-Wanita

Secara psikologis, watak umum pria dan wanita berbeda. Dalam menghadapi suatu keadaan watak pria lebih dominan menggunakan rasional, sedangkan wanita lebih dominan pertimbangan rasa atau emosinya.³³

Para pakar sosiologi yaitu Muhyiddin dan Syafe'i membuat sejumlah karakter masyarakat Desa diantaranya sebagai berikut:

³³Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Rosda Karya 2002), h.132

- a. Mayoritas latar belakang komunitas Desa bersama pencaharian pertanian (termasuk peternakan dan perikanan), baik bertani dengan cocok tanam di ladang atau di sawah.
- b. Karakteristik komunitas Desa relatif sederhana, taat pada tradisi dan agama.
- c. Masih meyakini adanya hal-hal yang tabu dan mistik.
- d. Kehidupan warganya masih bersikap gotong-royong dan masing-masing warganya saling mengenal.
- e. Etos kerja dan pola kehidupan dalam pengaturan waktunya kurang memperhatikan efisiensi.
- f. Ketergantungan pada sumber daya alam masih sangat sesuai dengan hasil pengalamannya sehari-hari.
- g. Tunduk pada orang yang dianggap tokoh atau panutan.
- h. Adanya kontrol sosial yang sangat kuat.
- i. Tingkat mobilisasi masih sangat rendah dan statis.³⁴

Menurut Maftuh yang dikutip oleh Muhyiddin dan Syafe'i karakteristik masyarakat Desa yang tradisional dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Cenderung memiliki sifat homogen dalam hal mata pencaharian, nilai-nilai, sikap dan tingkah laku.
- b. Lebih menekankan anggota keluarga sebagai inti ekonomi.

³⁴Asep Muhyidin, Agus Ahmad Syafe'i, *Metode Pengembangan Dakwah*, (Bandung: Pustaka Setia 2002), h.146

- c. Faktor geografis berpengaruh atas kehidupan yang ada, misalnya sangat terikat pada tanah kelahirannya.
- d. Hubungan sesama anggota masyarakat sangat intim.
- e. Jumlah anak yang ada dalam keluarga inti lebih banyak.
- f. Memiliki pandangan yang sempit.
- g. Adanya ketergantungan dan sekaligus rasa curiga terhadap pemerintah.
- h. Ada rasa enggan untuk menerima atau menciptakan ide-ide.
- i. Fatalisme.
- j. Memiliki aspirasi dan keinginan yang sangat rendah.
- k. Memiliki pandangan yang terbatas pada dunia luar.
- l. Memiliki derajat yang rendah.
- m. Memiliki sifat curiga terhadap orang yang datang dari luar masyarakat mereka.
- n. Adanya sikap otoritas orang tua terhadap mereka yang berusia muda.
- o. Tidak mau tahu dunia luar dan orang luar.
- p. Ada sifat konservatif.
- q. Pasrah.
- r. Memiliki sifat udik dan pendalaman.
- s. Melakukan pekerjaan secara gotong royong.
- t. Perasaan lebih dominan daripada nalar.
- u. Belum menghargai waktu.
- v. Terikat oleh adat istiadat dan nilai budaya setempat.

w. Kepercayaan terhadap Tuhan yang sangat mendalam.³⁵

Karakteristik masyarakat Desa menurut pakar sosiologis sebagaimana dikutip oleh Asep Muhyiddin dan Agus Ahmad Syafe'i, dapat dikarakteristikan sebagai berikut:

- a. Berorientasi pada tradisi setempat.
- b. Tingkat diferensiasi rendah.
- c. Tingkat spesialisasi rendah.
- d. Pembagian kerja mekanis.
- e. Tingkat urbanisasi rendah
- f. Media komunikasi lisan.
- g. Basis ekonomi pertanian.

6. Masyarakat Menurut Islam

Fazlur Rahman mengemukakan bahwa tidak diragukan lagi tujuan utama Al-Qur'an adalah menegakkan sebuah tata masyarakat yang adil, berdasarkan etika, dan dapat bertahan di muka bumi ini.³⁶ Demikian pula Ismail Raji al-Furuqi menyatakan bahwa, "Tata sosial Islam adalah tata sosial yang totalitas, dalam artian bahwa ia menganggap Islam relevan dengan setiap bidang kegiatan hidup manusia".³⁷ Selanjutnya Omar Mohammad Al-Thony Al-Syaibany mengutip pendapat Ahmad Musa Salim, bahwa:

Islam adalah sistem Illahi dipandang dari perundang-undangannya, ilmiah dipandang dari segi pengalaman sejarahnya, Islam

³⁵*Ibid*, h.147

³⁶Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka 1980), h,54

³⁷Ismail Raji Al-Furudi, (Jakarta: Bumi Aksara 1988), h,188

membangun masyarakat Islam bersifat kolektif antara anggotanya. Dengan iman anggota masyarakat menjadi hamba Allah, bersaudara dan menjadi sumber-sumber kekayaan alam yang telah dijadikan untuk mereka. Mereka membina masyarakat atas dasar keinsyafan bahwa usaha atau kerja menjadi sumber hak dan derajat seseorang. Atas kesadaran bahwa persaudaraan seiman menjadikan mereka sekutu dalam pekerjaan yang baik sumber penghasilan atau kerja.³⁸

Islam adalah satu peradaban yang sempurna, bukan sekedar tuntunan rohani dan bukan pula sekedar bimbingan ibadah. Ia diturunkan Tuhan untuk membangun dunia yang maju, makmur, adil, bebas dari kebodohan, kemiskinan dan ketidakadilan. Oleh karena itu masyarakat yang berdasarkan Islam memiliki ciri-ciri khusus. Dalam hal ini Oemar Mohammad al-Thouny al-Syaibany menguraikan tentang ciri-ciri masyarakat Islam. Adapun ciri-ciri masyarakat Islam sebagai berikut:

- a. Masyarakat Islam wujud atas tonggak iman kepada Allah, para Nabi, kitab-kitab samawi, hari akhirat, hari kebangkitan, hari berkumpul di padang mahsyar, perhitungan dan balasan. Buah keimanan kepada Allah SWT dalam ke-Tuhanannya ialah jiwa menjadi tentram dan damai. Mendidik insan agar merasakan harga dirinya di samping menggalakkannya bekerja dan memproduksi sesuatu

³⁸Oemar Muhammad, *Falsafah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1979), h.166

yang mendatangkan manfaat kepada masyarakat. Iman membebaskan ketakutan, kecuali kepada Allah melahirkan insan yang berguna bagi masyarakat.

- b. Agama diletakkan pada proporsi yang tertinggi. Segala urusan hidup dikembalikan kepada hukumnya sesuai dengan Al-Qur'an yang menyeru supaya pertikaian dikembalikan kepada putusan Allah dan Rasul. Artinya merujuk prinsip dan dasar yang dikandung oleh ajaran Allah dan Rasul. Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*”

- c. Penilaian yang tertinggi diberikan kepada akhlak dan tata susila. Segala kegiatan dan perbuatan insan ditundukan kepada prinsip metode yang telah diterima dari-Nya sebagai perinsip insaniah yang jelas.
- d. Ilmu diberi perhatian yang utama. Ilmu yang benar dianggap sebagai cara untuk memantapkan akidah dan agama. Ilmu yang

benar sebagai suatu cara mencapai kemajuan ekonomi, kemakmuran dan menambah produktifitas.

- e. Masyarakat Islam menghormati dan menjaga kehormatan insan. Tidak bersikap terpisah karena warna kulit, bangsa, agama, harta atau keturunan.
- f. Keluarga atau kehidupan berkeluarga mendapat perhatian yang sangat besar. Masyarakat Islam berusaha untuk menguatkan ikatan dan binaan intuisi keluarga. Hubungan kekeluargaan dibina atas tunas-tunas yang luhur, kebenaran, keadilan dan kasih sayang.

Mengacu pada penjelasan-penjelasan tersebut di atas masyarakat menurut Islam adalah masyarakat yang satu sama lain sangat erat dengan kasih sayang dan keakraban yang mendalam, terhormat, tegas dan berprestasi tinggi.³⁹

7. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat mengandung makna lahir dan batin seluruh masyarakat yang berisikan unsur kualitas kehidupan beragama, tingkat pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani, serta pelayanan sosial dan pemenuhan kebutuhan materi masyarakat pada umumnya.

Dalam menjalani kehidupannya manusia senantiasa dihadapkan dengan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhinya. Namun untuk memenuhi kebutuhan tersebut sering kali seseorang

³⁹*Ibid*, h.157

dibenturkan pada permasalahan yang apabila dibiarkan mungkin saja akan berkembang semakin kompleks. Oleh karena itu, sumber yang ada dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan yang mengatasi permasalahan yang ada.

Kesejahteraan atau yang biasa disebut kesejahteraan sosial merupakan serangkaian aktifitas yang terorganisir yang ditunjukan untuk meningkatkan kualitas hidup, relasi sosial, serta peningkatan kehidupan masyarakat yang selaras dengan standar dan norma-norma masyarakat sebagai tujuan, merupakan cita-cita, pedoman, aspirasi dan juga tujuan supaya terpenuhinya kebutuhan materi, sosial dan spiritual.

Terkait dengan hal ini Spicker yang dikutip Isbandi menggambarkan kaitan dengan kebijakan sosial sekurang-sekurangnya mencakup lima bidang utama yang disebut dengan Big

Five yaitu:

1. Bidang kesehatan
2. Bidang pendidikan
3. Bidang perumahan
4. Bidang jaminan sosial
5. Bidang pekerjaan sosial.⁴⁰

Bila Spicker mengemukakan lima bidang di atas, maka Zastrow mengemukakan pula aspek rekreasi sebagai salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

⁴⁰Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, h.128

masyarakat, sehingga bila digabungkan ada enam bidang yang perlu diperhatikan oleh pembuat kebijakan ataupun pengambil keputusan.⁴¹

Dalam Kehidupan masa kini dapat dikatakan bahwa masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan, masa depan diri, sanak keluarga bahkan lingkungan.⁴²

Undang-undang No. 13 tahun 1998 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan masyarakat memuat definisi kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat baik materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa takut keselamatan kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan usaha penemuan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.⁴³

Friedlander (1976) merumuskan kesejahteraan sebagai suatu sistem yang terorganisasi dan pelayanan-pelayanan sosial dalam lembaga-lembaga yang dimaksudkan untuk membantu individu atau kelompok atau mereka dapat mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan serta terciptanya hubungan-hubungan

⁴¹*Ibid*, h.128

⁴²Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, h.129

⁴³Undang-Undang No. 13 Tahun 1998

seseorang atau sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1998. kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan menjadi seirama dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.⁴⁴



⁴⁴Isbandi Rukminto Adi, *Wawasan Al-Qur'an*, h.31

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sebagaimana menurut Bogdan dan Taylor dalam bukunya Lexy. J. Moleong mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁵ Dengan metode ini penulis mengharapkan dapat memperoleh data-data yang akurat dan lengkap berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Semua yang dikumpulkan berkenungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.⁴⁶

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan.⁴⁷ Penelitian ini dilakukan Di Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

C. Subyek penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh warga masarakat desa banmaleng khususnya yang belum sejahtera. Dari data BLT (Bantuan

⁴⁵Lexi, J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya 2012), cet.6

⁴⁶*Ibid*, h.6

⁴⁷Tim penusun, *Pedoman Penulisan*, 43

Langsung Tunai) tahun 2017, desa banmaleng yang memiliki jumlah penduduk 5,981 jiwa, yang terbagi atas 6 Rukun Warga (RW) dan 18 Rukun Tetangga (RT) terdapat 550 warga miskin. Hampir disetiap RT yang rata-rata jumlah penduduknya 300 orang itu terdapat 30 warga miskin yang hidupnya belum sejahtera.⁴⁸ Namun karena keterbatasan waktu, biaya serta tenaga, maka subyek penelitiannya saya batasi dengan mengambil contoh satu RW yaitu RW 06 yang terdiri dari 3 RT. Alasan saya mengambil contoh RW 06 itu karena warga masyarakat RW 06 tingkat kemiskinannya paling tinggi diantara RW-RW yang lain yang ada di desa banmaleng. Ini bisa dilihat dari pekerjaan mereka sehari-hari yang sebagian besar menjadi petani.

D. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara study lapangan (*Field Research*) yang dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

- a. Pengamatan (observasi) yaitu metode pengumpulan data dengan cara peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dan melakukan pengamatan mengenai keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat secara obyektif.

Setelah peneliti amati, ternyata masyarakat yang belum sejahtera itu bisa dilihat dari beberapa aspek, diantaranya bisa dilihat dari segi bangunan rumahnya yang dindingnya hanya terbuat dari bambu, lantainya tanah dan belum diplester. Selain itu juga bisa dilihat dari segi pekerjaannya yang kebanyakan dari mereka menjadi seorang petani yang

⁴⁸ Data BLT Desa Banmaleng Tahun 2017

hidupnya dalam setiap harinya sebatas cari makannya sapinya dan itupun tidak dapat uang sehingga kebutuhan hidup sehari-harinya kurang.

b. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara agar diperoleh data yang lebih akurat dengan menggunakan pedoman wawancara.

Peneliti juga melakukan wawancara mengenai kesejahteraan masyarakat yang dilakukan langsung dengan masyarakatnya dan melakukan wawancara langsung dengan kepala desa banmaleng beserta staf-stafnya.

c. Study Dokumentasi

Yaitu mempelajari bahan-bahan bacaan atau dokumen-dokumen yang ada yang berhubungan dengan penelitian seperti data monografi desa banmaleng dan data BLT (Bantuan Langsung Tunai) tahun 2017.

E. Teknik analisa data

Setelah data-data yang diinginkan terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah tahap analisa data. Dalam penelitian ini analisa data disajikan dengan model/desain analisa deskriptif, artinya data-data yang telah diperoleh disajikan secara deskriptif setelah sebelumnya dianalisa.

F. Keabsahan data

Tehnik keabsahan data dalam penelitian ini yaitu kredibilitas (derajat kepercayaan) dengan tehnik triangulasi yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Hal itu dapat dicapai dengan jalan

: (a). Membandingkan data hasil pengamatan di lapangan dengan hasil wawancara Kepala Desa Banmaleng. (b). Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain, misalnya dalam hal ini peneliti membandingkan jawaban yang diberikan oleh masyarakat dengan jawaban yang diberikan Bapak Kepala Desa Banmaleng



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

Desa Banmaleng adalah salah satu desa di Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep yang terletak di sebelah barat desa Banbaru dan desa Jate yang berada di pulau Giliraja dan jarak 36 km dari kabupaten sumenep. Kehidupan masyarakatnya adalah bertani dan nelayan yang secara turun temurun merupakan warisan dari para leluhurnya yang menggantungkan nasibnya pada ladang dan laut, dan ternak terutama ternak sapi, kambing dan ayam. Penduduknya dari jaman dulu tidak banyak berubah, karena tidak ada perpindahan penduduk begitu juga dengan pertumbuhan penduduknya yang tidak banyak meningkat.⁴⁹

1. Sejarah Desa Banmaleng

Asal muasal nama Desa Banmaleng dan asal mula Giliraja memiliki cerita masing-masing. Pada tahun 1300 M ada seorang patih atau demang (Agung Demang) yang mengikuti sayembara Raja Baragung untuk mengalahkan Nyi Roro Kidul (Dewi Saraswati). Maka berangkatlah Agung Demang ke pulau Giliraja. Sesampainya di pulau Giliraja Agung Demang dihadang oleh segerombolan perampok (Maleng) yang jumlahnya sekitar 41 orang hingga terjadilah pertarungan dan akhirnya para perampok tersebut dapat ditumpas.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Ketua RW. 04 yaitu Bpk. Odim tanggal 25 Mei 2019

Hingga akhirnya daerah ini diberi nama desa Banmaleng (Ban berarti Kumpulan dan Maleng berarti Maling/Perampok). Setelah beberapa peristiwa yang dialami Agung Demang (Pangeran Rawit) melakukan pertapaan dengan berubah dirinya menjadi seekor buaya putih untuk melawan Nyi Roro Kidul. Dengan perwujudan Pangeran Rawit/Agung Demang menjadi buaya putih ini maka menurut dawuh para leluhur pulau ini diberi nama Gili Bajah (Gili Raja). Gili berarti pulau dan Bajah berarti buaya.

2. Visi dan Misi Desa Banmaleng

a. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi dalam hal ini Desa Banmaleng hendak di bawa dan berkarya agar tetap konsisten, eksis serta produktif, untuk menunjang semua itu maka Desa Banmaleng memiliki visi yang berbunyi **“Terwujudnya Pemerintahan Desa Yang Ramah, Aman, Kenangan, Indah dan Berkeadilan Sosial Mandiri”** Visi tersebut mengandung pengertian bahwa cita-cita yang akan dituju dimasa yang akan mendatang oleh segenap warga Desa Banmaleng.

b. Misi

Misi merupakan mempresentasikan sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan dapat dilaksanakan sehingga dapat bergaya guna dan berhasil.

Adapun misi yang telah dirumuskan oleh Desa Banmaleng adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keutuhan, ketertiban, dan kemandirian desa dengan semangat kebersamaan yang berorientasi pada terciptanya pola hidup ramah, aman, dinamis, harmonis dan religius.
- 2) Meningkatkan semangat pendidikan, pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang proses pembangunan masyarakat yang berorientasi di masa depan.
- 3) Memberdayakan kelompok masyarakat ekonomi lemah menjadi ekonomi produktif, inovatif dan kreatif yang di jiwai semangat interpreneur.
- 4) Peningkatan sarana dan prasarana sosial, ekonomi, kesehatan, keagamaan, perikanan dan kelautan sebagai penunjang pembangunan yang terpadu dan berkeadilan sosial.
- 5) Menjadikan desa sebagai pusat kebudayaan dan peradaban yang luhur, fleksible, dialetik dan menyenangkan guna mewujudkan kesejahteraan sosial, humanis dan kharismatik.

3. Pemerintahan Desa Banmaleng

Pemerintah desa banmaleng merupakan suatu pemerintahan yang ada sejak jaman kerajaan. Sesuai dengan keadaan dan kondisi alam masyarakat Banmaleng maka wilayah pemerintahan terdiri atas 4 dusun.

Sejak adanya pemerintahan desa Banmaleng dipimpin oleh Pangeran Rawit yang kemudian digantikan oleh seorang kepala desa yang bernama P.Lusin sekitar tahun 1930 yang pemerintahannya menggantikan Pangeran Rawit masih mengikuti pola kerajaan Sumenep.

Masa kepemimpinan kepala desa P.Lusin digantikan oleh P.Ratima dan Masa kepemimpinannya belum ada perkembangan karena masih dalam masa pemerintah penjajah Belanda. Sedang beberapa tahun kemudian kepemimpinan kepala desa Banmaleng diganti oleh Asm'e setelah itu diganti oleh H, Musyafak (1975-2007) setelah sekian lama dipimpin oleh H.Musaffak desa Banmaleng kemudian diganti oleh H.Moh.Rakib terpilih lagi sebagai kepala desa Banmaleng periode kedua Yaitu tahun 2013-2019.⁵⁰

Sebelum tahun 1999 tepatnya pada pemerintahan aqidah dan sebelumnya, struktur organisasi pemerintahan desa yaitu kepala desa di bantu oleh :

- a. Carek
- b. Apel
- c. PKD
- d. LKMD
- e. LMD
- f. Modin

⁵⁰ Sumber data wawancara kepala desa banmaleng, 15 juni 2019

Kemudian setelah tahun 1999 pemerintahan desa berubah struktur menjadi :

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa
- c. Kepala Seksi (Kasi)
- d. Kepala Urusan (Kaur)
- e. Kepala Dusun
- f. BPD

4. Letak Geografis Desa Banmaleng

Desa Banmaleng termasuk dalam wilayah Kecamatan Giligenting yang terletak sekitar 13,5 km dari kecamatan dan kurang lebih 36 km dari kabupaten Sumenep. Secara geografis desa

Banmaleng dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga dengan batas-batas wilayah Desa Banmaleng adalah sebagai berikut :

Batas Wilayah Desa :

Sebelah Barat : Laut Madura

Sebelah Timur : Desa Banbaru & Desa Jate

Sebelah Utara: Laut Madura

Sebelah Selatan : Laut Madura

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan program pemerintah dan memudahkan komunikasi antara aparat Desa dengan masyarakat setempat, maka desa Banmaleng di bagi menjadi 4 dusun, 8 Rukun Warga (RW), 26 Rukun Tangga (RT). Dalam proses pelaksanaan

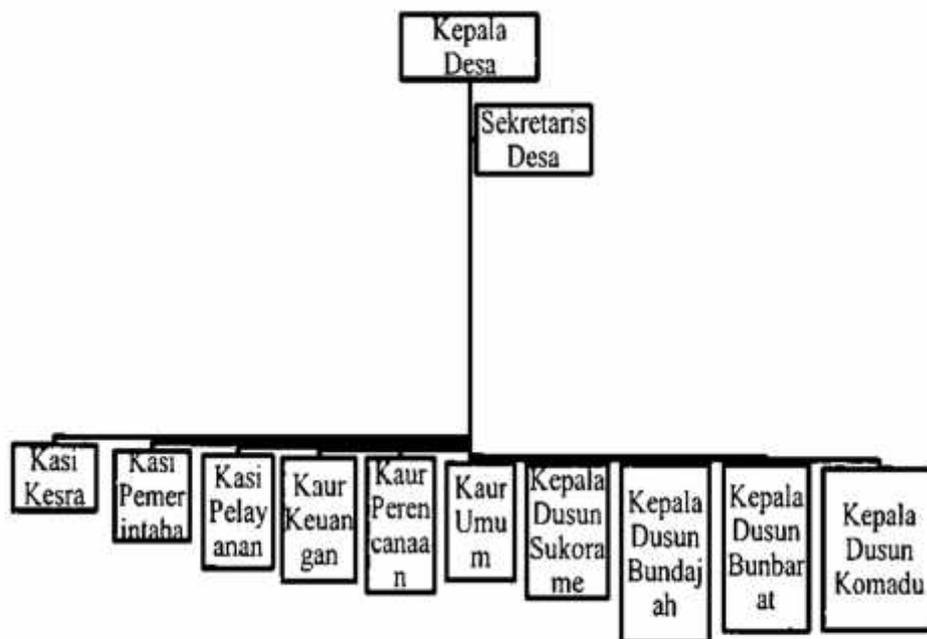
program pemerintah, diawasi oleh Badan Perwakilan Desa (BPD), sedangkan operasional pengelolaan dan pengembangan Desa Banmaleng dilakukan oleh orang-orang yang telah ditentukan dengan dibantu oleh seluruh masyarakat desa.⁵¹ Nama Kepala Desa beserta pamongnya adalah sebagai berikut :

Kepala Desa	: H. Rakib
Sekretaris Desa	: Edy Sunaidi
Kasi Kesra	: M. arwi
Kasi Pemerintahan	: Zainurrahman
Kasi Pelayanan	: Abd. Mu'ti Sujak
Kaur Keuangan	: Arsilam
Kaur Perencanaan	: Moh. zainuddin
Kaur Umum	: Nur Holis
Kadus Sokoramme	: Zayyadi
Kadus Bundajah	: Ali Wafa
Kadus Bunbarat	: Hosman
Kadus Komadu	: Mude

IAIN JEMBER

⁵¹ Sumber Data Dokumentasi pada tahun 2019

Tabel 1
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Banmaleng



5. Demografi Desa Banmaleng

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 3515 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.703 jiwa, sedangkan berjenis perempuan berjumlah 1.812 jiwa. Survei Data Sekunder dilakukan oleh Fasilitator Pembangunan Desa, dimaksudkan sebagai Data Pembanding dari data yang ada di Pemerintah Desa. Survei Data Sekunder yang dilakukan pada bulan Maret 2017 berkaitan dengan data penduduk pada saat itu, terlihat dalam Tabel berikut ini :

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Banmaleng
Tahun 2017

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	1.703	48.45%
2	Perempuan	1.812	51.55%
	Jumlah	3.515	100%

Sumber : Data Surve sekunder Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting, Maret tahun 2017

6. Potensi Desa

Sumber Daya Alam (Umum, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Air)

Sumber Daya Manusia (Jumlah, Pendidikan, Mata Pencaharian, Tenaga Kerja)

Sumber Daya Kelembagaan (Pemerintahan, Kemasyarakatan, Politik, Ekonomi, Pendidikan, Keamanan)

Sarana & Prasarana (Air Bersih, Irigasi, Ibadah, Olahraga, Kesehatan, Pendidikan, Penerangan)

Tabel 3
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Banmaleng

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Keterangan
1	Pengrajin Perhiasan	753	
2	Petani	129	
3	Buruh	66	
4	Pedagang	64	
5	Jasa Angkutan	125	
6	Jasa Keterampilan	27	
7	Karyawan		
	a. PNS	36	
	b. TNI/POLRI	9	
	c. Swasta	67	
8	Pemulung	60	
	JUMLAH	1336	

Sumber : Monografi Desa Banmaleng 2019

B. Penyajian Data dan Analisis

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh data. Setelah mengalami proses peralihan dan sesuai dengan metode yang digunakan, maka secara berurutan akan disajikan data-data yang mengacu pada fokus penelitian. Penelitian ini menggambarkan tentang penyajian data berupa gambaran tentang Kemandirian Masyarakat Desa Banmaleng Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonominya Tanpa Bantu Pemerintah Desa.

1. Kemandirian Masyarakat Desa Banmaleng Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.

Masalah kesejahteraan hingga saat ini masih merupakan sesuatu hal yang masih hangat di perbincangkan, baik pada tataran global, regional maupun local. Pokok masalah dari dari kesejahteraan itu sendiri adalah kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat serta terbatasnya akses ekonomi pada masyarakat khususnya masyarakat golongan bawah. Maka tidaklah mengherankan jika masalah kesejahteraan tidak akan pernah selesai dibahas selama masalah kemiskinan dan pengangguran masih terjadi.

Begitu pula yang terjadi pada ruang lingkup lokal, dalam hal ini di Desa Banmaleng. Sebagai sebuah desa sebagaimana Desa-desa lain yang ada di Indonesia, masalah kemiskinan dan ketidakberdayaan merupakan masalah yang hingga saat ini masih terus diupayakan jalan

keluarnya agar masyarakat Desa Banmaleng kehidupannya secara umum dapat sejahtera. Karena itu berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah Desa Banmaleng ditujukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakatnya dengan cara membuat program pemberdayaan masyarakat.

Sebelum penulis uraikan lebih lanjut mengenai kemandirian masyarakat Desa Banmaleng dalam meningkatkan kesejahteraan ekonominya, terlebih dahulu akan penulis uraikan tentang peta pekerjaan masyarakat setempat. Masyarakat Desa Banmaleng mayoritas adalah pekerja atau bermata pencahariannya di sektor perdagangan keluar Desa. Hal ini sudah berlangsung sejak tahun 2014 kemaren dan menjadi pekerjaan yang bersifat turun temurun. Dari hasil observasi penulis di ketahui sekitar 70-80 persen penduduknya bekerja pada sektor perdagangan, sementara sisanya bekerja disektor pertanian, nelayan. Berikut penulis tampilkan peta mata pencaharian masyarakat Desa Banmaleng dalam bentuk tabel.

Beberapa masalah yang hingga kini dihadapi masyarakat Desa Banmaleng berkaitan dengan masalah kesejahteraannya adalah masalah Sumber Daya Manusia (SDM), perlu diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Banmaleng rata-rata rendah sehingga potensi sumber daya manusianya dapat penulis katakan sangat terbatas, hal ini berhubungan dengan budaya dan cara pandang masyarakat di Desa tersebut mengenai arti pentingnya pendidikan bagi

anak-anak mereka. Berikut penulis tampilkan peta tingkat pendidikan masyarakat yang ada di Desa Banmaleng.

Tabel 4
Urutan Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Buta aksara dan angka	299	
2	Tidak tamat SD	1196	
3	Tamat SD	3588	
4	Tamat SLTP	232	
5	Tamat SLTA	179	
6	Sarjana/S1	18	
	Jumlah	5512	

Sumber : Monografi Desa Banmaleng 2019

Masalah teknologi produksi, masalah permodalan, masalah system manajemen produksi dan lain sebagainya. Berkaitan dengan masalah kesejahteraan ekomi masyarakat Desa Banmaleng tersebut, pemerintah Desa Banmaleng tidaklah tinggal diam begitu saja. Pemerintah Desa Banmaleng berupaya menyusun sebuah program bermanfaat bagi proses peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Banmaleng. Diantanya program yang telah dirancang dan dijalankan adalah program pemberdayaan masyarakat pengrajin assesoris yang ada di Desa tersebut. Dari hasil observasi penulis di lapangan diketahui program pemberdayaan tersebut secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga bagian yakni program penyuluhan, program pelatihan, dan program bantuan modal usaha. Program pemberdayaan dibentuk sebagai upaya pemerintah Desa Banmaleng dalam membantu masyarakat guna meningkatkan kemampuan usaha agar lebih baik lagi, dengan kata lain program ini dirancang guna

mendorong pada proses peningkatan kesejahteraan yang pada prosesnya akhirnya diharapkan masyarakat dapat hidup mandiri.

Beberapa program pemberdayaan masyarakat yang dibuat pemerintah Desa Banmaleng dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

1. Program Pelatihan dan Keterampilan bagi ibu-ibu PKK.

Diantara program yang telah dijalankan oleh pemerintah kepala Desa Banmaleng melalui Lembaga social kemasyarakatan yang tergabung dalam kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), adalah program pelatihan dan keterampilan memasak dan menjahit. Berdasarkan hasil Analisa penulis merujuk pada data hasil wawancara, bahwa program yang dirancang ini ditujukan agar kemampuan masyarakat Desa Banmaleng dalam hal keterampilan dapat meningkat guna menopang kehidupan ekonominya sehingga dengan adanya program ini kesejahteraan masyarakat dapat terwujud melalui usaha kreatifitas dalam hal memasak dan menjahit.

Menurut penulis apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Banmaleng melalui programnya tersebut merupakan sebuah proses pengembangan ekonomi masyarakat pada sisi sumber daya manusia. Dalam teori sumber daya manusia pengembangan asset manusia merupakan kunci keberhasilan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Agar pembahasannya lebih sistematis, maka terlebih dahulu akan penulis uraikan tentang program pelatihan dan memasak terlebih dahulu. Program pelatihan dan keterampilan memasak ini dilakukan setiap dua bulan sekali tujuan dari program ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat Desa Banmaleng, khususnya ibu-ibu rumah tangga. Program keterampilan memasak ini berdasarkan Analisa penulis dapat dijadikan sebagai sebuah modal usaha yang sifatnya usaha kreatif, sebab dalam program pelatihan dan keterampilan memasak para peserta didorong untuk menghasilkan sebuah karya masakan yang berbeda dari masakan kebanyakan dan memiliki nilai jual ekonomi. Beberapa bahan makanan local seperti singkong yang memang selama ini banyak terdapat di Desa tersebut dapat lebih diberdayakan lagi dengan cara dibuat kripik dengan aneka rasa, maka tidaklah mengherankan jika dalam program pelatihan dan keterampilan tersebut, antusias masyarakat khususnya kaum ibu rumah tangga sangat banyak. Dengan adanya program ini setidaknya ada dua hal yang didapat oleh masyarakat Desa Banmaleng, pertama adalah pengetahuan mereka bertambah karena telah mengikuti program itu. Kedua adalah timbulnya peluang usaha dari hasil akhir program tersebut.

Dari hasil observasi dan wawancara penulis diperoleh keterangan bahwa sudah ada beberapa peserta program pelatihan

dan keterampilan memasak yang kini mulai mencoba usaha pembuatan kripik singkong dengan aneka rasa.

Diakui oleh ibu ratna yang kini berusaha dalam pembuatan kripik singkong, usaha yang kini dia lakukan termotivasi berkat program pelatihan dan keterampilan memasak yang diikutinya.

Usahanya kini mulai menunjukkan hasil kearah positif, banyak permintaan mulai bermunculan meskipun usaha pemasaran masih bersifat mulut ke mulut. Dengan usaha yang dilakukan selama ini setidaknya dirinya dapat membantu penghasilan suami. Dari contoh kasus tersebut menurut penulis program yang dibuat pemerintah Desa Banmaleng memiliki dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebab masyarakat

termotivasi untuk berusaha. Dengan diberi dukungan berupa pemahaman dalam sikap berwirausaha diharapkan masyarakat dapat lebih mandiri. Kunci utama dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat menurut penulis adalah adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri mengenai pandangan hidupnya dalam berusaha, meskipun factor permodalan tidak begitu saja diabaikan.

Karena masalah yang dihadapi masyarakat Desa Banmaleng tidak hanya sebatas pada masalah sumber daya manusianya, tetapi masalah yang dihadapi dalam proses peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya adalah program keterampilan menjahit. Berdasarkan hasil observasi penulis dan hasil wawancara diperoleh sebuah kesimpulan bahwa program ini dirancang guna meningkatkan keterampilan masyarakat Desa Banmaleng khususnya peserta kursus menjahit. Dengan adanya program ini para ibu rumah tangga diharapkan memiliki kemampuan dan keterampilan tambahan yang berguna guna membantu penambahan penghasilan keluarga sehingga dengan mereka berusaha atau bekerja sebagai penjahit mereka memiliki pendapatan diluar pendapatan suami sehingga dengan demikian terjadi penambahan pendapatan. Dalam konteks ilmu ekonomi dengan adanya peningkatan pendapatan maka belanja rumah tangga juga akan bertambah yang pada akhirnya terjadi pergerakan uang dalam rumah tangga. Dengan adanya peningkatan pendapatan rumah tangga tersebut menurut penulis merupakan salah satu indikator terjadinya peningkatan kesejahteraan ekonomi. Program pelatihan dan keterampilan menjahit ini menurut penulis juga memiliki dua sisi yang positif. Pertama, dengan adanya program ini masyarakat khususnya para peserta memiliki pengetahuan lebih jika dibandingkan dengan masyarakat yang tidak mengikuti program ini. Artinya mereka memiliki nilai lebih dari yang lain, sebab dalam proses peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat kemampuan atau *Skill* merupakan syarat yang sangat dibutuhkan.

Kedua, dengan program tersebut masyarakat khususnya para peserta didorong untuk kreatif dalam membuka usaha baru yang memiliki nilai jual ekonomi.

Dengan kemampuan yang didapat para ibu rumah tangga dari hasil program pelatihan dan keterampilan menjahit tersebut bias dijadikan sebagai modal usaha bagi peningkatan kesejahteraan rumah tangga mereka.

Menurut ibu ecih, peserta kursus menjahit yang kini mulia membuka usaha jahit dirumahnya, apa yang telah dia dapat selama dirinya mengikuti program pelatihan dan keterampilan menjahit sangat berguna bagi dirinya dan keluarganya. Berkat program yang dibuat oleh Pemerintah Desa Banmaleng melalui Lembaga PKK, kini dirinya sudah menjahit dan bisa menghasilkan pendapatan sendiri dari hasil usahanya tersebut. Diakui usahanya untuk bulan-bulan ini menunjukkan kearah positif. Beberapa tetangga dekat sudah mulai mempercayai dirinya untuk dibuatkan baju khususnya guna menghadapi hari raya nanti. Pendapatan yang diperoleh juga lumayan cukup untuk membantu menghidupi keluarganya.

Dari contoh kasus tersebut, penulis dapat simpulkan bahwa program kursus menjahit memiliki dampak positif bagi peningkatan kemampuan kapasitas masyarakat. Selain itu program ini berdampak pada munculnya usaha-usaha baru skala rumah

tangga yang pada akhirnya terjadinya peningkatan kesejahteraan ekonominya masyarakat melalui lahirnya berbagai usaha.

2. Program Pelatihan dan Keterampilan bagi Masyarakat Pengrajin Assesoris

Selain program pelatihan dan keterampilan yang ditujukan bagi ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam organisasi PKK Desa Banmaleng, pemerintah Desa Banmaleng juga membuat sebuah program pemberdayaan bagi masyarakat pengrajin di Desa Banmaleng. Sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya bahwa masyarakat Desa Banmaleng mayoritas penduduknya bekerja sebagai pengrajin pembuatan assesoris. Berangkat dari permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat, khususnya masalah dalam hal pembuatan assesoris, maka pemerintah bekerja sama dengan pemda Kabupaten Sumenep berupaya menyusun sebuah program dimana program yang dijalankan tersebut sudah mengakomodir berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat pengrajin yang ada di Desa Banmaleng.

Beberapa masalah yang dihadapi masyarakat pengrajin yang ada di Desa Banmaleng adalah masalah sumber daya manusia (SDM) yang menyangkut keterbatasan keterampilan, produktifitas yang rendah, tidak mampu berkompetensi, masalah teknologi produksi dan masalah permodalan. Berdasarkan permasalahan tersebut pemerintah Desa Banmaleng selalu rutin

menyelenggarakan program pemberdayaan bagi masyarakat pengrajin assesoris.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya di sektor industry assesoris pemerintah Desa Banmaleng bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Sumenep memberikan berbagai bantuan demi kemajuan industry assesoris yang memang menjadi andalan masyarakat Desa Banmaleng secara umum tersebut. Bantuan yang diberikan tersebut berupa bantuan yang bersifat teknis maupun non teknis.

Bantuan tersebut biasanya berwujud pada program pemberdayaan masyarakat berupa program pelatihan, penyuluhan, pemberian bantuan usaha, dan program study banding guna meningkatkan SDM masyarakat pengrajin di Desa Banmaleng.

2. Program Penyuluhan Kewirausahaan bagi Masyarakat Pengrajin Assesoris di Desa Banmaleng

Program penyuluhan dilakukan guna mengakomodir masalah sumber daya manusia yang rendah guna meningkatkan kemampuan mereka berhubungan dengan permasalahan kewirausahaan di bidang industri assesoris. Penyuluhan tersebut berhubungan dengan bagaimana cara manajemen keuangan industri yang terpisah dengan pengelolaan keuangan rumah tangga. Sehingga dengan adanya penyuluhan ini diharapkan masyarakat pengrajin dapat mengelola keuangan secara baik, manajemen produksi yang berhubungan dengan

bagaimana memproduksi sebuah produk yang dapat diterima pasar dan sesuai dengan standart pasar, dan lain sebagainya.

Menurut penulis dengan adanya penyuluhan tersebut masyarakat diajak untuk mengerti tentang bagaimana pengelolaan manajemen berwirausaha dengan baik. Tujuan dari program penyuluhan adalah upaya penyadaran bgi masyarakat mengenai berbagai masalah yang dihadapinya, dengan kata lain program penyuluhan tersebut merupakan sebuah proses penyadaran dan alternatif bagi usaha peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pengrajin di Desa Banmaleng. Sebab menurut pandangan penulis bahwa usaha untuk mencapai kesejahteraan adalah adanya kesadaran berusaha secara benar yang diperoleh melalui penambahan wawasan.

Penambahan wawasan tersebut dapat diperoleh melalui jalur penyuluhan.

Wirausaha merupakan model pencaharian atau usaha masyarakat kebanyakan. Karena itu pemberdayaan usaha kecil dan menengah merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pada kemandirian dan sumber daya lokal. Wirausaha juga terbukti mampu mengurangi angka pengangguran, khususnya yang terjadi di Desa Banmaleng. Urgensi yang diadakan oleh pemerintah Desa Banmaleng menurut penulis adalah sebagai proses atau bagian dari pengembangan dan peningkatan kesejahteraan yang berujung pada kemandirian

masyarakat dalam bidang ekonomi. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang memiliki kepercayaan diri sendiri sehingga setiap individu memiliki kemampuan tersendiri untuk hidup lebih sejahtera. Kemampuan untuk hidup sejahtera menurut penulis berhubungan erat dengan proses pencerdasan masyarakat dengan cara meningkatkan sumber daya manusia (SDM), ilmu pengetahuan dan teknologi.

Konsep pemberdayaan yang demikian itu bagi penulis sudah terakomodir di dalam program penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Banmaleng dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Banmaleng tersebut.

Program penyuluhan bagi masyarakat pengrajin di Desa Banmaleng dirasakan oleh para pengusaha dan pengrajin sebagai sebuah kegiatan yang positif. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh bapak H. Tandi yang berprofesi sebagai pengusaha industri pembuatan asesoris. Menurutnya kegiatan penyuluhan yang ditujukan bagi masyarakat pengrajin memiliki nilai positif dalam berbagai hal, diantaranya masyarakat menjadi lebih tahu mengenai berbagai hal yang mendukung keberhasilan usaha mereka di bidang industri asesoris.⁵²

Penyuluhan juga sering dilakukan manakala ada bantuan peralatan produksi berupa mesin produksi di Desa Banmaleng. Tujuannya adalah memberikan himbauan dan motifasi kepada mereka

⁵² Wawancara dengan bapak H. Tandi Pengusaha dan Pengrajin di Desa Banmaleng

agar selalu berkarya dengan memperhatikan kualitas produksi sehingga produk mereka dapat diterima pasar dan sesuai dengan keinginan pasar.

3. Program Pelatihan bagi Peningkatan Produktifitas Masyarakat Pengrajin

Selain program penyuluhan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Banmaleng, program pelatihan juga selalu diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai pengrajin di bidang industri asesoris. Berbeda dengan program penyuluhan yang terkesan para pesertanya berperan pasif, pada program pelatihan peningkatan produktifitas masyarakat pengrajin, seluruh peserta di dorong untuk selalu berperan aktif dalam setiap proses kegiatannya. Sebab dalam program pelatihan ini kemampuan para peserta dibentuk dan diarahkan agar selalu bertambah dan meningkat.

Sebagaimana yang diutarakan oleh bapak Rohim kepada penulis bahwa pada program pelatihan ini dirinya dituntut selalu berperan aktif, sebab program pelatihan ini kemampuan teknis dari setiap peserta selalu dituntut. Para pembimbing hanya berfungsi sebagai motifator dan fasilitator dalam program pelatihan tersebut. Materi pelatihan biasanya berhubungan dengan teknik produksi, antara lain kemampuan mengoperasikan mesin produksi hasil sumbangan dari pemda kabupaten sumenep, kemampuan dalam

teknik pengemasan hasil produksi yang menarik, kemampuan *maintenance* atau perawatan mesin jika terjadi kerusakan serta berbagai teknik produksi yang bersifat efektif dan efisien.⁵³

Dari kegiatan pelatihan tersebut, penulis berkesimpulan bahwa program pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Banmaleng bekerja sama dengan pemda kabupaten sumenep adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam program pelatihan ini terdapat proses atau transfer teknologi yang berguna bagi peningkatan kemampuan masyarakat. Kemampuan atau skill yang dimiliki tersebut nantinya dapat dijadikan modal bagi masyarakat yang bersangkutan dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Selain itu, menurut analisa penulis program pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Banmaleng bagi pesertanya memiliki keunggulan komparatif. Sebab antara program penyuluhan dan program pelatihan yang diadakan memiliki hubungan yang tak bisa dipisahkan. Program penyuluhan berhubungan dengan upaya penyadaran dan penambahan wawasan bagi masyarakat pengrajin, sedang program pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat pengrajin dalam hal produktifitasnya. Dengan demikian proses peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang dilakukan oleh pemerintah Desa Banmaleng guna meningkatkan kesejahteraan

⁵³ Wawancara dengan bapak rohim peserta penyuluhan dan pelatihan yang juga berprofesi sebagai pengrajin didesa banmaleng

ekonomi masyarakat sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat yakni berbasis pada sumber daya manusia stempat, partisipasi aktif masyarakat dan berkelanjutan (*Sustainable*).

4. **Program Bantuan Modal Usaha bagi Masyarakat Pengrajin Assesoris**

Sebagaimana penulis utarakan sebelumnya bahwa masalah permodalan bagi masyarakat pengrajin assesoris Desa Banmaleng merupakan masalah klise yang selalu mereka hadapi. Menanggapi hal tersebut pemerintah Desa Banmaleng bekerjasama dengan pemda Kabupaten Sumenep memberikan bantuan modal usaha bagi masyarakat desa, khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai pengrajin assesoris. Bantuan usaha tersebut berasal dari pemerintah pusat melalui Depattemen Koperasi dan UKM yang disalurkan kepihak Provinsi dan pemda Kabupaten yang berakhir di pihak Desa di seluruh Indonesia.

Masalah permodalan merupakan keluhan yang sering penulis dengar berkaitan dengan produktifitas mereka dalam bidang industri assesoris. Tidak adanya permodalan yang cukup dalam rangka pengembangan usaha menjadi pemicu lemahnya produktifitas mereka baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Bagi masyarakat Desa Banmaleng modal menjadi kebutuhan yang mendasar pada saat usaha mereka memasuki tahap perkembangan, baik pada sisi pengembangan produk maupun pada pengembangan pasar.

Kasus yang umum terjadi pada masyarakat Desa Banmaleng adalah ketika usahanya mulai berkembang dan mulai mendapat perhatian pasar, sering kali terbentur bahkan surut kembali kebelakang karena tidak di *Back-up* oleh modal yang mencukupi. Berdasarkan hasil observasi penulis, mayoritas masyarakatnya yang bermata pencaharian sebagai pengusaha atau pengrajin di sektor industri assesoris mengakui masalah permodalan hingga kini masih merupakan masalah pokok.

Bagi penulis berdasarkan kasus tersebut, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Banmaleng sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam menyikapi masalah permodalan dengan program bantuan modal usaha secara bergulir menggunakan pendekatan strategi peningkatan kesejahteraan. Strategi peningkatan ekonomi yang berbasis kesejahteraan masyarakat dengan cara lebih banyak memberikan bantuan permodalan bergulir yang di drop oleh pemerintah yang disertai dengan berbagai kebijakan dan ketentuan yang sengaja dibuat oleh pemerintah.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak jaelani, salah satu pengrajin yang ada di Desa Banmaleng yang tercatat sebagai anggota penerima bantuan modal usaha bergulir dari pemerintah Desa Banmaleng. Menurutnya ada beberapa kriteria yang harus dia penuhi sebelum layak untuk menerima bantuan tersebut. Pertama harus dipahami bahwa bantuan yang diberikan bukanlah

bantuan yang sifatnya Cuma-Cuma. Kedua sebelum dilakukan survey tentang kelayakan usaha yang selam ini dijalannya. Ketiga adalah kemampuan untuk mengembalikan dana yang dipinjamkan yang disertai dengan berbagai aturan yang ketat.⁵⁴

Dari uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa program pemberian bantuan modal secara bergulir yang dilakukan oleh pemerintah Desa Banmaleng dalam membantu masyarakatnya menuju peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sudah sesuai prinsip keadilan sosial. Sebab dana yan dipinjamkan tersebut nantinya akan di salurkan kembali kepada mereka yang berkesempatan menerima bantuan tersebut.

Dengan adanya bantuan modal tersebut masyarakat pengraji assesoris yang ada di Desa Banmaleng dapat memperkuat usahanya baik dari sisi peningkatan produksi secara kualitatif maupun kuantitatif. Peningkatan secar kualitatif diperoleh dengan cara pengadaan mesin-mesin produksi guna memperlancar proses produksi, sedangkan secara kuantitatif dapat dilakukan dengan jalan memperbesar volume produksi. Indikator peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pengrajin berkat adanya bantuan modal bergulir ini menurut penulis dapat dilihat dari sisi peningkatan jumlah produksi, peningkatan pendapatan, peningkatan aset-aset produksi berupa bertambahnya jumlah tenaga kerja, mesin dan lain sebagainya.

⁵⁴ Wawancara dengan bapak jaelani, pengrajin penerima bantuan modal bergulir bagi UKM desa Banmaleng

Menurut bapak H. Tandi selaku pengusaha di bidang pembuatan asesoris yang juga tercatat sebagai warga penerima bantuan modal usaha bergulir, sebelum dirinya mendapat bantuan usaha dari pihak Desa, kemampuan usaha untuk memproduksi asesoris rata-rata perhari hanya 500 kodi. Setelah dirinya mendapat bantuan modal usaha bergulir dari pemerintah sebesar 5 juta untuk jangka waktu pengembalian modal usaha selama 10 bulan, kini kemampuan produsinya bisa ditingkatkan hingga 850 kodi perhari. Selain peningkatan produksi berkat bantuan tersebut dirinya kini juga berhasil menambah jumlah tenaga kerja yang dimiliki dimana sebelumnya hanya 8 orang kini bertambah menjadi 10 orang.⁵⁵

Dengan demikian menurut penulis program pemberian bantuan usaha bergulir yang dilakukan oleh pemerintah Desa Banmaleng berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya, khususnya masyarakat penerima bantuan tersebut. Jika program penyuluhan dan pelatihan yang selama ini diberikan oleh pemerintah Desa Banmaleng memiliki dampak pada peningkatan kapasitas skill dan pengetahuan bagi masyarakat yang dapat dijadikan modal bagi usaha peningkatan kesejahteraan ekonomi khususnya di bidang industri pembuatan asesoris, maka pada program pemberian bantuan modal bergulir ini pemerintah Desa Banmaleng telah berhasil meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan cara

⁵⁵ Wawancara dengan bapak H. Tandi penerima bantuan dana bergulir bagi UKM di desa banmaleng

memperbesar jumlah produksi yang berakhir pada peningkatan jumlah pendapatan yang didapat oleh para pengrajin dan pengusaha.

Selain itu, program bantuan modal usaha secara bergulir berdasarkan hasil analisa penulis juga berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah pekerja yang dimiliki oleh pengusaha sebagaimana yang dialami oleh bapak H. Tandi.⁵⁶

Berikut ini penulis sajikan analisa hasil analisa penuli dari program bantuan modal usaha bergulir berkaitan dengan proses peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pengrajin di bidang industri assesoris.

No	Jenis Bantuan	Indikator Kesejahteraan	Keterangan
1	Modal Bergulir Usaha	Meningkatkan jumlah produk yang diproduksi akibat penambahan modal usaha. Meningkatkan kualitas produk akibat adanya penambahan mesin baru. Bertambahnya jumlah tenaga kerja akibat bertambahnya volume produksi	Meningkatkan pendapatan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan pengusaha dan pekerja.
2	Pelatihan	Bertambahnya kemampuan/skill yang dimiliki oleh pengrajin yang berpengaruh pada kualitas dan kuantitas produk yang	

⁵⁶ Wawancara dengan H. Tandi Pengusaha industri assesoris desa banmaleng

		dihasilkan.	
3	Penyuluhan	Bertambahnya pemahaman masyarakat pengrajin mengenai pengelolaan usaha di bidang industri pembuatan assesoris.	
4	Bantuan Bahan Baku	Bertambahnya jumlah bahan baku yang tersedia untuk diproduksi	Bantuan berupa bahan nikel dan timah
5	Program Banding Study	Bertambahnya wawasan karena terjadinya pertukaran pengalaman.	

Tabel 5
Data Penerima Bantuan Modal Usaha Bergulir Desa Banmaleng

No	Nama Penerima Bantuan	Jumlah Yang Diterima	Jangka Waktu
1	H. Tandi	5 Juta	10 Bulan
2	Darma	2.5 Juta	10 Bulan
3	Safta	3 Juta	10 Bulan
4	Saprudin	2.5 Juta	10 Bulan
5	Caca	1 Juta	10 Bulan
6	H. Asrarudin	3 Juta	10 Bulan
7	Ahmad Yani	2 Juta	10 Bulan
8	Rasim	2 Juta	10 Bulan
9	H. Opay	3 Juta	10 Bulan
10	Jaenudin	3 Juta	10 Bulan

11	H. Kahfi	3 Juta	10 Bulan
12	Cahyono	3 Juta	10 Bulan
13	Syarifuddin	3 Juta	10 Bulan
14	Santa	3 Juta	10 Bulan
15	Rohim	3 Juta	10 Bulan
16	Ahmad Jaelani	2.5 Juta	10 Bulan
17	Tawi	1.5 Juta	10 Bulan
18	Haci	3 Juta	10 Bulan
19	Jamar	2 Juta	10 Bulan
20	H. Aco	3 Juta	10 Bulan

Sumber: Data Penerima Bantuan modal usaha Desa Banmaleng 2015

5. Program Magan dan Study Banding bagi Pengusaha dan Pengrajin Industri Assesoris

Program study banding yang dilakukan oleh pemerintah Desa Banmaleng bekerja sama dengan pemda sumenep dibuat guna menambah pengetahuan dan wawasan serta keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat pengusaha dan pengrajin yang ada di Desa Banmaleng. Dengan adanya program ini para peserta yang berpartisipasi dalam program ini dapat bertukar pikiran dengan masyarakat pengrajin yang sama di luar Desa Banmaleng mengenai masalah yang berkaitan dengan usaha di bidang industri pembuatan assesoris. Dengan demikian setelah mereka pulang dari kegiatan magang atau study banding akan menghasilkan karya yang bersifat

inovatif yang terinspirasi dari hasil kegiatan magang dan study banding tersebut.

Berdasarkan hasil observasi penulis program magang dan study banding yang dilakukan oleh beberapa pengusaha dan pengrajin ini bertujuan untuk mengetahui proses produksi usaha yang sejenis dengan usaha mereka di Desa Banmaleng khususnya dalam hal proses penyepuhan yang lebih baik lagi. Program ini dibiayai oleh Departemen koperasi dan UKM melalui dinas yang ada di kabupaten Sumenep. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh H. Opay selaku peserta study banding ke daerah Bali selama tiga hari. Menurutnya dari hasil kegiatannya tersebut dirinya memperoleh banyak pengalaman dan ilmu yang baru. Ilmu yang diperoleh dari hasil kegiatannya bersama rekan-rekannya itu kemudian akan ditularkan kepada para pengusaha dan pengrajin yang ada di Desa Banmaleng.⁵⁷

Dengan demikian menurut pendapat penulis, program magang dan pelatihan yang telah dilakukan oleh H. Opay beserta rekan-rekannya itu merupakan proses pencarian ilmu dan wawasan bagi kemajuan usaha industri pembuatan asesoris. Dengan bertambahnya ilmu yang di dapat oleh para pengusaha dan pengrajin itu, proses peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah bertambahnya

⁵⁷ Wawancara dengan H. Opay ketua pengrajin yang berangkat study banding ke bali

ilmu dan skill yang dimiliki yang dapat dijadikan modal guna memperoleh kesejahteraan ekonomi.

Tabel 6
Daftar Peserta Study Banding

No	Nama Peserta	Status	Kota Tujuan
1	H. Opay	Ketua Pengrajin Desa Banmaleng	Bali
2	Jaenudin	Pengrajin	Bali
3	Cahyono	Pengrajin	Bali
4	H. Kahfi	Pengrajin	Bali
5	Syarifuddin	Pengrajin	Bali

Sumber: Data hasil observasi dan wawancara

Sementara menurut bapak Jaenudin study banding yang dilakukan bersama rekan-rekannya tersebut merupakan modal yang sangat berharga bagi kemajuan usaha kerajinan di bidang industri asesoris. Mengingat Bali merupakan kota yang terkenal dengan seni kerajinan peraknya.⁵⁸ Dengan demikian menurut analisa penulis ada hubungan positif dari kegiatan study banding dengan upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, sebab ilmu yang didapat merupakan modal usaha yang berharga bagi keberhasilan usaha mereka.

⁵⁸ Wawancara dengan bapak jaelani peserta study banding ke bali

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Program peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang telah dilakukan pemerintah Desa Banmaleng sebagaimana yang penulis utarakan antara lain adalah program mengaktifkan program PKK yang berhubungan dengan proses peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Banmaleng dengan jalan memberikan pelatihan dan keterampilan bagi kaum wanitanya, sedangkan bagi kaum laki-laki, pemerintah Desa Banmaleng memberikan pelatihan dan penyuluhan kewirausahaan khususnya kepada masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha dan pengrajin industri asesoris.

Program-program tersebut akan terus dilaksanakan sejalan dengan perkembangan dan kemajuan jaman. Pemerintah dalam hal ini perangkat Desa dituntut untuk selalu berperan aktif dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga tercapai suatu tatanan masyarakat yang ideal. Program peningkatan kesejahteraan akan selalu ditingkatkan dan dievaluasi. Tidak ada kata menyerah untuk selalu berbuat ke arah yang positif, sebab kemiskinan akan ada selama manusia ada di bumi ini.

Oleh sebab itu diperlukan kerja sama yang baik antara perangkat Desa dengan masyarakat guna memerangi kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang sejahtera dalam arti yang lebih luas lagi. Pemerintah dalam

hal ini hanyalah bertidak sebagai fasilitator, mengarahkan masyarakat agar dapat mandiri, meningkatkan kapasitas skill yang ada dalam diri masyarakat.

Kita boleh saja berbangga hati sebab Indonesia sudah merdeka semenjak 73 tahun lalu, tapi sejatinya kemerdekaan yang hakiki masih terus diperjuangkan. Masalah kemiskinan, kebodohan dan pengangguran hingga kini masih menjadi agenda perjuangan rakyat dan bangsa. Peran pemerintah dalam menangani masalah tersebut masih diupayakan sehingga cita-cita masyarakat dan rakyat yang sejahtera dapat terwujud. Begitu pula yang kini dialami oleh pemerintah Desa Banmaleng, terus berjuang mengentaskan masyarakatnya menjadi masyarakat yang sejahtera melalui upaya-upaya yang terarah dan terprogram.

B. SARAN

Upaya pemerintah Desa Banmaleng dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui program penyuluhan, pelatihan dan pemberian bantuan usaha di bidang kewirausahaan industri pembuatan asesoris dan pembagian beras miskin merupakan bentuk usaha pemerintah Desa Banmaleng dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Mungkin kiranya bermanfaat penulis menyarankan khususnya kepada pihak pemerintah Desa Banmaleng agar pemerintah Desa Banmaleng lebih meningkatkan kinerjanya dan lebih memperbanyak lagi program-program yang tujuannya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.

Berbagai program yang tidak begitu penting sebaiknya dihilangkan dan digantikan dengan program-program yang memiliki prospek yang lebih

berguna bagi masyarakatnya. Selanjutnya di sisi masyarakatnya, masyarakat juga harus lebih tanggap lagi bahwa program yang dilakukan oleh pemerintah Desa Banmaleng tidak semata-mata proyek rutin yang dijalankan agar bisa dikatakan pemerintah punya agenda, tetapi jauh dari itu, bahwa program yang diselenggarakan pemerintah Desa Banmaleng adalah bersumber dari kesungguhan dan perhatian pemerintah terhadap masyarakat dan rakyatnya dalam sekup yang kecil yakni pada tataran Desa.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat hendaknya tidak bertolak dari anggaran dana pemerintah semata, kedepannya harus ada penggalian dana secara swadaya guna membiayai program pengembangan dan peningkatan sumber daya masyarakat Desa. Masyarakat Desa kedepannya harus mampu berdikari dalam menciptakan sesuatu yang berguna bagi Desa banmaleng.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, H. M, *Psikologi Dakwah Suatu Pengantar Studi*, (Jakarta: Bumi Aksara 1994).
- Arifin, Tajul, *Pengantar Studi Sosiologi*, (Bandung: Ari and Brother 1995).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta 1997).
- Danim, Sudarman, *Transformasi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara 1995).
- Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta: 2002).
- Departemen Dalam Negeri RI, *Rencana Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa*, (Jakarta: Penebar Swadaya 1996).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1990), cet. Ke-3
- Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, *Modul Keluarga Sejahtera*.
- Hakim Atang Abdul, Mubarak Jaih, *Metode Studi Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya 2000).
- Himpunan Materi Penyuluhan Hukum Bagi Perangkat Desa, tahun 2015.
- Himpunan Pedoman Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, tahun 2015
- Himpunan Peraturan Pemerintah Desa Banmaleng, Tahun 2015.
- Kahmad, Dadang, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Remaja Rosada Karya 2002).
- Mansur, Cholil, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya: Usaha Nasional).
- Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karya 2002). Cet. Ke-13
- Muhyidin Asep, Syafi'i Agus Ahmad, *Metode Pengembangan Dakwah*, (Bandung: Pustaka Setia 2002).
- Muhyidin, Asep, Syafi'i Agus Ahmad, *Metode Penelitian Dakwah*, (Bandung: Pustaka Setia 2003).

Narbuko Cholid, Achmad Abu, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara 1999).

Ndraha Taliziduhu, *Dimensi-Dimensi Pemerintah Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara 1991), Cet. Ke-3

Rahman Fazlur, *Tema Pokok Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka 1980).



MATRIK PENELITIAN

MASALAH PENELITIAN	PERTANYAAN PENELITIN	VARIABEL	INDIKATOR
<p>Ditengah himpitan ekonomi dan melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok, masyarakat Desa Banmaleng mampu bertahan hidup dengan mengembangkan berbagai usaha rumahan, seperti usaha mebeler, produksi batik dan lain-lain. Berbagai usaha tersebut, sayangnya tidak cukup menjadi perhatian pemerintah desa setempat. Pemerintah seolah meyerahkan persoalan yang dihadapi kepada warganya sendiri tanpa ada trobosan berarti. Akibatnya, masyarakat berusaha mandiri dengan segala keterbatasan mereka untuk tetap memenuhi kebutuhan keseharian. Berangkat dari fenomena di atas, yang menjadi masalah penelitian (research probem) ini adalah sebagai berikut: Mengapa masyarakat mampu mempertahankan perekonomian mereka di tengah kebutuhan dan harga-harga semakin meningkat, padahal pemerintah desa tidak peduli dengan persoalan warganya?.</p>	<p>1. Bagaimana Strategi masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dengan usaha rumahan</p>	Bertani	
		Mencari pinjaman	
		Berjualan seadanya	
	<p>2. Apa strategi yang dilakukan masyarakat untuk mengembangkan usaha rumahan agar memenuhi kebutuhan</p>	Menambah modal usaha	
		Pemasaran	
		Menjalin Kerjasama	
	<p>3. Apa kontribusi pemerintah desa dalam pegembangan usaha yang dilakukan warganya terhadap produk usaha warganya</p>	Pendampingan masyarakat	Penyuluhan Bengkel kerja Pelatihan skill
		Mencari distributor	

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irwan Hidayat
NIM : 082144014
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Kemandirian Masyarakat Desa Banmaleng Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonominya Tanpa Bantu Pemerintah Desa*" adalah hasil dari penelitian/karya sendiri.

Bagian atau data tertentu yang saya peroleh dari Perusahaan atau Lembaga dan/atau saya kutip dari hasil karya orang lain telah di tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dngan kaidah penulisan karya ilmiah.

Jember, 23 November 2020
Saya yang menyatakan

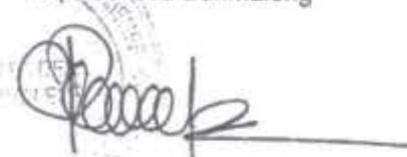


Irwan Hidayat
NIM. 082144014

**JURNAL KEGIATAN
DI DESA BANMALENG KECAMATAN GILI GENTING
KABUPATEN SUMENEP**

NO	TANGGAL	KEGIATAN	TANDA TANGAN
1	08 Juni 2017	Penyerahan surat penelitian kepada Kepala Desa Banmaleng	
2	14 Juni 2017	Wawancara dengan Kepala Desa Banmaleng	
3	17 Juni 2017	Wawancara dengan bapak H. Tandi	
4	20 Juni 2017	Wawancara dengan bapak Hermawan Darma	
5	27 Juni 2017	Wawancara dengan H. Asraruddin	
6	04 Juli 2017	Wawancara dengan H. Opay	
7	10 Juli 2017	Wawancara H. Kahfih	
8	15 Juli 2017	Wawancara dengan bapak Cah Yono	
9	17 Juli 2017	Melanjutkan penelitian yang kurang	
10	24 Februari 2020	Pengambilan keterangan penelitian surat selesai	

Banmaleng, 24 Februari 2020
Kepala Desa Banmaleng



RAMLI



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN GILIGENTING
DESA BANMALENG**

Jalan Raya Asta Agung Demang No. 10 HP. 087886896888

BANMALENG

Kode Pos 69482

SURAT KETERANGAN

Nomor : 36 /435.309.108/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAMLI
Jabatan : Kepala Desa Banmaleng Kec.Giligenting Kab.Sumenep

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : IRWAN HIDAYAT
Tempat & Tgl.Lahir : Sumenep, 05 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Dusun Sokarammi Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep

Bahwasanya orang tersebut benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep..

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banmaleng, 24 Februari 2020
Kepala Desa Banmaleng

RAMLI

DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Kepala Desa Bapak Romli



Wawancara dengan h. Tandi



wawancara dengan bapak cah yono



Wawancara dengan Asra ruddin

BIODATA

Nama : Irwan Hidayat
NIM : 082144014
Tempat-tanggal-lahir : Sumenep, 07 Juli 1995
Alamat : Banmaleng - Gili Genting - Sumenep - Madura
Jurusan/Prodi : Dakwah / Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
No.Telp : 087765792374

RIWAYAT PENDIDIKAN

- ❖ MI Sabilul Huda (2008)
- ❖ MTS Sabilul Huda (2011)
- ❖ SMAI Sabilul Huda (2014)
- ❖ UIN KH. ACHMAD SHIDDIQ (2020)

PENGALAMAN ORGANISASI

- ❖ Ketua Litbang UKPK IAIN Jember 2016/2017
- ❖ Departemen Penelitian, Pengembangan dan Pembinaan HMI Cabang Jember
Komisariat Sunan Ampel 2018/2019
- ❖ Kabid Pengembangan Instruktur dan Kurikulum BPL HMI Cabang Jember
2018/2019
- ❖ Ketua Umum BPL HMI Cabang Jember 2019/2020

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- ❖ Latihan Kader I (*Basic Training*) HMI Cabang Jember
- ❖ Latihan Kader II (*Intermediate Training*) HMI Cabang Karawang
- ❖ Latihan Kader III (*Advance Training*) HMI Badko Jawa Barat
- ❖ Pelatihan Instruktur Tingkat Dasar (PITD)
- ❖ Pelatihan Senior Course (SC)
- ❖ Training of Trainer (NDP)